

DAFTAR ISI

- 4 LAPORAN UTAMA
Keketuaan Myanmar
untuk ASEAN Tahun 2014
- 5 LAPORAN UTAMA
Potensi Pasar Thailand
- 8 LAPORAN UTAMA
Potensi Pasar Brunei Darussalam
- 9 LAPORAN UTAMA
Potensi Pasar Vietnam
- 13 LAPORAN UTAMA
Potensi Perdagangan Laos
- 18 LAPORAN UTAMA
Di Mata Pengusaha Jepang,
Indonesia Paling Menarik
- 19 LAPORAN KHUSUS
Prioritas Diplomasi RI Tahun 2014 :
Pembentukan Komunitas ASEAN 2015
dan Pembahasan Masa Depan ASEAN
sesudah 2015 menjadi salah satu
prioritas politik luar negeri RI
- 37 SERBA SERBI
Budaya Komunikasi dan
Manajemen Bisnis Vietnam
- 39 SERBA SERBI
Do's dan Don'ts di Thailand
- 46 WAWANCARA
Dibutuhkan Strategi Matang Dalam
Menghadapi AEC 2015
- 51 REPORTASE
Perkembangan Kerja Sama
Eksternal ASEAN
- 54 POJOK SOSIALISASI
Pembentukan PSA Di UNMUL Dan
Kegiatan Pemasarakatan KEA 2015
Di Balikpapan
- 57 POJOK SOSIALISASI
Pemasarakatan Komunitas ASEAN
2015 di Pangkalpinang, Provinsi
Bangka Belitung
- 60 POJOK SOSIALISASI
Kegiatan Pemasarakatan KEA 2015
di Semarang
- 66 KALENDER ASEAN

62

WISATA ASEAN GELIAT SEKTOR PARIWISATA ASEAN



64

WISATA ASEAN HALONG BAY VIETNAM



LAPORAN KHUSUS

21



EMPAT DASAWARSA KEMITRAAN ASEAN-JEPANG

CATATAN REDAKSI

Memasuki tahun 2014 yang juga merupakan tahun politik, Buletin Komunitas ASEAN berusaha untuk tampil lebih variatif dan menarik dari edisi sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Buletin Komunitas ASEAN telah dihiasi dengan informasi mengenai potensi dan peluang pasar dari negara-negara ASEAN yang khusus untuk edisi ini menyetengahkan negara Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina dan Laos. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan usaha di Indonesia yang memerlukan informasi mengenai peluang dan potensi ekonomi di negara-negara ASEAN.

Selain itu, Buletin ini memuat laporan wawancara eksklusif dengan Direktur Eksekutif KADIN Duta Besar Rahardjo Jamtomo mengenai persiapan Indonesia menyambut Komunitas ASEAN ditinjau dari kaca mata kalangan usaha. Dalam kaitannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak KADIN yang telah memberikan masukan bagi persiapan nasional dalam mewujudkan Komunitas ASEAN.

Sebagai kelanjutan dari Edisi ketiga, Buletin edisi keempat ini juga masih memuat hasil karya tulis pemenang unggulan Lomba Karya Tulis ASEAN dalam rangka HUT ASEAN yang ke-46 dengan tema "Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 yang Berorientasi pada Masyarakat". Dalam Pojok Sosialisasi juga di ulas mengenai kesi-

apan kota-kota Balik Papan, Pangkal Pinang dan Semarang dalam menyambut Komunitas ASEAN 2015. Sementara untuk kolom pengenalan wisata Negara ASEAN, diulas wisata Halong Bay di negara Vietnam. Pada edisi kali ini juga kami berupaya untuk memperkenalkan bahasa dan budaya negara anggota ASEAN.

Untuk memperkaya buletin Komunitas ASEAN ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, pengalaman perjalanan, maupun sumbang saran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah yang telah membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Komunitas ASEAN.

Apabila para pembaca ingin mendapatkan buletin Komunitas ASEAN untuk dibagikan di lingkungan kerja, kampus, sekolah dan masyarakat silahkan menghubungi redaktur.

Buletin ini juga dapat diakses dalam Jaringan *Online* di laman www.kemlu.go.id.

Akhir kata, semoga buletin Komunitas ASEAN Edisi keempat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri RI

Rosmalawati Chalid.



Tim Redaksi

K O M U N I T A S
Buletin
asean

Pembina : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN: I Gusti Agung Wesaka Puja; **Penanggung Jawab:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN: Rosmalawati Chalid; **Redaktur:** Widya Sinedu; **Penyunting/Editor:** Kiki Tjahjo Kusprabowo, Ahmad Firman Sejati, Hari Budiarto, Endang Rusmihaty, R. Sandjaya, Ahimsa, Nancy Kusbayanti; **Desain Grafis/Fotografer:** Susilo, Tuwuh Ismail, Endang Susilowati, Didi Suparyadi; **Pembuat Artikel:** M. Rizal Noor, Fajar Kurniawan, Mekar Andaryani Pradipta, Ari Hadiman, Anggraeni Widiastuti, Rina F. Wahyuningsih, Made Santi Ratnasari, Braviano Arief Adilaksono; **Sekretariat:** Kasirun, Mulyanto, Pria Novian, Ahmad Fadli, Putri Cita Puspita Dewi, Rudyatmanto, Tb. M. Ramadhan, Kosasih, Ika Yuli Indarti; **Alamat Redaksi:** Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, Telp. 021-3509050/021-3509059, Fax. 021-3509050

Bagi Anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui e-mail: buletinkomunitasasean@yahoo.com





KEKETUAAN MYANMAR UNTUK ASEAN TAHUN 2014

DALAM sejarah ASEAN, untuk pertama kalinya Myanmar memegang keketuaan ASEAN mulai tanggal 1 Januari 2014. Sepintas jika ditengok ke belakang, pengajuan permohonan secara resmi pemerintah Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada 2014 disampaikan saat KTT ASEAN ke-18 pada Mei 2011 di Jakarta. Kemudian pada KTT ke-19 bulan November 2011 di Bali, para pemimpin ASEAN mengambil keputusan untuk menyetujui berdasarkan rekomendasi dari para menteri luar negeri ASEAN. Myanmar dinilai telah siap menjadi Ketua ASEAN mengingat telah terjadi perkembangan signifikan dalam pembangunan demokrasi di Myanmar. Myanmar menjadi negara anggota ASEAN pada tahun 1997.

Indonesia turut mendukung dan berkontribusi dalam mempersiapkan Keketuaan Myanmar 2014 melalui program “Sharing of Experiences Pengalaman Indonesia sebagai Ketua ASEAN kepada Pemerintah Republik Uni Myanmar” di Kemlu, pada tanggal 17-20 Mei tahun 2013.

Presiden Republik Uni Myanmar U Thein Sein bulan Januari 2014 mengatakan bahwa Myanmar serius memainkan perannya melalui pendekatan yang komprehensif dalam menangani semua hal yang berkaitan tidak hanya dengan ASEAN, namun juga dalam konteks yang lebih luas di kawasan Asia dan global. Dalam keketuannya, Myanmar mengusung tema “Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community” dengan memprioritaskan beberapa isu pokok termasuk pembahasan Visi Komunitas ASEAN pasca-2015.

Beberapa isu yang akan dikedepankan Myanmar antara lain perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kesenjangan pembangunan dan isu *ageing society*. Isu lainnya ialah, Konektifitas

ASEAN terutama konektifitas darat dan pembangunan jembatan, memajukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penggerak utama ekonomi ASEAN, dan pembahasan visi baru ARF dalam konteks Komunitas ASEAN 2015. Adapun isu terakhir adalah mendorong kelanjutan implementasi langkah-langkah menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, termasuk upaya penguatan hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN.

Logo Keketuaan Myanmar di ASEAN 2014 berupa *Kha Yay* atau *Star Flower*. *Kha Yay* terdiri dari 10 kuntum bunga yang bergandengan menunjukkan jumlah anggota ASEAN sebanyak 10 negara yang saling bergandengan dan bersatu dalam sebuah komunitas sebagai ‘binatang’ di dunia.

Jika dilihat bentuknya, *Star Flower* menyerupai gerigi pada sebuah mesin. Keterkaitan 10 buah gerigi akan menjadi kekuatan pendorong bagi perdamaian dan kemakmuran di wilayah ASEAN yang menjadi tema Keketuaan ASEAN Myanmar. *Star Flower* adalah bunga yang umum ditemukan di Myanmar. Oleh karena itu, *Star Flower* dianggap dapat mewakili sebagian rakyat di wilayah ASEAN. *Star Flower* juga menjadi simbol persatuan yang berpusat kepada rakyat ASEAN dan diharapkan dapat maju dalam hal perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di wilayahnya.

Warna putih dan kuning pada *Star Flower* menunjukkan perdamaian dan kemakmuran rakyat ASEAN. Hal yang menarik dari *Star Flower* adalah aromanya karena tetap kuat dari jauh maupun dekat, bahkan ketika sudah layu. Karenanya seperti kekuatan aroma *Star Flower*, kekuatan rakyat ASEAN akan dapat terus terlihat abadi baik ketika mencapai prestasi dan juga pada saat sedang menghadapi tantangan. Latar belakang hi-

jau pada logo ASEAN 2014 diartikan bahwa ASEAN akan melakukan implementasi pembangunan wilayah dengan mengutamakan preservasi/ramah lingkungan dan perdamaian.

Keketuaan Myanmar untuk ASEAN 2014 ini didahului dengan Pertemuan para Menteri Luar Negeri pada AMM Retreat yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2014 di Bagan. Topik pertemuan antara lain tindak lanjut hasil-hasil KTT ke-23 ASEAN, prioritas ASEAN di tahun 2014 ini, serta berbagai tantangan yang dihadapi ASEAN. Hal lain yang dibahas adalah tindak lanjut dukungan terhadap pemulihan dan rehabilitasi bagi Filipina pasca-bencana Topan Haiyan.

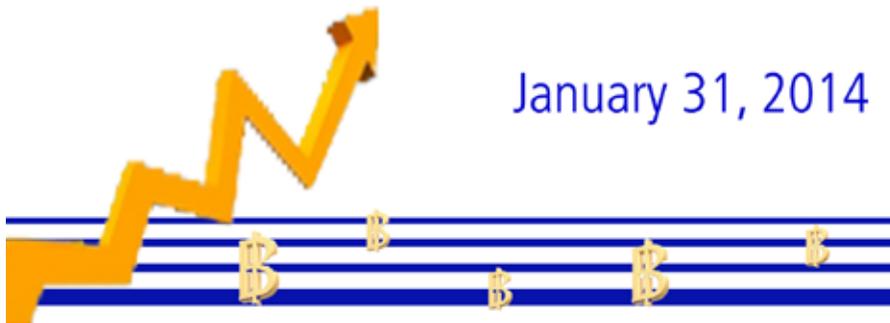
Selain itu, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN menaruh perhatian khusus pada visi Komunitas ASEAN pasca-2015, hubungan eksternal dan kerja sama kemitraan ASEAN, serta berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian dan memiliki dampak terhadap ASEAN. Indonesia mengusulkan prakarsa untuk membentuk suatu traktat yang lebih luas di kawasan. “Indonesia menaruh perhatian khusus atas perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Timur Laut (*North-East Asia*), serta mendorong percepatan pembahasan dan penyelesaian suatu *regional code of conduct* (COC) di Laut China Selatan”, tutur Menlu RI dalam pertemuan tersebut.

Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mendukung usulan Indonesia dalam membentuk suatu traktat bagi kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik. Traktat tersebut akan dikembangkan dengan merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan *Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* (*Bali Principles*). (Sumber: KBRI Yangon/Ditjen KSA)

Potensi Pasar Thailand

Thailand's Economic Outlook 2014

January 31, 2014



Thailand berada di tengah semenanjung Indochina di Asia Tenggara yang berbatasan di utara dengan Myanmar dan Laos, di sebelah timur dengan Laos dan Kamboja, di selatan dengan Teluk Thailand dan Malaysia, dan di barat dengan Laut Andaman dan ujung selatan dengan Myanmar. Thailand memiliki total lahan 513,120 km² dan beribukota Bangkok, yang juga sebagai pusat politik, perdagangan, industri dan budaya. Populasi Thailand yang lebih dari 67 juta, menduduki peringkat ke 20. Sekitar 75 persen dari populasinya adalah Thai; Cina (14 persen); Melayu (3 persen) dan etnis lainnya (8 persen). Mayoritas penduduk Thailand menganut agama Budha (94.6 persen); yang lainnya adalah Islam (4.6 persen); Kristen (0.7 persen) dan lain-lain (0.1 persen).

Thailand adalah negara dengan infrastruktur yang berkembang dengan baik, memiliki perekonomian bebas, pro-kebijakan investasi, dan industri ekspor yang kuat. Ekonomi Thailand telah melewati goncangan ekonomi internal dan eksternal dalam beberapa tahun terakhir. Krisis ekonomi global sangat mengurangi ekspor Thailand, dengan sebagian besar sektor mengalami penurunan dua digit. Pada tahun 2009, perekonomian mengalami kontraksi 2.3 persen. Namun, pada tahun 2010, perekonomian Thailand meningkat 7.8 persen, laju tercepat sejak 1995, karena ekspor yang meningkat tajam. Pada akhir 2011 pertumbuhan ekonomi menurun akibat bencana banjir di kawasan industri bagian utara Bangkok yang melumpuhkan sektor manufaktur. Industri pulih sejak kuartal kedua 2012 dan PDB meningkat 5.8 persen pada tahun 2012.

Hasil ekspor dan pariwisata merupakan andalan perekonomian Thailand. Pada 2012, total perdagangan luar negeri Thailand sebesar US\$ 477,11 miliar, meningkat 5,7 persen (yoy) dibandingkan tahun 2011. Mitra perdagangan terbesar Thailand pada 2012 adalah Jepang, RRT, Amerika Serikat, Malaysia dan Indonesia. Total

ekspor tumbuh 3,12 persen menjadi US\$ 229,52 miliar, dan total impor meningkat 8,22 persen menjadi US\$ 247,6 miliar pada tahun 2012.

Indonesia merupakan mitra dagang Thailand ke-5 terbesar. Grafik perdagangan Thailand-Indonesia pada 2012 sebesar US\$ 19,3 miliar, meningkat 10,56 persen (yoy) dibandingkan tahun 2011 dengan total ekspor adalah US\$ 11,31 miliar (+11,22 persen) dan impor sebesar US\$ 8,1 miliar (+9,64 persen), dengan defisit di pihak Indonesia sebesar US\$ 3,2 miliar. Pada periode Januari-Oktober 2013 total perdagangan Thailand-Indonesia mencapai US\$ 16.492,2, naik 1,99 persen (yoy) dengan total ekspor US\$ 9.381,5 ke Indonesia. Komoditi utama ekspor Thailand ke Indonesia antara lain produk pertanian seperti tapioka, produk agro-industri terutama didorong impor gula, makanan olahan dan minuman, serta produk manufaktur seperti mobil dan aksesoris, mesin dan peralatan listrik. Sementara itu, impor terbesar Thailand dari Indonesia adalah minyak mentah, batu bara, mesin, aksesoris kendaraan dan ikan beku.

Di sektor pariwisata, Thailand dikunjungi 22.303.065 wisatawan pada tahun 2012. Jumlah ini meningkat menjadi 24.137.568 wisatawan pada periode Januari-November 2013 dengan dominasi turis dari Tiongkok, Malaysia, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan India.

Peluang Pasar Nonmigas di Thailand

Dinamika dan pesatnya pertumbuhan pasar nonmigas Thailand menarik pelaku usaha asing untuk berbisnis dan berinvestasi di Thailand. Hasil produk Thailand dan Indonesia mempunyai kemiripan khususnya untuk produk kerajinan (*handicraft*) termasuk komoditi tenun dan songket.

Namun, Indonesia tetap mempunyai peluang untuk memenuhi pasar Thailand untuk produk yang tidak dibuat di negara itu (*complementary product*), antara lain:

makanan ringan (*confectioneries*), ikan segar/beku, udang segar/beku, lobster segar/beku, kopi luwak, tekstil, *glass blocks*, bubuk kertas dan kertas, plastik, karet, keramik, suku cadang mobil, kelapa, kacang-kacangan, makanan/minuman, serta obat dan suplemen.

Salah satu peluang ekspor nonmigas Indonesia ke Thailand yang terbesar adalah industri makanan halal. Hal ini mengingat jumlah umat muslim di Thailand mencapai 6 juta penduduk atau kedua terbesar di Thailand, terutama di bagian Selatan Thailand yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Thailand sendiri menargetkan peningkatan impor makanan halal minimal 10 persen per tahun antara 2010-2014. Impor itu mencakup produk sayuran, buah-buahan, perikanan, dan produk peternakan. Sementara itu, impor produk busana muslim termasuk asal Indonesia ke pasar Thailand diperkirakan sebesar 180 juta dolar AS dengan rata-rata pertumbuhan 8-8.5 persen per tahun.

Selain pemenuhan permintaan makanan halal, peluang bisnis dan investasi lainnya bagi Indonesia ialah aksesoris dan perlengkapan ibadah. Tercatat jumlah pengunjung muslim kian meningkat tiap tahunnya (447.820 pendatang Indonesia ke Thailand pada 2012). Mengingat terbatasnya ketersediaan rumah makan halal di Bangkok terutama di kawasan Pratunam yang dibanjiri oleh pendatang dari Indonesia dan turis muslim lainnya menjadikan investasi di bidang kuliner halal cukup potensial atau menjanjikan.

Thailand juga mendorong pengusaha di sektor jasa, pariwisata dan kesehatan serta hotel dan restoran untuk meningkatkan pelayanan beragam kebutuhan pengunjung muslim.

Daftar Pameran Potensial 2014 di Thailand

No.	NAMA PAMERAN	TANGGAL/TEMPAT	PENYELENGGARA
1.	<i>Bangkok Gems & Jewelry Fair 2014</i>	25 Februari – 1 Maret 2014 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand	<i>Thai Gem and Jewelry Traders Association</i>
2.	<i>Food Pack Asia 2014</i>	27 Februari – 2 Maret 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	TBP Publication Co., Ltd.
3.	<i>Thailand Coffee, Tea and Drink 2014</i> <i>Thailand Bakery & Ice Cream 2014</i> <i>Thai Franchise & SME Expo 2014</i> <i>Travel Thailand Travel World 2014</i> <i>Thailand Bike and Vehicle 2014</i>	6-9 Maret 2014 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand	Kavin Intertrade Co., Ltd.
4.	<i>International Exhibitions for Rubber, Latex & Tire Industries</i>	12-15 Maret 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	<i>Office of Digital Commerce and Trade Information Resources, Department of International Trade Promotion, DITP - MoC.</i>
5.	<i>Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair (BIFF&BIL) 2014</i>	12-16 Maret 2014 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand	<i>Office of Digital Commerce and Trade Information Resources, Department of International Trade Promotion (DITP) - Ministry of Commerce (MoC).</i>
6.	<i>Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair (BIG+BIH) 2014</i>	19-23 April 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	<i>Office of Fashion and Lifestyle Business Development, DITP - MoC dan Thai Lifestyle Products Association.</i>
7.	<i>Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA) 2014</i>	28 April-1 Mei 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	<i>Office of Export Promotion Activities, DITP – MoC.</i>
8.	<i>Horti Asia 2014</i>	8-10 Mei 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	VNU Exhibition Asia Pasific Co., Ltd.
9.	<i>THAI FEX World of Food Asia 2014</i>	21-25 Mei 2014 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand	Koelnmesse Pte Ltd, DITP - MoC, dan <i>Thai Chamber of Commerce.</i>
10.	<i>ProPak Asia 2014</i>	11-14 Juni 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	Bangkok Exhibition Services Ltd.

11.	<i>ASIAN Craft & Fashion 2014</i>	26-29 Juni 2014 IMPACT Ehibition & Convention Center, Bangkok, Thailand	PT. Debindo Multi Adhiswasti dan IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
12.	<i>Thailand Retail, Food & Hospitality Service (TRAFS) 2014</i> <i>Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO) 2014</i>	24-27 Juli 2014 BITEC, Bangkok, Thailand	Kavin Intertrade Co., Ltd.
13.	<i>Food & Hotel Thailand 2014</i>	10-13 September 2014 BITEC, Bangkok	Bangkok Exhibition Service Ltd.

Daftar Importir Thailand

NO.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PRODUK
1.	Gheco-One Co., Ltd.	Bahan bakar/batu bara
2.	Toyota Motor Thailand Co., Ltd.	<i>Auto parts, spare parts</i>
3.	Indorama Ventures Public Company Limited	Petrokimia
4.	Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.	Timah
5.	Siam Toyota Manufacturing Company Limited	<i>Auto parts</i>
6.	BLCP Power Limited	Bahan bakar/batu bara
7.	SCG Trading	Keramik dan produk keramik
8.	Cobelco & Material Coppertue Co., Ltd.	Tembaga
9.	Sumitomo Co., Ltd.	Kawat tembaga
10.	UMS Public Company Limited	Bahan bakar/ batu bara
11.	Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.	<i>Auto parts, spare parts</i>
12.	Denso Seal (Thailand) Co., Ltd.	<i>Auto parts</i>
13.	Toshiba Thailand Co., Ltd.	<i>Electronics</i>
14.	Muaeng Chiaeng Muan Co., Ltd. (Cabang Baan Pu)	Bahan bakar/batu bara
15.	Banpu International Co., Ltd.	Bahan bakar/batu bara
16.	Log Plus Mining Service Co., Ltd.	Bahan bakar/batu bara
17.	Boonma Moving & Storage Co., Ltd.	Logistik
18.	Pen Marketing Distribution Co., Ltd.	Mie instan Sedaap
19.	Dominion Chemmet Co., Ltd.	Mie instan Indomie
20.	Thai Nisshin Technomic Co., Ltd.	<i>Confectioneries</i>
21.	Piriyapul International Company Limited	<i>Confectioneries: Redondo</i>
22.	G. C Distribution Co., Ltd.	<i>Confectioneries: Chocolatos</i>
23.	Inbisco (Thailand) Co., Ltd.	<i>Confectioneries:</i> Beng beng, Kopiko, Choki-choki, Selai Olai
24.	Cadbury Adams (Thailand) Co., Ltd.	<i>Confectioneries: Oreo, Ahoy</i>
25.	Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.	<i>Confectioneries: Top, Stikko, Yam Yam, Tim Tam</i>
26.	Vara Food & Drink Co., Ltd.	<i>Coconut</i>
27.	Theppadungporn Co., Ltd.	<i>Coconut</i>
28.	Chefs's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.	<i>Coconut</i>
29.	Canaan Enterprise Co., Ltd.	<i>Cacao powder and other confectioneries materials</i>
30.	L'Oréal Thailand Co., Ltd.	<i>Cosmetics: Garnier, L'Oréal</i>
31.	Patkol Public Company Limited	<i>Spare parts</i>
32.	The Perifire products Co., Ltd.	<i>Iron, coal, wood chip, rock phosphate</i>
33.	Oystar (Thailand) Limited	<i>Packaging</i>
34.	AP Qglass Co., Ltd.	<i>Glass block</i>
35.	APP International Marketing (Thailand) Co., Ltd.	<i>Pulp and paper</i>

(Sumber : KBRI Bangkok)

Potensi Pasar

Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah salah satu negara produsen minyak bumi dan gas di Asia Tenggara. Jumlah penduduk Brunei Darussalam diperkirakan sebanyak 422.700 jiwa per tahun 2011 (*Brunei Darussalam Department of Economic Planning and Development*). Kedekatan lokasi geografisnya dengan Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengusaha Indonesia untuk meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara.

Perekonomian Brunei tergolong stabil sebagaimana tercatat dalam *Global Competitiveness Report 2013-2014* oleh *The World Economic Forum* (WEF) yang menempatkan Brunei pada peringkat ke-26 dari 148 negara (Indonesia menempati peringkat ke-38). Komoditi ekspor utama Brunei Darussalam adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan dan gas alam cair dengan negara tujuan ekspor utama, yaitu Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Australia.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas, sejak tahun 1990-an Pemerintah Brunei Darussalam telah melaksanakan program diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kebijakan tersebut antara lain berupa proyek pembangunan *Sungai Liang Industrial Park*, *Pulau Muara Besar Transshipment Hub*, pengembangan *eco-tourism*, pengembangan pusat keuangan Islam, *Brunei Halal Brand*, pengembangan iklim investasi yang kondusif serta pengembangan SDM.

Sesuai dengan visi pembangunan (Wawasan Brunei 2035), secara bertahap Brunei akan mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari sektor migas. Melalui program diversifikasi ekonomi, pada tahun 2035 ekonomi Brunei akan bertransformasi dari ne-

gara yang menggantungkan pada ekspor hasil migas (*resource-related wealth*) menuju negara dengan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*). Sementara itu, Brunei juga sedang berupaya untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan di kawasan. Visi ekonomi jangka panjang Brunei juga mencakup upaya untuk mempromosikan industri-industri alternatif, seperti teknologi, makanan halal dan manufaktur, selain peningkatan dukungan untuk riset teknologi inovatif di bidang energi yang terbarukan.

Berdasarkan data Jabatan Perencanaan Kemajuan Ekonomi (JPKE) bulan Januari 2013, kontribusi sektor nonmigas pada kuartal terakhir tahun 2012 meningkat 3,7%. Penerimaan hasil ekspor migas turun 4,1%, sementara sektor nonmigas meningkat 8,5%. Naiknya penerimaan sektor nonmigas tersebut disumbangkan oleh penerimaan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,8%, diikuti oleh sektor konstruksi dan manufaktur masing-masing sebesar 2,1% dan 2%. Peningkatan kontribusi sektor nonmigas mengindikasikan upaya percepatan diversifikasi ekonomi Brunei mulai menuju hasilnya. Upaya diversifikasi ekonomi tersebut tidak lepas dari peran Brunei untuk menjadi pendorong terlaksananya kerja sama di kawasan sebagai ketua ASEAN tahun 2013 dan negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Brunei Darussalam memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan tidak memiliki utang luar negeri. Brunei umumnya menanam investasi pada sektor properti, *portfolio investment*, *venture capital* dan *high technology* serta sektor-sektor lain seperti peternakan, pertanian, perkebunan dan infrastruktur. Untuk mengatur investasi luar negeri, Pemerintah Brunei Darussalam telah membentuk *Brunei Investment Board* (BIB). Berbagai investasinya di luar ne-

geri merupakan salah satu upaya Pemerintah Brunei Darussalam dalam menjamin kesejahteraan ekonomi rakyatnya dan negara, dengan tetap menghindari perilaku dan sikap berhutang, serta melaksanakan penghematan biaya dalam pengeluaran negara.

Dalam isu ketahanan pangan, khususnya diversifikasi pangan, Brunei menargetkan swasembada beras pada tahun 2030. Hal ini merupakan perhatian pemerintah Brunei Darussalam dan oleh karenanya dapat dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Negara lain di Asia yang telah memanfaatkan kebijakan ini adalah Filipina dan Tiongkok. Filipina dan Brunei telah menandatangani MoU kerja sama pertanian pada 27 April 2009, sedangkan Tiongkok dan Brunei menandatangani MoU serupa pada tanggal 4 Mei 2009 dilanjutkan dengan kerja sama penanaman padi pada area seluas 77 hektar di Kuala Belait. Indonesia telah menandatangani MoU Kerja Sama Pertanian dengan Brunei pada tanggal 24 Februari 2011 di Bandar Seri Darussalam.

Produk-produk Indonesia cukup dikenal oleh masyarakat Brunei. Survei produk yang dilakukan oleh KBRI Bandar Seri Begawan pada akhir tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan jenis produk Indonesia yang dipasarkan di Brunei. Pada tahun 2010 terdapat 1261 jenis produk Indonesia, meningkat menjadi 3497 pada tahun 2012 dan 3836 pada tahun 2013. Produk-produk yang beredar tersebut terdiri dari produk makanan, minuman, obat-obatan dan jamu, alat kebersihan dan tekstil serta alat elektronik. Masyarakat Brunei menilai kualitas produk Indonesia lebih baik dibandingkan dengan produk Tiongkok. Masuknya produk-produk Indonesia diharapkan dapat mengurangi defisit perdagangan Indonesia dengan Brunei khususnya di bidang nonmigas. (Sumber: KBRI Bandar Seri Begawan).

POTENSI PASAR VIETNAM

Vietnam memiliki populasi yang padat yang mencapai sekitar 88.78 juta penduduk, dengan 51,69 juta pekerja. Berdasarkan pekerjaan, Vietnam adalah negara agraris, dimana sekitar 60% dari tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Vietnam adalah eksportir terbesar dari sejumlah komoditas seperti kopi, beras, lada dan jambu mete.



Pada tahun 1986, Vietnam melakukan pembaharuan ekonomi atau Doi Moi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia internasional yang semakin mengarah ke demokrasi, perdagangan bebas dan ekonomi pasar. Sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi, kepemilikan swasta digenjut dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Alhasil, Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8% dari tahun 1990 hingga 1997 dan berlanjut sekitar 7% dari tahun 2000 hingga 2005. Pertumbuhan itu membuat Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia setelah RRT. Pada saat bersamaan, investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan domestik tumbuh empat kali lipat. PDB per kapita meningkat terus selama bertahun-tahun dari USD 140 pada tahun 1992 hingga hampir USD 1.600 pada tahun 2012. Setelah perkembangan selama 20 tahun, PDB per kapita meningkat 11,43 kali lipat.

Saat ini Vietnam berada dalam transisi untuk menjadi ekonomi industri

dan modern dengan prioritas utama menstabilkan ekonomi, membentuk infrastruktur kelas dunia, menciptakan tenaga kerja terampil, dan memperkuat lembaga berbasis pasar. Dalam Strategi Perkembangan Sosio-Ekonomi (SEDS) untuk tahun 2011-2020, Vietnam berusaha mencapai tingkat pendapatan per kapita sebesar USD 3.000 pada tahun 2020. Ini berarti pertumbuhan tahunan hampir 10% dalam pendapatan per kapita selama dekade berikutnya.

Sektor-sektor utama yang berkontribusi untuk ekonomi pada tahun 2012 ialah pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan jasa serta konstruksi dan industri. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi beberapa sektor menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mengalami penurunan signifikan dari 4,01% pada tahun 2011 menjadi 2,72% pada tahun 2012, yang artinya hanya berkontribusi 0,44% ke rasio pertumbuhan total. Sementara itu sektor konstruksi dan industri dan sektor jasa menyumbangkan 1,89% dan 2,7% ke PDB keseluruhan.

Vietnam memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok tanam permanen. Selain beras, ekspor Vietnam yang signifikan adalah kopi, teh, karet dan produk-produk perikanan. Tetapi, peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi telah berkurang, akibat dari meningkatnya produksi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kemajuan Vietnam luar biasa. Geliat pembangunannya sangat tinggi, prospeknya juga sangat bagus. Manufaktur, teknologi informasi dan industri teknologi canggih membentuk bagian besar dan tumbuh dengan cepat daripada ekonomi nasional. Vietnam secara relatif adalah pemain baru dalam bisnis perminyakan, namun telah menjadi produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai produksi 400.000 barel per hari. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka; neraca perdagangan mencapai sekitar 160% GDP, lebih dari dua kali rasio yang dimiliki RRT dan lebih dari empat kali rasio India.

Perdagangan

Pada tahun 2012, nilai total ekspor mencapai USD 114,6 miliar, meningkat 18,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor utama Vietnam adalah karet, kopi, tekstil, kain, produk hasil laut, minyak mentah dan layanan umum; serta impor utamanya adalah mesin industri, peralatan dan suku cadang, minyak olahan/BBM. Sistem “zona pengolahan ekspor” EPZs Vietnam telah memfasilitasi ekspor. Pemerintah telah mengambil langkah signifikan untuk memperpendek prosedur cukai dan mengurangi birokrasi sebagai bagian dari usaha jangka panjang untuk memenuhi standar internasional.

Terkait dengan impor, nilai total pada tahun 2012 adalah sebesar USD 114,3 miliar, peningkatan 7.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2012 juga terjadi surplus perdagangan Vietnam pertama sejak tahun 1993, dengan nilai USD 284 juta. Surplus dagang membantu menciptakan keseimbangan perdagangan yang sehat, berkon-

tribusi pada pertumbuhan PDB, menstabilkan nilai tukar Dong/Dollar dan cadangan mata uang asing. Namun, patut dicatat bahwa pertumbuhan ekspor kebanyakan berasal dari perusahaan investasi asing, sementara nilai impor perusahaan domestik mencapai sebesar USD 11,7 miliar.

Sementara itu, total nilai perdagangan antara Indonesia – Vietnam pada tahun 2012 mencapai USD 4,605 miliar, dimana nilai ekspor Indonesia ke Vietnam tercatat USD 2,247 miliar dan nilai impor USD 2,357 miliar, Indonesia mengalami defisit USD 110, 183 juta. Sejak Januari – September 2013, volume perdagangan kedua negara telah mencapai USD 3,379 miliar, nilai ekspor Indonesia ke Vietnam tercatat USD 1,639 miliar dan impor USD 1,740 miliar, dimana Indonesia mengalami defisit USD 101,585 juta. Ditargetkan volume perdagangan kedua negara akan mencapai sebesar USD 10 miliar pada tahun 2018.

Komoditi ekspor-impor utama Indonesia dengan Vietnam dari Januari – September 2013

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Vietnam:

NO.	KOMODITI	NILAI ESKPOR (USD)
1	Paper all kinds	179,47 juta
2	Machines, tools, other parts	103,29 juta
3	Chemical	101,44 juta
4	Products from other ordinary metals	78,44 juta
5	Computers, electronics and spare parts	76,88 juta
6	Plastic Materials	73,04 juta
7	Vegetable oil and animal fats	63,45 juta
8	Animal foods and materials	61,71 juta
9	Car spare parts	59,80 juta
10	Ordinary metal	50,75 juta
11	Motorbike spare parts	49,91 juta
12	Fibre all kinds	46,92 juta
13	Chemical products	40,42 juta
14	Materials for textile, garment, leather and footwear	36,65 juta
15	Fabrics	34,68 juta
16	Confectionery and cereal product	33,89 juta
17	Plastic Products	32,61 juta
18	Liquified gas	24,83 juta
19	Appliances and spare parts	17,59 juta
20	Seafood	16,02 juta

Komoditi impor utama Indonesia dari Vietnam:

NO.	KOMODITI	NILAI ESKPOR (USD)
1	Mobile phone and parts	434,91 juta
2	Steel all kinds	233,08 juta
3	Materials for textile, garment, footwear, leather	75,51 juta
4	Transportation and spare parts	72,77 juta

5	Rice	66,02 juta
6	Textile and garment products	65,36 juta
7	Cotton	61,90 juta
8	Plastic materials	61,30 juta
9	Machines, tools, other parts	59,71 juta
10	Computers, electronic appliances and parts	56,98 juta
11	Plastic products	52,42 juta
12	Chemical products	49,76 juta
13	Petroleum	29,14 juta
14	Coffee	23,16 juta
15	Steel products	16,72 juta
16	Vegetable and fruits	16,53 juta
17	Electric wires and cables	15,70 juta
18	Footwear	15,33 juta
19	Rubber	14,04 juta
20	Paper and paper products	13,12 juta

Kebutuhan Impor Vietnam dari Indonesia

Kertas

Vietnam merupakan pasar utama ekspor produk kertas Indonesia diantaranya kertas photo copy, kertas tisu, *facial tisu*, tisu makan. Pada tahun 2012, Vietnam mengimpor berbagai jenis kertas dari Indonesia senilai USD 232,78 juta, dan pada sembilan bulan pertama tahun 2013 mencapai USD 179,47 juta.

Mesin-mesin Industri dan Komponen

Nilai impor mesin-mesin industri dan komponen terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 senilai USD 16,03 miliar, dan dalam sembilan bulan pertama tahun 2013 telah mencapai USD 13,21 miliar.

Bahan Kimia

Industri petrokimia di Vietnam masih sedang gencargencarnya menarik minat investor asing. Dalam kurun waktu 2010-2020, pemerintah Vietnam berencana akan membangun sembilan kawasan industri khususnya di bidang industri petrokimia. Dibutuhkan modal investasi yang sangat besar tentunya.

Berdasarkan 13 komoditi utama industri kimia dasar tersebut dapat di persentasekan ke dalam beberapa item produk yaitu: *Fertilizers* (46,6%); *inner tubes* dan *tires* (17%); *basic chemical* (3,9%); *detergents* (18%), *batteries* dan *dry cells* (7,6%); *pesticides* (2,5%); *others* (4,4%).

Pupuk

Menurut sumber Kementerian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, setiap tahun Vietnam membutuhkan 8 juta ton berbagai jenis pupuk untuk mendukung sektor pertaniannya. Meskipun Vietnam telah mampu memproduksi pupuk



wikimedia.org

jenis Phosphate, Urea, dan NPK (Nitrogen, phosphorus, potassium), namun setiap tahun Vietnam masih mengimpor pupuk untuk mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri.

Pada tahun 2012 Vietnam telah mengimpor 2,6 juta ton pupuk (senilai USD 1,7 miliar) terutama untuk jenis pupuk potassium ammonium phosphate (DAP), nitrogen, phosphorus dan potassium/kali (NPK), dan Phosphate.

Produk Farmasi

Pasar farmasi Vietnam merupakan pasar yang potensial bagi produsen obat-obatan dunia karena peningkatan yang signifikan dalam permintaan domestik setiap tahunnya. Laporan Kementerian Kesehatan Vietnam menyebutkan bahwa setiap orang Vietnam menghabiskan biaya USD 19,8 pada obat-obatan selama tahun 2010, angka tersebut akan meningkat hingga USD 33,8 pada tahun 2014. Tingkat pertumbuhan pasar farmasi di dalam negeri diperkirakan rata-rata 17-19% per tahun. Potensi pasar sangat dipengaruhi oleh impor se-



lama tahun 2011 yang mencapai USD 1,4 miliar, tahun 2012 sebesar USD 1,79 miliar.

Sejak awal tahun 2013, impor produk farmasi mengalami peningkatan. India, Perancis, dan Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar industri farmasi Vietnam. Nilai impor produk farmasi diperkirakan meningkat setelah Kemenperindag Vietnam mengumumkan bahwa pajak impor akan dipotong dari 5% menjadi 2,5% tahun lalu.

Batubara (Steam Coal)

Pada tiga tahun kedepan, Vietnam memerlukan investor asing dalam bidang pertambangan batubara, dan membutuhkan impor batubara (*steam coal*) demi keperluan konsumsi dalam negeri. Investor asing merupakan salah satu solusi mengingat saat ini Vietnam tidak dapat memenuhi kebutuhan PLTU di negaranya yang demikian tinggi akan *steam coal*. Saat ini sembilan *power plant* batubara sedang dibangun di Vietnam dan dua puluh empat *Thermal Plan* direncanakan akan beroperasi pada tahun 2015, dimana dibutuhkan investor asing untuk kelanjutan pengembangannya.

Produk *steam coal* di Vietnam mencapai 40 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk tahun 2015 mencapai 61,4 juta ton dan tahun 2025 mencapai 76,9 juta ton. Diperkirakan kebutuhan akan *steam coal* akan meningkat 17-20% per tahun. Skema impor *steam coal* untuk pemasok bahan bakar utama PLTU di Vietnam sebagai berikut:

Jenis batubara	Steam coal (supply for thermal power plants and cement industry)
Penjajagan impor steam coal	Australia, Indonesia, dan Rusia
Kapasitas impor steam coal	Tahun 2015: 15 juta ton Tahun 2025:40 juta ton
Produksi steam coal Vietnam	40-60 juta ton per tahun

Investasi Indonesia di Vietnam hingga tanggal 20 November 2013 menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US\$ 320,52 juta, dari angka tersebut telah terealisasi US\$ 144,07 juta.

Kayu

Data *General Statistics Office of Vietnam* (GSO) menyebutkan bahwa hanya 77% dari 13,4 juta ha luas hutan Vietnam merupakan hutan alami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sektor kerajinan kayu harus mengimpor 80% bahan kayu atau sebesar 60% dari biaya produksi (GSO menyebutkan nilai impor bahan kayu sekitar US\$ 1 miliar per tahun). Persediaan bahan kayu untuk produk kerajinan semakin sulit karena pasokan kayu asal negara tetangga seperti Laos dan Kamboja semakin menipis, sedangkan kayu asal Malaysia harganya cenderung lebih mahal.

Untuk mencukupi kebutuhan kayu dalam negeri, Vietnam mengimpor sekitar 4 juta m³ kayu (*round wood*) per tahun. Diperkirakan, pada tahun 2013 kebutuhan kayu untuk sektor kerajinan akan mencapai lebih dari 12 juta m³ kayu, termasuk 5\6 juta m³ kayu berdiameter kecil untuk keperluan *wood chips*, *paper* dan *plank*, dan 6 juta m³ kayu untuk sektor kerajinan dan bahan konstruksi. Sementara itu pada tahun 2020 kebutuhan kayu berdiameter kecil akan mencapai 10 juta m³ dan berdiameter besar mencapai sekitar 12 juta m³.

Investasi Indonesia di Vietnam hingga tanggal 20 November 2013 menduduki urutan ke-26 pada daftar negara investor di Vietnam dengan 38 proyek senilai US\$ 320,52 juta, dari angka tersebut telah terealisasi US\$ 144,07 juta. Namun diperkirakan terdapat lebih dari US\$ 2 miliar investasi Indonesia yang *listing*-nya dari negara ketiga. Investasi Indonesia tersebut meliputi *processing industry; accomodation, food dan beverage service; health dan social support; mine ores; trasportation; wholesale, retail, repair; agro, agriculture, aquatic; arts dan entertainment; construction; administration dan supportive services; information dan telecommunication; dan cement*.
Sumber : KBRI Hanoi



bloomberg.com

POTENSI PERDAGANGAN LAOS

bp.blogspot.com



Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada tanggal 2 Desember 1975 dan merupakan negara dengan sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos (PRRL) dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos.

Sistem pemerintahan Laos adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh *National Assembly* (NA) untuk masa bakti 5 tahun, sedangkan Perdana Menteri dan anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan Majelis tipe Uni-Kameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Pemilihan umum tahun 2011 telah memilih 132 anggota NA periode 2011-2015.

Pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Y.M. Choummaly SAYASONE sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan yang disahkan pada sidang ke-7 *National Assembly* dan telah mulai melaksanakan tugasnya pada Juli 2011.

Melalui kebijakan *New Economic Mechanism* (NEM) tahun 1986, Laos mulai membuka diri dan berinteraksi dengan masyarakat internasional dengan melakukan berbagai pembenahan. Kebijakan tersebut secara nyata berhasil menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhannya. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, pemerintah Laos menargetkan keluar dari status *least developed countries/LDC* (nega-

ra terbelakang) pada tahun 2020.

Untuk lebih meningkatkan posturnya di kawasan, Pemerintah Laos mencanangkan visinya menjadi *Land-linked Country* dan *Battery of ASEAN* dengan memanfaatkan peran vitalnya sebagai hub bagi pertumbuhan ekonomi di *mainland ASEAN*. Selain anggota ASEAN, Laos menjadi anggota pada sejumlah organisasi internasional seperti PBB dan badan-badan khususnya, GNB, G-77, *Great Mekong Sub Region* (GMS), ASEM dan pada awal 2013 telah diterima menjadi anggota WTO.

Di bidang ekonomi, dalam tiga tahun terakhir perekonomian Laos tumbuh rata-rata 8.1% dan income per capita US\$. 1349 (2012). Nilai perdagangan Laos tahun 2012 mencapai US\$. 11.1 miliar yang terdiri dari ekspor US\$ 4.6 miliar dan impor US\$ 6.56 miliar. Komoditi ekspor utama Laos adalah pertambangan, produk pertanian, kayu dan produk kayu, pakaian jadi dengan tujuan utama Thailand, RRT, dan Vietnam. Sedangkan impor umumnya dari Thailand, RRT, Vietnam, dan Jepang berupa bahan bakar, makanan, barang konsumsi, mesin, kendaraan dan suku cadang. Perdagangan dengan negara-negara ASEAN umumnya didominasi Thailand dan Vietnam.

Dalam *National Social-Economic Development Plan* (NSEDPP) ke-7 periode 2011-2015, Pemerintah Laos menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8%. Untuk mewujudkan

kan hal tersebut dibutuhkan dana sebesar US\$ 15.81 miliar yang sumbernya didapatkan dari 12% anggaran pemerintah, 26% *Official Development Assistance* (ODA) dan 56% investasi asing (FDI).

Laos mempunyai potensi besar di bidang energi (*hydropower*), pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut adalah kurangnya dana dan minimnya infrastruktur, rendahnya kualitas SDM dan lambatnya birokrasi pemerintah.

Wilayah Laos, khususnya di bagian selatan di sepanjang sungai Mekong sangat potensial untuk dikembangkan di bidang pertanian, terutama tanaman padi, kopi dan karet. Sementara wilayah bagian utara umumnya adalah daerah pegunungan dan mempunyai potensi kayu dan kerajinan. Di sejumlah daerah seperti Xiengkhouang dan Savannakhet potensi tersebut sulit dimanfaatkan karena masih banyak terdapat *unexploded ordnance/UXO* (amunisi yang belum meledak) yang merupakan residu konflik Indochina. Pada *High Level Round Table Meeting* bulan Oktober 2010, pembersihan UXO telah diterima PBB sebagai MDG ke-9 Laos.

Demi kelangsungan keamanan energi di kawasan, Laos berkomitmen membangun pembangkit-pembangkit listrik baru dan perluasan kerja sama sektor energi sebagai fondasi terbentuknya sub regional *power dan energy market*. Diperkirakan potensi *hydropower* Laos mencapai 28.000 MW.

Pemerintah Laos juga menggalakan pembangunan *Special Economic Zone* (SEZ) di sejumlah Propinsi seperti Vientiane, Savannakhet, dan Khmmouane. Selain itu, untuk bisa lebih terintegrasi dengan sistem perdagangan dan moneter internasional, pada tanggal 11 Januari 2011 *Lao Securities Exchange* (LSX) resmi beroperasi.

Pada awal tahun 2013, pemerintah Laos mulai membangun proyek kereta api cepat yang menghubungkan Laos dan Vietnam senilai US\$ 5 Miliar dengan pembiayaan yang didapat dari Malaysia. Sementara rencana pembangunan proyek kereta api cepat Vientiane – Luang Prabang senilai US\$ 7 miliar diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat. Proyek ini dinilai penting dalam upaya memajukan perekonomian Laos dan mewujudkan visinya sebagai *land-link country* di sub kawasan.

Dalam upaya meningkatkan hubungan dengan negara lain, Pemerintahan Laos terus memperluas jaringan penerbangan Lao Air. Dalam kaitan ini pada tanggal 29 November 2012 di Bali telah ditandatangani *Memorandum of Understanding on the Implementation of the Bilateral Air Transport Agreement* yang memuat kesepakatan mengenai rencana pengaturan jalur penerbangan langsung Laos – Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam waktu dekat.

Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Laos tercatat 4.256 orang atau naik sekitar 28% dari tahun 2011 sebanyak 3.338 orang. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Laos termasuk kecil dan hanya berada di atas Myanmar (1.730 orang) dan Brunei

Potensi pasar Laos masih terbuka luas untuk produk Indonesia mengingat banyaknya orang kaya baru di Laos. Barang-barang Indonesia yang berpotensi masuk ke pasar Laos adalah produk makanan dan minuman, mobil dan suku cadang, obat-obatan, dan mesin-mesin pertanian.

Darussalam (533 orang).

Hubungan diplomatik Indonesia dan Laos telah terjalin sejak tanggal 30 Agustus 1957 dan sejauh ini tidak ada isu bilateral yang mengganjal hubungan kedua negara. Laos secara resmi bergabung dalam ASEAN pada 23 Juli 1997 dan sejak itu turut berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama ASEAN.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Laos belum begitu berkembang. Sejauh ini belum ada investasi Indonesia dan Laos dan sebaliknya. Namun, telah terdapat pengusaha RI yang berniat akan berinvestasi di Laos antara lain di bidang pertanian (gula) dan pertambangan.

Impor Laos dari Indonesia adalah pupuk, kendaraan dan suku cadang, barang modal, alat-alat mesin, obat-obatan dan elektronik. Ekspor ke Indonesia berupa produk pertanian, *herbal medicine* dan kerajinan. Perdagangan RI – Laos umumnya dilakukan melalui negara ketiga yaitu Thailand dan Vietnam.

Terdapat sejumlah faktor pendukung pengembangan hubungan dan kerja sama RI-Laos, yaitu solidnya hubungan di bidang politik yang merupakan landasan bagi pengembangan hubungan di semua bidang, khususnya ekonomi. Potensi pasar Laos masih terbuka luas untuk produk Indonesia mengingat banyaknya orang kaya baru di Laos. Barang-barang Indonesia yang berpotensi masuk ke pasar Laos adalah produk makanan dan minuman, mobil dan suku cadang, obat-obatan, dan mesin-mesin pertanian. Ekspor Indonesia ke Laos periode 2007-2011 tumbuh rata-rata 22,19 persen per tahun, sementara impor minus 5,53 persen per tahun.

Di sektor investasi, peluang terbuka bagi pengusaha Indonesia terutama di sektor pertambangan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan PLTA. Sementara itu, peluang juga terbuka lebar bagi TKI terlatih kita untuk bekerja di Laos.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan hubungan perdagangan RI – Laos antara lain yaitu kondisi geografis Laos yang tidak berpantai (*landlocked*), barang-barang produksi Indonesia yang sulit bersaing di pasaran Laos karena juga diproduksi oleh negara tetangga Laos, dan belum adanya penerbangan langsung Indonesia-Laos. Jumlah penduduk Laos yang relatif kecil dengan daya beli yang rendah serta kurangnya informasi mengenai potensi dan peluang kerja sama ekonomi yang dapat dikembangkan juga menjadi kendala dalam meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.

Sektor Tenaga Kerja di Filipina dan Potensi Bagi Tenaga Kerja Indonesia



Dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015, salah satu sektor andalan Filipina adalah tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Filipina telah melaksanakan sejumlah program dalam meningkatkan daya saing tenaganya. Di bidang pendidikan, terhitung mulai tahun 2012 Filipina secara bertahap mulai menerapkan sistem pendidikan K+12 (*Kindergarten* ditambah 12 tahun tingkat sekolah dasar dan menengah). Ini merupakan perubahan dari sistem sebelumnya yang menerapkan pendidikan dasar dan menengah selama 10 tahun. Perubahan ini dilakukan

antara lain sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan, sekaligus menyesuaikan dengan sistem pendidikan di negara-negara lain.

Sementara itu, *Technical Education and Skills Development Authority* (TESDA) terus memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Filipina, khususnya mereka yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Pada periode Januari–November 2013, TESDA telah mengeluarkan sertifikat pelatihan untuk 652.084 tenaga kerja.

Sedangkan *Philippine Chamber of Commerce and Industry* (PCCI) secara

berkala mengadakan Forum Pendidikan untuk membahas penyelarasan kualitas lulusan hasil institusi pendidikan di Filipina dengan kebutuhan dunia kerja. Pada bulan Oktober 2013 lalu, PCCI menjadikan tema persiapan menghadapi KEA 2015 ini sebagai fokus forum diskusi mereka bersama dengan sejumlah universitas ternama di Filipina.

Berdasarkan data statistik *Bureau of Labor and Employment Statistics* (BLES) Filipina pada bulan Oktober 2013, jumlah tenaga kerja Filipina tercatat sebanyak 40,335 juta orang, dengan jumlah yang terserap lapangan kerja sebanyak 37,733 juta orang. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,5% atau 2,6 juta orang, lebih baik dari catatan kuartal kedua yang mencapai 7,3% atau 3 juta orang. Dari jumlah 2,6 juta tersebut, 47,5% di antaranya berusia antara 15-24 tahun dan sebanyak 31,9% berusia antara 25-34 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, sekitar 21,4% pengangguran tersebut merupakan *college graduate*, sebanyak 13% *college undergraduate*, dan 33,5% lulusan SMA.

Berdasarkan sektornya, sektor jasa menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 53,4% atau 20,14 juta, naik 1,6% (318 ribu orang) dari tahun lalu. Sedangkan sektor industri menyerap 15,2% atau 5,75 juta, naik 1% (sekitar 58 ribu tenaga kerja). Sebaliknya sektor pertanian (yang termasuk perikanan, kehutanan dan peternakan) justru menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,6 juta atau berkurang sekitar 313 ribu orang, sehingga total tenaga kerja di sektor pertanian adalah 11,84 juta orang.

Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi berlaku di *National Capital Region* (NCR) Metro Manila, yaitu sebesar Php. 429 (Rp. 115.830) per hari. Sedangkan yang terendah berlaku di *Autonomous Region of Moslem Min-*

danao (ARMM) sebesar Php. 232 (Rp. 62.640) per hari. Dilihat dari sektornya, berdasarkan survei tahun 2012, pekerja sektor jasa utilitas menerima rata-rata gaji pokok tertinggi, yaitu Php. 19.782 per bulan, diikuti oleh pekerja sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata gaji pokok Php. 18.4480. Sedangkan pekerja sektor pertanian menerima upah terendah. Untuk tingkatan manajer, gaji tertinggi diterima oleh manajer di sektor minyak dan gas dengan gaji rata-rata per bulan Php. 74.297, diikuti oleh manajer sektor jasa utilitas dengan gaji Php. 74.067 dan manajer sektor industri dengan gaji Php. 69.063.

Setiap tahunnya, jumlah lulusan perguruan tinggi di Filipina yang memasuki pasar kerja diperkirakan rata-rata 500ribu orang. Sementara jumlah pekerjaan yang tersedia tidak memadai. Saat ini sektor yang menunjukkan peningkatan pesat adalah sektor *Business Process Outsourcing* (BPO), tetapi jumlah tenaga kerja yang diserap sektor BPO sampai saat ini baru sekitar 1,7% dari total tenaga kerja di Filipina. Sektor lainnya yang diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja adalah sektor pariwisata, tetapi jumlah kunjungan wisatawan ke Filipina masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kedua sektor jasa tersebut umumnya mengandalkan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Sedangkan untuk menyerap lulusan SMA, para analisis ekonomi menyarankan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan sektor manufaktur. Kendalanya adalah biaya utilitas, khususnya listrik yang tinggi, menyebabkan Filipina bukan merupakan tujuan yang menarik bagi investor bidang manufaktur. Berbagai permasalahan ini menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi di Filipina dan sebagian memilih mencari kerja di luar negeri.

Berdasarkan data tahun 2012 dari *Commission on Filipino Overseas* (CFO) diperkirakan 10,49 juta atau sekitar 10% penduduk Filipina bekerja di luar negeri, atau bisa disebut *Overseas Filipino Workers* (OFW). Sebanyak 47% di antaranya sudah berstatus permanen, atau tidak memerlukan



kan kontrak kerja sementara. Remitansi yang diperoleh Filipina dari OFW pada tahun 2013, sampai dengan bulan November, mencapai USD 20,605 milyar.

Peluang bagi Tenaga Kerja Asing

Pada bulan Januari 2014, Menteri Tenaga Kerja Filipina, Rosalinda Baldoz mengumumkan bahwa Filipina berencana membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing terampil untuk 15 jenis pekerjaan, yaitu: arsitek, insinyur kimia, analis kimia, perencana lingkungan, ahli teknologi perikanan, geolog, pustakawan (berlisensi), ahli *Computer Numerical Control* (CNC), *sanitary engineer*, teknisi assembling, ahli teknologi kesehatan, *guidance counselor*, *test technician* (*servo-actuator/valve*), pilot dan mekanik pesawat terbang. Untuk 15 jenis pekerjaan tersebut, Departemen Tenaga Kerja Filipina merencanakan mempermudah pengurusan ijin tenaga kerja asing, antara lain dengan membebaskan dari biaya ijin tertentu.

Meskipun Filipina memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, tetapi masih mengalami kekurangan tenaga kerja terampil di bidang tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain Kurangnya minat pelajar/mahasiswa untuk memilih jurusan-jurusan tertentu. Saat ini jurusan yang paling populer adalah bisnis manajemen, kedokteran, keperawatan, Teknologi Informasi, pendidikan, teknik, ilmu sosial dan pertanian. Sebagian tenaga terampil yang keahliannya dibutuhkan di Filipina memilih untuk bekerja di luar negeri dengan alasan standar gaji di Filipina jauh lebih rendah dibandingkan tawaran untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju. Pembatasan syarat usia dan pengalaman kerja menyebabkan banyak tenaga terdidik kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Warga negara asing yang hendak bekerja di Filipina diharuskan memiliki *Working Visa* (9G Visa) yang dikeluarkan oleh Biro Imigrasi Filipina dan mengurus *Alien Employment Permit* (AEP) dari *Professional Regulatory Commission* (PRC) dan Depnaker Filipina. WNA yang bekerja di Filipina pada akhir tahun 2013 lalu mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan tenaga kerja asing yang belum memperoleh Visa Kerja atau masih dalam proses pengurusan Visa Kerja untuk mengurus *Provisional Working Permit* (PWP).

(Sumber : KBRI Manila)

Optimisme Perekonomian Indonesia Menduduki Ranking Tertinggi Dibanding Negara ASEAN Lainnya

Kondisi bisnis di Indonesia mendapat ranking 10 besar paling optimistis dibandingkan dengan latar belakang ketidakpastian dalam perekonomian negara ASEAN lainnya.

Riset terbaru *International Business Report* (IBR) dari Grant Thornton mengungkapkan bahwa optimisme terhadap perekonomian di Indonesia menduduki ranking yang tinggi dibandingkan dengan perekonomian pada negara global dan ASEAN lainnya.

Proporsi bisnis di Indonesia optimistis untuk 12 bulan yang akan datang dan meningkat menjadi 56% di kuartal ketiga. Optimisme di Indonesia sekarang ini menduduki peringkat ke-10 secara global, dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata ASEAN (+39%) dan rata-rata global (+32%). Di ASEAN, Indonesia berada di tempat ketiga, setelah Filipina (+96%) dan Vietnam (+64%).

Sekitar 56% bisnis di Indonesia memperkirakan harga barang-barang akan naik dalam 12 bulan ke depan, dan akan menjadikan Indonesia sebagai satu dari lima besar negara ekonomi yang paling optimistis dalam kategori ini. Angka ini juga jauh lebih tinggi di atas rata-rata ASEAN (+32%) dan global (+26%).

Secara kontras, kepercayaan untuk sektor ekspor pada 12 bulan ke depan adalah sebesar +4%, menduduki peringkat 41 diantara 45 negara ekonomi yang dikaji dalam IBR. Sementara rata-

rata di ASEAN sebesar +10% dan global +16%.

Hasil kajian IBR menunjukkan bahwa komunitas bisnis Indonesia lebih optimistis dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju secara ekonomi di ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Hal ini memperlihatkan bahwa masih ada peluang bagi perluasan ekonomi walaupun kemungkinan akan menyebabkan kenaikan biaya hidup dan tingkat inflasi.

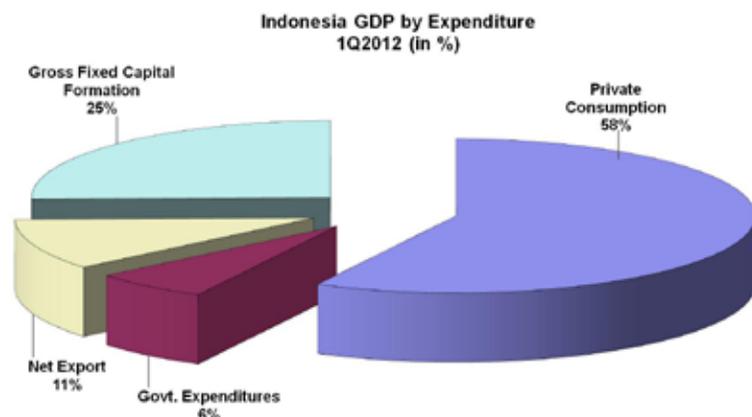
Sementara di sektor ekspor, tingkat kepercayaan ekspor masih rendah karena adanya defisit perdagangan saat ini. Pemerintah Indonesia sedang merencanakan untuk melonggarkan undang-undang ekspor untuk sektor-sektor tertentu guna mendorong peningkatan perdagangan.

Salah satu hambatan di dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masalah infrastruktur. Sekitar +26% bisnis di Indonesia mengharapkan peningkatan investasi dalam bentuk bangunan-bangunan baru, nomor dua setelah Filipina, dan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ASEAN (23%) dan rata-rata global (+19%). Sektor lain yang dilihat bisnis Indonesia sebagai kendala pertumbuhan adalah birokrasi yang berlebihan, prasarana transportasi dan teknologi.

Kesempatan angkatan kerja baru di Indonesia masih rendah dengan hanya 22% dari bisnis di Indonesia yang merekrut lebih banyak orang selama 12 bulan terakhir, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya: Filipina (+62%), Malaysia (+48%) dan Singapura (+42%); dan hanya 16% dari bisnis Indonesia yang berharap dapat menawarkan kenaikan gaji karyawannya "di atas inflasi" dalam waktu 12 bulan mendatang, dibandingkan dengan Filipina (72%), Malaysia (18%) dan Vietnam (18%).

Potensi peningkatan lapangan kerja baru dihadapkan pada kenyataan bahwa secara makro, bisnis di seluruh Asia Tenggara dan Asia Pasifik mengalami penurunan permintaan. Sementara itu, proporsi bisnis di Asia Pasifik menyebutkan bahwa kekurangan order merupakan satu hambatan besar untuk tumbuh, dan angkanya telah meningkat dari 43% di kuartal kedua menjadi 51% di kuartal ketiga.

Kawasan Asia Tenggara juga menjadi kurang menarik untuk ekspor sejak tahun 2010, dimana hanya 10% di ASEAN mengharapkan pertumbuhan ekspor untuk 12 bulan ke depan, sehingga harapan untuk ketersediaan pekerjaan menjadi rendah.



DI MATA PENGUSAHA JEPANG, INDONESIA PALING MENARIK

Memulai kerja sama formal sejak tahun 1973, Jepang bagi ASEAN merupakan salah satu mitra strategis dalam kerja sama ekonomi, begitu pun arti ASEAN bagi Jepang. Pada tahun 2012 berdasarkan data yang dirilis dalam situs Sekretariat ASEAN, aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) Jepang ke ASEAN mencatat pertumbuhan sebesar 26,4% dari tahun 2011, yaitu di angka US\$20,8 miliar. Jepang merupakan penyumbang investasi terbesar ke-2 di ASEAN, dengan kontribusi sekitar 1/5 dari total FDI yang masuk ke ASEAN.

ASEAN dan Jepang telah menandatangani *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* (AJCEPA) pada tahun 2008 dan menuntaskan persetujuan di bidang perdagangan barang. Sementara persetujuan AJCEPA di bidang perdagangan jasa dan investasi masih dalam proses penyelesaian perundingan. Dalam KTT Peringatan ASEAN-Jepang di Tokyo tanggal 14 Desember 2013 lalu, para Pemimpin ASEAN-Jepang menyambut dicapainya kemajuan pembahasan substansi dari persetujuan di bidang perdagangan jasa dan investasi tersebut. Diharapkan proses perundingan dapat segera menghasilkan kesepakatan secara penuh dan ditindaklanjuti dengan penandatanganannya.

Dalam kerangka bilateral Indonesia-Jepang, kerja sama ekonomi kedua negara juga sangat strategis. Jepang merupakan mitra utama Indonesia pada sektor perdagangan, investasi, dan pembangunan. Pada tahun 2012, Jepang tercatat sebagai negara mitra dagang terbesar ke-2 dengan nilai US\$52,9 miliar. Dalam sektor investasi, realisasi FDI asal Jepang di Indonesia pada tahun 2012 bernilai US\$2,45 miliar dan menempatkan negeri “matahari terbit”

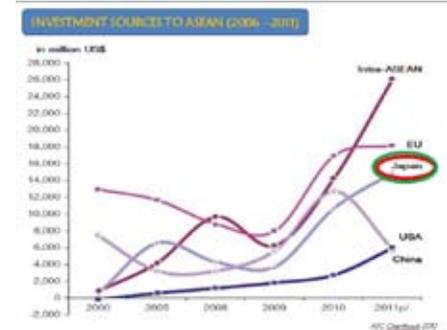


tersebut di urutan ke-2 teratas.

Toshiba, salah satu perusahaan elektronik raksasa Jepang, dalam beberapa pemberitaan di media massa sudah menyatakan akan memusatkan manufaktur produknya ke Indonesia pada 2014 dengan menutup pabriknya di RRT dan Polandia. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut, Toshiba mengalokasikan FDI senilai US\$500 juta.

Ketertarikan perusahaan Jepang untuk menanamkan lebih banyak modalnya di Indonesia sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Saat ini, di tengah defisitnya neraca berjalan, Pemerintah Indonesia berencana membuka lebih banyak sektor industri untuk FDI demi mencapai target Rp.450—500 triliun (US\$36,7—43,5 miliar) pada tahun 2014. Kebijakan tersebut dilakukan melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagaimana hasil kesepakatan antara pemerintah dan swasta. BKPM memprediksi pertumbuhan investasi pada 2014 sekitar 15%, turun dari capaian tiga tahun terakhir di angka 20%. Beberapa sektor tersebut, antara lain telekomunikasi, *ecotourism*, dan farmasi.

Sementara beberapa sektor baru dibuka untuk FDI, Pemerintah Indonesia dalam revisi DNI tersebut menerapkan pengetatan tingkat kepemilikan saham oleh investor asing pada beberapa sektor. Pada sektor industri pertanian dan hortikultura, Pemerintah Indonesia mem-

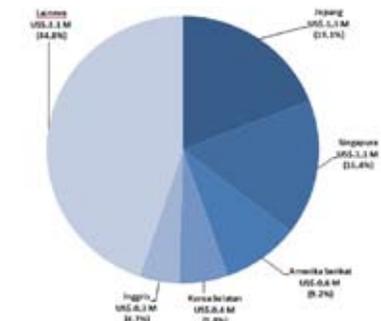


Sumber: AEC Chartbook 2012

batasi persentase maksimal kepemilikan saham oleh investor asing dipatok pada angka 30%, atau sepertiga dari kebijakan sebelumnya yang memungkinkan investor asing memiliki saham hingga 95%. Selain itu, Pemerintah juga memangkas persentase maksimal kepemilikan saham oleh investor asing pada sektor industri logistik sebesar 33%.

Para pengamat ekonomi internasional memandang Indonesia perlu meningkatkan aliran masuk FDI guna menyiasati pelambatan ekonomi, mengingat investasi berkontribusi sebesar 33% bagi PDB Indonesia. Peningkatan aliran FDI juga dapat mengatasi permasalahan defisit neraca berjalan. Selain itu, aliran FDI yang tinggi dibutuhkan oleh negara berkembang untuk menjaga stabilitas pertumbuhannya.

Data BKPM menunjukkan bahwa kontribusi FDI sebesar 70% dari total realisasi investasi di Indonesia. Sampai dengan triwulan III 2013, Jepang berada di peringkat teratas, dengan proporsi sebesar 19,1% dari total realisasi FDI di Indonesia.



PRIORITAS DIPLOMASI RI TAHUN 2014

PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN 2015 DAN PEMBAHASAN MASA DEPAN ASEAN SESUDAH 2015 MENJADI SALAH SATU PRIORITAS POLITIK LUAR NEGERI RI



Menlu RI sampaikan PPTM 2014 di Ruang Nusantara Kemlu RI, (07/01). Foto: dit. infomed/wandy

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri pada 7 Januari 2014, Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa menegaskan bahwa upaya untuk menghadapi tantangan pemeliharaan perdamaian dan keamanan akan terus menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia di tahun 2014 mengingat hal tersebut merupa-

kan prasyarat bagi kelanjutan kemajuan ekonomi dan kemakmuran. Indonesia akan senantiasa menempatkan diplomasi dan dialog sebagai pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan terus ditunjukkan untuk mengatasi tiga bentuk tantangan utama yang dihadapi kawasan Asia Pasifik, yaitu berkurangnya rasa saling percaya, sengketa wilayah, dan

perubahan geo-politik dan geo-ekonomi.

Menurut Menlu Marty, upaya dimaksud pada intinya bertujuan untuk mengubah “*trust deficit*” menjadi “*strategic trust*” dengan mengesampingkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah. Hal ini juga untuk mencegah kembalinya pola pikir era Perang Dingin di kawasan serta mencegah terjadinya

jurang pemisah baru antar-negara di kawasan.

Sebaliknya, sesuai dengan prinsip kebijakan politik luar negeri “bebas aktif”, memajukan sebuah kawasan yang ditandai oleh “keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*)”. Suatu kondisi yang ditandai oleh tidak adanya suatu negara yang dominan, bukan melalui “*block-politics*” yang cenderung menimbulkan ketidakstabilan baru, melainkan melalui hubungan antarnegara yang saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip keamanan bersama dan kemakmuran bersama tegas Menlu Marty.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Menlu Marty menilai bahwa langkah utama dan terutama yang harus dicapai ialah mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Lebih lanjut disampaikan bahwa upaya membangkitkan rasa kepemilikan dan partisipasi bahkan relevansi ASEAN di antara masyarakat sangat penting. Selain itu, Indonesia perlu memastikan adanya kondisi yang kondusif bagi pencapaian Komunitas ASEAN tidak saja dalam hubungan antar negara ASEAN, melainkan juga di dalam masing-masing negara anggota ASEAN.

Menlu Marty menekankan bahwa sambil mengupayakan terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015, Politik luar negeri Indonesia dalam kerangka ASEAN kini menatap jauh paska 2015 yaitu melalui kontribusi aktif terhadap pembahasan visi Komunitas ASEAN paska 2015. Bagi Indonesia, visi paska 2015 mencakup 4 elemen utama, yakni pertama, konsolidasi Komunitas ASEAN, kedua, kontribusi nyata ASEAN bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan yang lebih luas, ketiga, peran global ASEAN sesuai dengan *Bali Concord III*, dan keempat, perumusan apa yang dapat disebut sebagai Tujuan Pembangunan ASEAN (*ASEAN Development Goals*) yang melanjutkan capaian MDGs serta selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saat ini sedang dirumuskan di tingkat global.

Terkait tantangan di kawasan, Men-

lu Marty menyampaikan bahwa perhatian akan diberikan pada pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan. Pada tahun 2013 yang lalu diplomasi berperan penting dalam tercapainya kesepakatan antara RRT dan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai tata perilaku atau *code of conduct* di Laut China Selatan. Pada tahun 2014, dengan kemauan politik yang kuat, akan terdapat kemajuan melalui dicapainya sebuah tata perilaku di Laut China Selatan yang menjadi “*rules of the road*” atau panduan yang bertujuan untuk membangkitkan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan, jika insiden tetap terjadi, agar dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik terbuka.

Masih terkait tantangan di kawasan,

pada tahun 2014, Menlu Marty menjelaskan bahwa Indonesia akan melanjutkan upaya untuk mendorong pembahasan suatu kerangka kerja sama di kawasan Asia Pasifik secara luas atau kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang serupa dengan *Treaty of Amity and Cooperation* yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum di antara Negara-negara di kawasan, yang didasari oleh *East Asia Summit Bali Principles for Mutually Beneficial Relations* tahun 2011. “Suatu perjanjian mengenai pemajuan rasa saling percaya; penolakan penggunaan kekuatan, dan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai; serta prinsip-prinsip keamanan dan kemakmuran bersama”.



“Menlu Marty menekankan bahwa sambil mengupayakan terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015, Politik luar negeri Indonesia dalam kerangka ASEAN kini menatap jauh paska 2015 yaitu melalui kontribusi aktif terhadap pembahasan visi Komunitas ASEAN paska 2015.”

EMPAT DASAWARSA KEMITRAAN ASEAN-JEPANG

Tahun 2013 merupakan momen penting bagi ASEAN-Jepang sehubungan dengan diperingatinya kerja sama kemitraan yang telah dijalin selama 40 tahun. Untuk merayakan momen ini, pada 13-14 Desember 2013, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan ASEAN-Jepang di Tokyo. KTT dipimpin bersama oleh PM Jepang, Shinzo Abe, dan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN, dan dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, kecuali Thailand yang diwakili oleh *Caretaker Wakil Perdana Menteri/ Menteri Perdagangan*.

Beberapa isu menonjol dan strategis yang menjadi perhatian para kepala negara/pemerintahan adalah upaya peningkatan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, konektivitas, dan sosial budaya.

Kerja Sama Politik dan Keamanan

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, ASEAN dan Jepang sepakat untuk terus mendorong kerja sama, antara lain di bidang pemberantasan terorisme, keamanan maritim, operasi penjagaan perdamaian serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya melalui mekanisme yang telah ada seperti *East Asia Summit*, *ASEAN Regional Forum*, dan *ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus*.

Indonesia memandang bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Upaya memelihara perdamaian, bagi Indonesia didasari oleh paradigma baru yang mengedepankan pencapaian keamanan bersama, stabilitas bersama dan kemakmuran bersama.

Indonesia memainkan peran dan



kepemimpinannya di kawasan dengan mengusulkan pembentukan *Indo-Pacific treaty of friendship and cooperation in the wider region*, yakni sebuah komitmen untuk menciptakan rasa saling percaya, mengatasi berbagai permasalahan secara damai, dan mengusung konsep stabilitas dan keamanan sebagai sebuah kebaikan bersama.

Kerja Sama Ekonomi

Pada KTT tersebut, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama guna mencapai stabilitas finansial untuk memperkuat ketahanan ekonomi, perbaikan konektivitas di ASEAN dan Jepang, serta kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi guna meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.

Jepang menganggap kebijakan ekonomi "*Abenomics*" yang digagasnya turut membantu revitalisasi perekonomian Jepang yang pada gilirannya juga akan memberikan manfaat bagi ASEAN. Sebaliknya, peningkatan pertumbuhan di ASEAN juga memberikan manfaat bagi Jepang, sehingga investasi dua arah perlu terus didorong.

Pada KTT Peringatan ini, Jepang

berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama dalam bidang konektivitas, baik dalam penguatan konektivitas teknologi dan infrastruktur darat, laut, dan udara, maupun dalam implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity*.

Perpanjangan bantuan *Official Development Assistance* (ODA) sebesar 2 triliun Yen untuk jangka waktu 5 tahun serta penambahan dana sebesar 100 juta Dollar AS dalam kerangka *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF) adalah komitmen yang berkelanjutan dan diharapkan dapat semakin mengembangkan kerja sama yang telah terbina.

Kerja Sama Sosial dan Budaya

Kerja sama lainnya yang turut menjadi perhatian utama adalah bidang penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan pelayanan kesehatan melalui program *Universal Health Care* (UHC), perlindungan lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan, penanganan penyakit menular, serta ketahanan pangan dan energi.

Secara geografis ASEAN dan Jepang berada di wilayah yang rentan terhadap bencana alam, maka tidak diragukan lagi urgensi kerja sama ASEAN-Jepang



[httpsetkab.go.id](http://setkab.go.id)

dalam bidang penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan perlu ditingkatkan.

Dalam bidang pendidikan dan pertukaran pemuda, Jepang turut berkontribusi dengan mendorong saling pengertian antar pemuda seperti melalui program JENESYS 2.0, *Ship for South East Asia Youth Program* (SSEAYP) serta pertukaran pelajar dan tenaga pendidik.

Hal menarik lainnya yang mengemuka pada KTT Peringatan adalah terkait pembentukan *Asia Center* pada *Japan Foundation* untuk meningkatkan dialog dan pertukaran budaya, memperluas bantuan pendidikan bahasa, serta rencana penyelenggaraan olahraga sepak bola antara pemuda ASEAN dan tim muda nasional Jepang pada April 2014 mendatang.

Isu Regional dan Internasional

Sebagai mesin pertumbuhan, Asia

Timur memiliki peran krusial bagi kawasan dan dunia internasional. Oleh karena itu, bagi Indonesia berbagai permasalahan yang muncul di kawasan harus dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan konsultasi, serta mengedepankan hukum internasional, termasuk dalam rangka menciptakan kawasan bebas nuklir.

Menyadari beragam tantangan dalam mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs), para Pemimpin juga sepakat untuk menitikberatkan pada percepatan pencapaian target tersebut serta memformulasikan agenda pembangunan paska Komunitas ASEAN 2015.

Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang selama ini telah turut memberikan kontribusi, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Peringatan 40 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang meru-

pakan momentum bagi kedua belah pihak untuk menetapkan visi bersama bagi kerja sama jangka panjang ke depan, dengan melihat pengalaman keduanya dalam membangun kemitraan strategis. Diperlukan kerja sama yang lebih mendalam dan bersinergi antara ASEAN dan Jepang; guna mewujudkan kerja sama kemitraan yang sejajar dan lebih menguntungkan, dengan memanfaatkan dan mengembangkan lebih lanjut berbagai peluang yang ada. Dalam KTT Peringatan ini, para Pemimpin mengesahkan *Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation: Shared Vision, Shared Identity, Shared Future* dan Rencana Implementasinya, serta *Joint Statement of the ASEAN-Japan Commemorative Summit: Hand in hand, facing regional and global challenges.*]

LOMBA KARYA TULIS

“ASEAN & Kita”

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komunitas ASEAN dan perayaan HUT Ke-46 ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkerja sama dengan Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Indonesia dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) telah menyelenggarakan Lomba Karya Tulis ASEAN dengan tema “Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 yang Berorientasi pada Masyarakat”

Lomba Karya Tulis dimulai sejak

tanggal 15 Juli 2013 dan ditutup pada 30 Agustus 2013. Dalam kurun waktu tersebut panitia menerima sejumlah 387 karya tulis baik dari peserta perorangan maupun kelompok yang berasal dari warga negara Indonesia dari dalam maupun luar negeri.

Seleksi karya tulis dilakukan oleh panitia dari sisi administrasi, keterkaitan/relevansi judul karya tulis dan tema. Dari hasil seleksi terdapat 50 karya tulis yang disampaikan kepada Dewan Juri untuk dievaluasi lebih lanjut.

Dewan Juri yang terdiri dari Duta

Besar Bagas Hapsoro (Kementerian Luar Negeri), Zumrotin K. Susilo (INFID), Makmur Keliat (Pusat Studi ASEAN – Universitas Indonesia), Budiarto Shambazy (Wartawan Kompas), dan Ibnu Wahyudi (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia). Pada Buletin Komunitas ASEAN Edisi ke-3 telah dimuat hasil karya tulis pemenang pertama, kedua dan ketiga. Dalam edisi ke-4 ini memuat pemenang unggulan Lomba Karya Tulis 2013 sebagai berikut:

Pemenang Unggulan:

Winsherly Tan, Mahasiswa Universitas Internasional Batam

Judul Karya Tulis: “Partisipasi Publik di Negara ASEAN dalam Menyelesaikan Masalah TKI: Tantangan Komunitas ASEAN 2015 dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”

Jerry Indrawan Gihartono, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia

Judul Karya Tulis: “Komunitas ASEAN dan Kekuatan Masyarakatnya: Menjawab Tantangan Zaman”

Mireille Marcia, Mahasiswa Universitas Indonesia

Judul Karya Tulis: “Prinsip Outward Looking dan Keterbukaan ASEAN sebagai Penghambat Terciptanya Komunitas Keamanan Ideal”



aseancommunity.com

PARTISIPASI PUBLIK DI NEGARA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH TKI: TANTANGAN KOMUNITAS ASEAN 2015 DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia usia produktif yang bekerja di luar negeri (negara anggota ASEAN, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) untuk jangka waktu tertentu biasanya dalam kurun waktu 2 tahun dengan menerima upah.¹Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar.

Tujuan utama warga negara Indonesia ke luar negeri dan bekerja di negara lain adalah demi untuk memperoleh penghasilan yang besar. Faktor lainnya yang memicu warga negara Indonesia pergi untuk bekerja ke luar negeri adalah faktor sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan di Indonesia. Berbagai lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia telah dijejali oleh ribuan atau bahkan jutaan orang, sehingga hal tersebut tidak memberikan kesempatan bagi generasi angkatan kerja berikutnya. Ketika ada satu atau beberapa lapangan pekerjaan dibuka, maka dengan segera orang akan berlomba-lomba memasukkan surat lamaran pekerjaan dan bersaing memperebutkan pekerjaan. Ratusan bahkan ribuan orang bersaing untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, namun pada akhirnya hanya beberapa orang saja yang diterima untuk bekerja. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang tidak diterima bekerja? Jawabannya sangat sederhana yaitu menganggur!

Hembusan kabar tentang terbuka lebarnya kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan iming-iming untuk mendapatkan penghasilan yang besar seakan memberikan secercah harapan bagi angkatan kerja yang tersisih dari persaingan memperebutkan lapangan pekerjaan tersebut dan bagi para pengangguran yang luar biasa sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia.²

Jumlah WNI yang berada luar negeri yang melakukan lapor diri ke perwakilan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah WNI Di Luar Negeri

Tahun	Jumlah
2007	3.141.354
2008	3.121.506
2009	3.147.211
2010	3.353.631
2011	3.075.104

Sumber : Dit. PWNI-BHI Database per 7 Juni 2011

Berdasarkan data tersebut, secara umum jumlah WNI di luar negeri cukup banyak. Umumnya WNI tersebut mempunyai status sebagai TKI. Sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja, jumlah pengiriman TKI dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Indonesia sehingga TKI biasa dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah TKI di luar negeri sebagai berikut:

Tabel 2. Penempatan TKI Per Tahun Per Negara

No	Negara Penempatan	Tahun							Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Saudi Arabia	281,087	257,217	234,644	276,633	228,890	137,643	11,814	1,427,928
2	Malaysia	219,658	222,198	187,123	123,886	116,056	134,108	46,296	1,049,325
3	Taiwan	45,706	50,810	59,522	59,335	62,048	73,498	30,669	381,588
4	Singapore	28,661	37,496	21,807	33,077	39,623	47,781	20,430	228,875
5	United Emirate Arab (UEA)	22,685	28,184	38,092	40,391	37,337	39,857	14,274	220,820
6	Hong Kong	20,100	29,973	30,204	32,417	33,262	50,283	18,237	214,476

¹ Tenaga Kerja Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia, diakses 28 Mei 2013

² Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 9-10.

7	Kuwait	24,600	25,756	29,218	23,041	563	2,723	693	106,594
8	Qatar	7,980	10,449	8,582	10,010	13,559	16,578	8,476	75,634
9	Yordania	10,978	12,062	11,155	10,932	5,695	134	29	50,985
10	Oman	5,210	7,150	8,309	9,700	9,259	7,292	3,375	50,295
11	Brunai Darussalam	8,482	5,852	3,861	4,785	7,360	10805	5,703	46,848
12	Korea Selatan	4,035	3,830	8,134	1,890	7,596	11,390	6,399	43,274
13	Amerika Serikat	-	1,263	66	47	475	13,746	5,088	20,685
14	Bahrain	639	2,267	2,324	2,837	4,844	4,375	2,832	20,118
15	Syria	-	-	-	1,155	6,381	4222	1	11,759
16	Italia	-	953	7	-	13	3,408	1,765	6,146
17	Jepang	36	96	232	362	233	2,508	1,441	4,908
18	Aljazair	-	-	499	453	609	1,084	563	3,208
19	Afrika Selatan	-	111	-	-	12	2,009	786	2,918
20	Macao	-	164	468	674	826	582	148	2,862
21	Spanyol	-	210	4	-	10	1484	693	2,401
22	RRC	-	-	-	-	-	1072	645	1,717
23	Thailand	-	-	-	9	1	1113	426	1,549
24	Turki	-	-	6	-	25	1016	352	1,399
25	New Zealand	-	-	71	269	279	468	212	1,299
26	Fiji	-	-	-	-	-	556	447	1,003
27	Maldives	-	-	22	20	80	638	185	945
28	Australia	-	-	5	-	1	526	363	895
29	Nigeria	-	-	82	81	9	588	88	848
30	Mauritius	-	-	-	-	3	478	359	840
31	Brasil	-	-	-	-	66	313	446	825
32	Belanda	-	10	3	-	1	592	202	808
33	India	-	-	-	2	12	519	236	769
34	Lain-lain	143	554	-	-	-	17	-	714
35	Uruguay	-	-	-	-	-	496	195	691
36	Cyprus	-	-	1	-	37	356	295	689
37	Jerman	-	10	3	-	1	299	354	667
38	Inggris	-	8	-	-	6	491	119	624
39	Trinidad	-	-	-	-	-	213	382	595
40	Papua New Guini	-	-	-	-	-	309	239	548
41	Vietnam	-	-	-	-	-	337	179	516
42	Libya	-	-	114	35	251	83	3	486
43	Timor Leste	-	-	3	-	-	425	35	463
44	Swiss	-	-	-	-	-	174	277	451
45	Mesir	-	-	-	2	13	265	130	410
46	Peru	-	-	-	-	-	301	105	406
47	Portugal	-	-	-	-	5	248	117	370
48	Yaman	-	123	90	30	7	59	59	368
49	Rusia	-	-	-	-	2	246	106	354
50	Perancis	-	-	-	-	117	153	81	351
51	Lain-lain	-	-	80	99	236	3,220	1,710	5,345
Total		680,000	696,746	644,731	632,172	575,803	581,081	188,059	3,998,592

Sumber: BNP2TKI per 2013

Tabel 3. Jumlah Kepulangan TKI

TAHUN	KEPULANGAN
2006	376,782
2007	354,921
2008	447,016
2009	492,073
2010	466,497
2011	494,212
2012 (sampai 31 Mei)	150,748
Total	2,782,249

Sumber: BNP2TKI per 2013

Dari jumlah kepulangan TKI yang didata oleh BNP2TKI, terdapat sejumlah TKI bermasalah dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah

Tahun	Kepulangan	TKI Bermasalah	Prosentase
2006	376,782	57,971	15.4 %
2007	354,921	58,085	16.4 %
2008	447,016	50,765	11.4 %
2009	492,073	53,168	10.8 %
2010	466,497	67,318	14.4 %
2011	494,212	72,880	14.7 %
2012 (sampai 31 Mei)	150,748	19,413	12.9 %
Total	2,782,249	379,600	13.6 %

Sumber: BNP2TKI per 2013

Alasan kepulangan TKI ke Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5. Alasan Kepulangan TKI

NO	Jenis Kasus TKI	Prosentase
1	Gaji tidak dibayar	45.50%
2	Penyiksaan/Kekerasan fisik	9.93%
3	Pelecehan seksual	3.99%
4	Beban kerja tidak sesuai	10.01%
5	Majikan tidak sesuai	16.26%
6	Jam kerja tidak sesuai	0.16%
7	Tidak betah	2.35%
8	Berselisih paham	0.39%
9	Sakit	11.42%

Sumber: Database Dit. Perlindungan WNI dan BHI 2011

Meskipun perlindungan hukum untuk TKI yang bekerja di luar negeri termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, namun ternyata hal tersebut tidak cukup untuk melindungi TKI yang bekerja dan mengais rezeki di luar negeri. Hal ini terbukti dengan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi TKI yang bekerja di luar negeri. Contohnya, kasus Modesta Rangga Eka, perempuan asal Kupang yang disiksa majikan perempuan berusia 37 tahun di Malaysia. Tubuh Modesta luka parah bahkan, kupingnya pernah diiris dan gaji Modesta selama 19 bulan belum dibayar.³ Kasus kekerasan terhadap TKI juga menimpa seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan bernama Carmani (40 tahun) asal Bandung. Carmani mengalami tindak kekerasan dan pelecehan di Singapura. Namun, pihak keluarga belum

³ TKI Disiksa Dan Diiris Kepingnya Di Malaysia, <http://internasional.kompas.com/read/2009/06/29/1721174/Lagi.TKI.Disiksa.dan.Diiris.Kupingnya.di.Malaysia>, diakses 29 Juni 2009

bisa memulangkan Carmani karena pihak penyalur tenaga kerja (agen) di Singapura meminta biaya pemulangan Rp 18 juta.⁴Berdasarkan data dari *the Migrant Institute*, jumlah kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Asia Pasifik dan Amerika selama Januari 2009 terdapat 40 kasus. Negara Brunei Darussalam menempati posisi pertama dengan memiliki 20 kasus penganiayaan, disusul Hongkong yang memiliki 5 kasus, Malaysia, Korea, Singapura masing-masing memiliki 4 kasus dan Taiwan 3 kasus.⁵Dari data tersebut, nampaknya kekerasan terhadap dialami TKI umumnya di negara-negara anggota ASEAN, khususnya Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Bukan hanya kasus kekerasan dan penyiksaan yang menimpa TKI tetapi juga ada TKI yang diperdagangkan ke luar negeri (*human trafficking*). Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di antara dua negara ASEAN yaitu Malaysia dan Singapura, merupakan daerah transit bagi TKI yang dipulangkan dari Malaysia dan Singapura, termasuk diantaranya TKI yang merupakan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.⁶

TKI pada dasarnya memiliki hak-hak asasi yang sama dengan manusia lain sebagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga telah diterima secara umum oleh negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia.⁷

Banyaknya kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami buruh migran termasuk TKI di negara anggota ASEAN menjadi tantangan besar bagi komunitas ASEAN 2015 dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Idealisme Komunitas ASEAN 2015 yang terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) Komunitas Politik-Keamanan ASEAN; (2) Komunitas Ekonomi ASEAN; (3) Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Penerapan Pilar Ekonomi menekankan pada pembentukan pasar tunggal di mana setiap warga negara anggota ASEAN mempunyai kesempatan untuk bekerja atau membuka usaha di wilayah ASEAN mana pun. Namun pertanyaannya apakah pilar kedua tersebut dapat terealisasi apabila kekerasan terhadap buruh migran di kawasan ASEAN tetap mengganjal?.

Kekerasan terhadap buruh migran, termasuk TKI merupakan pelanggaran HAM. Masih sering terjadinya pelanggaran HAM di negara ASEAN memberikan inisiatif Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN untuk mencetuskan ASEAN *Inter-Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tanggal 23 Oktober 2009. AICHR memiliki 14 mandat dan fungsi yang meliputi promosi dan proteksi HAM; melakukan langkah kooperatif, dialogis, informatif dan konsultatif; melaksanakan kajian tematik, menyiapkan

laporan tahunan serta mendapatkan mandat dan tugas lain berdasarkan hasil pertemuan para Menlu ASEAN dan salah satu mandat dari AICHR adalah mengembangkan Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*). Deklarasi tersebut ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 pada 18-19 November 2012 yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja.⁸

Penanganan pelanggaran HAM di ASEAN bukan perkara mudah, bukan berarti telah dibentuknya AICHR permasalahan HAM di ASEAN dengan serta merta akan dapat diatasi dan berkurang. AICHR lambat untuk menyelesaikan permasalahan HAM di ASEAN dikarenakan beberapa sebab yaitu :⁹

Dari sisi internal ASEAN sendiri terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Diantaranya yang paling krusial adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Apatisme itu berlanjut ketika Myanmar juga merupakan salah satu anggota dari AICHR.

Implementasi dari AICHR juga berbenturan dengan prinsip yang dianut oleh Negara-negara ASEAN itu sendiri yang telah ada sejak ASEAN berdiri, yaitu Prinsip *non interference*. Jadi sesuai dengan prinsip tersebut setiap negara anggota ASEAN dilarang untuk ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi di salah satu negara anggota. Hal itu jelas akan sulit dalam kaitannya dengan penegakan HAM. Artinya sesuai dengan prinsip tersebut, apabila ada suatu masalah pelanggaran HAM di suatu negara, AICHR hanya dapat bertindak sampai batasan dialog saja. Selebihnya itu menjadai urusan negara tersebut untuk menyelesaikan masalah internalnya sendiri.

Selain itu alasan lainnya adalah belum adanya wewenang yang jelas bagi AICHR untuk bertindak dalam penegakan HAM sehingga belum ada sanksi yang jelas yang dapat diberikan lembaga ini terhadap negara yang melanggar.

Namun demikian, pembentukan AICHR ini merupakan langkah maju dari ASEAN untuk mewujudkan salah satu tujuannya yaitu memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara anggota ASEAN.

Sehubungan persoalan kekerasan terhadap buruh migran di ASEAN merupakan salah satu kasus HAM yang perlu mendapat perhatian khusus, maka para Menteri Luar Negeri dari 10 negara ASEAN sepakat untuk membentuk *Committee on The Implementation of The ASEAN Declaration on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers* pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina. Tujuan dari komite ini adalah meningkatkan kebijakan dan program untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja

⁴ TKI Bandung Alami Tindak Kekerasan di Singapura, BNP2TKI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/2873-tki-bandung-alami-tindak-kekerasan-di-singapura.html>.

⁵ Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunei Darussalam, Migrant Institute, <http://migrantinstitute.blogspot.com/2010/11/kasus-penganiayaan-tki-tertinggi-di.html>.

⁶ Rina Shahriyani Shahrullah, Siska Sukmawaty, 2010, Penanganan Buruh Migran Indonesia pada Daerah Transit, LIPI Press, Jakarta, hlm 18&7.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 118-119.

⁸ Mekanisme HAM di ASEAN : Peluang Penegakan HAM di Tingkat Regional, <http://www.kalyanamitra.or.id/2013/02/mekanisme-ham-di-asean-peluang-penegakan-ham-di-tingkat-regional/>, diakses 6 Februari 2013.

⁹ ASEAN Dan Komitmen Perlindungan HAM, <http://pandhuwiguna.blogspot.com/2009/10/asean-dan-komitmen-perlindungan-ham.html>, diakses 26 Oktober 2009.

migran di negara pengirim dan penerima; mendorong organisasi-organisasi internasional, mitra dialog ASEAN dan negara-negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip dan memperluas dukungan dan bantuan kepada pelaksanaan langkah-langkah yang terdapat dalam Deklarasi; mempromosikan harmonisasi mekanisme antara negara pengirim dan yang mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran.¹⁰

ASEAN *Committee on Migrant Workers* sebagai langkah awal pembentukan *legally binding instrument* ternyata tidak memperlihatkan kemajuan karena tidak adanya komitmen politik dari para petinggi ASEAN untuk mengimplementasikan *Cebu Declaration on the Protection and Promotion of the rights of migrant workers*.¹¹

Implementasi *Cebu Declaration* yang sangat lambat ditambah lagi dengan efektifitas AICHR yang kurang maksimal bukan berarti menjadi halangan dalam menegakkan HAM buruh migran. Partisipasi masyarakat (publik) ASEAN melalui wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik secara mandiri maupun berkerjasama dengan LSM sesama anggota negara ASEAN telah berupaya secara serius menangani persoalan buruh migran termasuk TKI. Sebagai contoh, upaya untuk melindungi TKI dilakukan melalui MOU antara BNP2TKI dan *International Organization on Migration (IOM)* Indonesia yang merupakan salah satu LSM di Indonesia yang aktif dalam penanganan TKI. Program kerjasama BNP2TKI dan IOM ini mendapat dukungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan *The United Nation Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN WOMEN)*. Tujuan utama dari program kerjasama ini, yakni meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dalam mempromosikan praktik rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri yang baik; meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara negara-negara asal dan negara tujuan dalam mempromosikan migrasi yang aman dan tertib; serta mendorong riset pengembangan pasar tenaga kerja untuk mendukung keselarasan antara permintaan tenaga kerja dan ketersediaannya.¹²

Partisipasi publik di negara ASEAN juga terlihat pada kerjasama advokat Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus kekerasan TKI di Malaysia. Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) menjalin kerjasama dengan asosiasi advokat di Malaysia untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI yang mengalami tindakan kekerasan dari majikannya di Malaysia.¹³ Yayasan Diva Wanita sebuah

¹⁰ Statement of the Establishment of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/statement-of-the-establishment-of-the-asean-committee-on-the-implementation-of-the-asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers>, diakses 30 Juli 2007.

¹¹ Nasib Buruh Migran di Regional ASEAN, <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=1451>, diakses 5 Mei 2011.

¹² BNP2TKI dan IOM Kerjasama Perkuat Kemampuan Penanganan Migrasi, <http://www.bn2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8162-bnp2tki-dan-iom-kerjasama-perkuat-kemampuan-penanganan-migrasi.html>, diakses 8 April 2013.

¹³ LAWASIA (The Law Association For Asia and The Pasific), <http://theindonesianjournalist.com/liindungi-tki-peradi-kerjasama-dengan-malaysia/>, diakses 2 Agustus 2013.

Implementasi dari AICHR juga berbenturan dengan prinsip yang dianut oleh Negara-negara ASEAN itu sendiri yang telah ada sejak ASEAN berdiri, yaitu Prinsip *non interveance*. Jadi sesuai dengan prinsip tersebut setiap negara anggota ASEAN dilarang untuk ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi di salah satu negara anggota. Hal itu jelas akan sulit dalam kaitannya dengan penegakan HAM.

LSM di Kota Batam secara aktif berkolaborasi dengan LSM di Singapura (*HOME Singapore*) untuk membantu kepulangan TKI yang bermasalah di Singapura ke Kota Batam yang akan ditampung pada *shelter* Yayasan Diva Wanita.

Terlepas dari kurang efektifnya AICHR dan lambannya Deklarasi Cebu, penanganan buruh migran tetap dilaksanakan oleh masyarakat ASEAN melalui wadah LSM. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia harus tinggal diam dalam penanganan HAM TKI. Sebaliknya, penulis berpendapat bahwa AICHR dapat digunakan oleh Indonesia untuk memudahkan Indonesia dalam menyelesaikan masalah TKI di tingkat regional. Selain itu penulis juga berpendapat perlunya peningkatan kerjasama dalam penanganan TKI secara bersama antara pemerintah Indonesia dan LSM di Indonesia maupun di negara ASEAN. Diharapkan partisipasi publik ASEAN yang baik dan berkesinambungan dapat merealisasikan pelaksanaan Pilar Kedua Komunitas ASEAN 2015.



Implementasi Cebu Declaration yang sangat lambat ditambah lagi dengan efektifitas AICHR yang kurang maksimal bukan berarti menjadi halangan dalam menegakkan HAM buruh migran.



Komunitas ASEAN dan Kekuatan Masyarakatnya: Menjawab Tantangan Zaman

Pendahuluan

ASEAN adalah sebuah organisasi, sekaligus sebuah komunitas dari negara-negara yang terdiri dari banyak ras, bahasa, agama, dan dihubungkan melalui kedekatan jarak dan talian sejarah. Kota-kota ASEAN dewasa ini memberikan sedikit petunjuk tentang masa lalunya yang keras. Gedung-gedung pencakar langit sekarang berdiri di lokasi yang dulunya dihancurkan oleh perang dan konflik berkepanjangan. Tersebar di wilayah sebesar 4.480.000 km² dengan populasi lebih dari 540 juta penduduk asli, imigran, dan keturunan dari pernikahan antar bangsa. Sebagai sebuah wilayah, ASEAN menawarkan keanekaragaman yang kaya akan bakat, tradisi, sumber daya, dan kesempatan.¹

Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial, dan kebudayaan tetapi Deklarasi Bangkok berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu diwarnai oleh pergolakan dan perselisihan antarnegara, terutama antara Indonesia dan Malaysia, maupun antara kekuatan-kekuatan nonnegara di luar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok tersebut pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN.

Para pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara anggota masih terdapat perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik serta kenyataan bahwa dalam bidang ekonomi sebagian besar negara anggota bersaing sebagai penghasil komoditi yang sama. Oleh

karenanya langkah yang diambil adalah secara pragmatis. Sementara pengamat menilai pertumbuhan ASEAN pada tahun-tahun pertama sangat lambat. Namun hal itu sebenarnya merupakan satu periode pemantapan saling pengertian dan menghilangkan saling curiga antar anggotanya untuk memantapkan kerja sama yang sedang dikembangkan ke arah yang lebih baik.

Perlu disadari bahwa ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional dalam satu wadah asosiasi karena adanya kepentingan bersama. Persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerja sama ini. Kerja sama regional ini juga bukan bersifat integratif tetapi bersifat kooperatif. Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Sedangkan landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah untuk saling membantu demi kepentingan bersama (*common interest*).

Tiga Pilar ASEAN

Pada dekade 1980-an, ASEAN telah menjadi sebuah organisasi regional yang penting dan tidak terpisahkan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena peran ASEAN dalam masalah-masalah regional begitu besar dan cukup signifikan. Bahkan, negara-negara besar kemudian mengakui ASEAN sebagai kunci untuk memahami persoalan-persoalan Asia Tenggara. Maka dari itu, para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Pada KTT ASEAN di Bali, Okto-

ber 2003, para pemimpin ASEAN mendeklarasikan *Bali Concord II* untuk bersama-sama membentuk Komunitas ASEAN paling lambat tahun 2020. Komunitas tersebut mencakup tiga pilar, yaitu *Political and Security Community*, *Economic Community*, dan *Socio-Cultural Community* yang saling bersinggungan dan saling mendorong dalam rangka mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama di kawasan.²

Pada KTT ASEAN ke-12, Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN paling lambat tahun 2015, dengan penandatanganan Deklarasi Cebu. Secara khusus, para pemimpin juga sepakat untuk mempercepat pembentukan *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi kawasan di mana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.³

Pada KTT ASEAN ke-13, November 2007 di Singapura, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk menandatangani Piagam ASEAN, yang menandai komitmen para Kepala Negara ASEAN untuk membangun sebuah komunitas bersama yang didasarkan pada kerja sama regional dan integrasi. Sejalan dengan ini, cetak biru *ASEAN Political and Security Community* diadopsi sebagai *roadmap* pembentukan APSC 2015.⁴ Selain itu, pembentukan cetak biru *ASEAN Socio-*

² Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm. 9.

³ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm. 7-8.

⁴ Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm.5.

¹ Philip Kotler, dkk. 2007. Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015. Singapore: McGraw Hill. Hlm. 5.

Cultural Community juga disepakati untuk menjamin adanya tindak lanjut konkret dalam mempromosikan pembentukan sebuah komunitas sosial budaya ASEAN.⁵

Komunitas ASEAN dengan tiga pilarnya (APSC, AEC, dan ASCC) di masa depan akan menjadi bagian penting dalam hubungan internasional yang semakin kompleks sifatnya, dan dalam pola hubungan internasional yang demikian ini perubahan-perubahan pasti akan terjadi. *ASEAN Political and Security Community* dirancang untuk mendorong terciptanya *sharing* norma-norma, pencegahan dan resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian melalui perkembangan politik yang positif. APSC digunakan sebagai kendaraan untuk memerangi terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, seperti narkoba dan perdagangan manusia.⁶

ASEAN Economic Community berusaha untuk membawa modal, barang, jasa, dan sumber daya manusia kepada satu pasar dan basis produksi tunggal. Integrasi seperti ini memerlukan akselerasi dari perdagangan bebas dan fasilitasi terhadap usaha (bisnis), meningkatkan UMKM, serta menarik investor masuk ke dalam ASEAN.⁷ Terakhir, *ASEAN Socio-Cultural Community* dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan sosial dan budaya dari masyarakat ASEAN, seiring kawasan ini bergerak menuju integrasi ekonomi dan globalisasi. Sumber-sumber daya akan dialokasikan ke bidang-bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.⁸

ASEAN Economic Community

ASEAN aktif mengikuti kemajuan liberalisasi di bidang perdagangan dan investasi pada forum-forum internasional seperti *Asia Pacific Economic*

Cooperation (APEC) atau *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Hal ini juga termasuk pemeliharaan tingkat pertumbuhan kawasan dan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat Asia Tenggara pada umumnya. ASEAN harus mencari hati rakyat di negara masing-masing anggota, bahwa keikutsertaannya dalam proses liberalisasi perdagangan harus dilakukan secara sinergis antara pemeliharaan integrasi ekonomi kawasan dengan kepentingan nasional yang melibatkan partisipasi penuh masyarakat

Produk-produk, maupun bisnis-bisnis lokal di negara-negara ASEAN, seperti *Dji Sam Soe* dan *Extra Joss* dari Indonesia, *Goldilocks* dan *San Miguel* dari Filipina, *Royal Selangor* dari Malaysia, *Eu Yan Sang* dari Singapura, dan *Black Canyon* dari Thailand semuanya berbasis ekonomi rakyat ketika awal memulai usahanya.⁹ Sekarang, *brand* mereka sudah mulai merambah luar ASEAN. Ketika ASEAN membuka diri terhadap pasar bebas, hendaknya ASEAN memperkuat basis ekonomi lokalnya dulu. Penguatan basis ekonomi lokal tentunya disandarkan pada kuatnya masyarakat lokal dalam menopang usaha tersebut.

Masuknya Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan membuka pasar baru di negara-negara tersebut maupun kompetisi memperebutkan pasar kerja murah. Ditambah dengan negara-negara ASEAN yang lebih maju, yang memiliki keunggulan, seperti infrastruktur dan teknologi yang lebih baik, serta sumber daya manusia yang lebih handal, menambah variasi keunggulan kawasan ini. Substansinya, bahwa semua negara-negara ASEAN secara terpadu akan mengalami pengembangan ketika beroperasi sebagai sebuah kesatuan, tentunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

Selain itu, sebagai blok perdagangan regional, ASEAN telah memulai beberapa inisiatif untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi di dalam kawasannya, dan juga dengan mitra-mitra dagang globalnya. Usaha untuk meningkatkan kerjasama

ekonomi dan integrasi kawasan diformulasikan melalui AFTA, yang mencakup perdagangan, investasi, industri, jasa, keuangan, pertanian, kehutanan, energi, transportasi dan komunikasi, kekayaan intelektual, UMKM, dan pariwisata. AFTA diharapkan mampu meningkatkan level persaingan dagang ASEAN dengan pasar global, melalui pembebasan biaya tarif, agar banyak investor masuk ke ASEAN. Adanya AFTA ini pun menjawab tantangan yang dihadapi ASEAN sebelum AEC 2015, yaitu mampu menciptakan keharmonisan antar sesama negara ASEAN yang memiliki doktrin ekonomi dan politik yang berbeda, seperti Singapura dan Filipina yang menganut pasar bebas, dengan Vietnam dan Myanmar masih berbau sosialis dan komunis.

Indonesia akan memiliki peran yang sangat besar di ASEAN karena menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Kondisi ini membuat kawasan ASEAN mendapat efek samping yang positif, apalagi apabila Komunitas Ekonomi ASEAN sudah berjalan secara terpadu. Pasar tunggal ASEAN yang secara penuh sudah terintegrasi, membuat kebijakan-kebijakan berprinsip keterbukaan pasar mampu menjawab tantangan global. ASEAN akan menjadi *highly competitive economic integrated region*, sehingga arus investasi dan ASEAN *production base* akan berkembang pesat.

Pada KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, Mei 2011 lalu, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan implementasi cetak biru AEC secara tepat waktu. Hal ini karena Indonesia menganggap AEC harus menjadi salah satu pilar utama (*cornerstone*) dari efektif tidaknya penerapan prinsip ASEAN *centrality* dalam hubungannya dengan negara mitra dialog. Terlebih, dinamika perebutan pengaruh di kawasan semakin dipengaruhi oleh faktor geo-ekonomi. Di kawasan, saling ketergantungan ekonomi tumbuh pesat melalui perdagangan, investasi, dan jaringan produksi regional.

Tahun 1960-an, Bela Balassa mengembangkan teori integrasi ekono-

⁵ Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. *Op cit.*, Hlm. 9.

⁶ Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. *Op cit.*, Hlm. 18-19.

⁷ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. *Op cit.*, Hlm. 9 dan 21-22.

⁸ Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. *Op cit.*, Hlm. 13-14.

⁹ Kotler. *Op cit.*, Hlm. 85-86.

mi dalam enam fase: *preferential agreement, free-trade agreement, customs union, common market, economic and monetary union (single market)*, dan *economic integration*.¹⁰ ASEAN harusnya sudah sampai tahap lima, tahap dimana AEC bisa berjalan maksimal pada 2015 nanti. Berkaitan dengan itulah, integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dalam AEC menjadi penting bagi keberhasilan model integrasi ekonomi regional dalam bentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP)* yang ditawarkan ASEAN dengan Indonesia sebagai promotor utama kepada mitra dialog mereka.¹¹ Dengan kata lain, perwujudan AEC merupakan keniscayaan dan berperan vital dalam strategi geoekonomi Indonesia, dan ASEAN di kawasan.

ASEAN Political and Security Community

Walaupun ASEAN tidak pernah dirancang sebagai aliansi pertahanan atau keamanan, akan tetapi tidak bisa dihindari bahwa fungsi utama berdirinya ASEAN adalah untuk meningkatkan keamanan regional dalam menghadapi ancaman agresi dari luar kawasan.¹² Dewasa ini ancaman keamanan mulai beralih kepada ancaman non-konvensional yang datangnya dari dalam kawasan ASEAN sendiri, seperti separatisme, terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dll.

Untuk itu, APSC nantinya harus mampu menjawab tantangan non-konvensional ini dengan bekerja sama membuat *task force* antar sesama negara ASEAN untuk menanggulangi ancaman model baru tersebut. Menggalakkan ikatan keamanan yang lebih dekat antar sesama negara ASEAN, dengan kerangka kerja yang lebih terpadu, akan membuat negara-negara ASEAN mampu meningkatkan kemampuan pertahanan

¹⁰ BelaBalassa. 1962. *The Theory of Economic Integration*. UK: George Allen & Unwin. Hlm. 12.

¹¹ Rizal A. Djaafara, dkk (ed). 2012. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*. Jakarta: Bank Indonesia. Hlm. 9.

¹² Dewi Fortuna Anwar. *ASEAN's Enlargement: Political, Security, and Institutional Perspectives*, dalam Mya Than dan Carolyn L. Gates (ed). 2001. *ASEAN Enlargement: Impacts and Implications*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hlm. 33.

kolektifnya dan memperkuat posisi tawar ASEAN terhadap para *major powers* di dunia. Hal ini akan membantu menambah rasa percaya diri ASEAN secara regional, serta membentuk identitas tunggal ASEAN.

Di sini peran dan partisipasi masyarakat bisa digalakkan melalui sistem sadar keamanan lingkungan. Maksudnya adalah, setiap masyarakat mengerti perannya sebagai seorang anggota masyarakat yang memiliki kewajiban menjaga lingkungannya dari ancaman kejahatan. Beberapa contoh yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan *neighbourhood watch* (seperti siskamling di Indonesia). Pemeriksaan identitas bagi warga baru, tugas jaga malam, sampai pengurusan surat-surat kependudukan adalah beberapa contoh tugas *neighbourhood watch*. Cara ini dapat digunakan sebagai deteksi dini ancaman terorisme atau tindak kejahatan, karena semakin warga mengenal tetangganya, semakin minim pula kesempatan orang asing yang akan bertindak tidak baik untuk menginfiltasi komunitas masyarakat tersebut.

Deteksi dini ancaman terhadap negara, yang mana pengukurannya dimulai dari kesiapan seluruh warga negara di semua tingkatan, merupakan langkah awal optimalisasi konsep *human security*. APSC harus berjalan berdasarkan kesiap-siagaan masyarakat terkait ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, berfungsi normalnya semua infrastruktur maupun suprastruktur politik membantu masyarakat dalam berpartisipasi di setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

ASEAN Socio-Cultural Community

Dibentuknya ASCC, dengan tidak adanya istilah warga negara ASEAN, bertujuan untuk menciptakan sebuah keinginan untuk tinggal bersama (*we feeling*). Dengan demikian, salah satu sasaran utama dari ASCC adalah untuk menjaga dan memajukan warisan budaya

dan identitas regional ASEAN.¹³ Mengapa warisan budaya? ASEAN kaya akannya, contohnya Angkor Wat di Kamboja, Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo di Indonesia, Taman Gunung Mulu dan Kinabalu di Malaysia, Kota Bersejarah Ayutthaya di Thailand, dll.¹⁴

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya menjadi esensial karena terkait dengan nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat. ASCC dapat mengupayakan partisipasi masyarakat yang maksimal di sektor pariwisata. Warisan-warisan budaya di ASEAN memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, sehingga mengundang banyak turis non negara ASEAN untuk berkunjung. Sinergi antara masyarakat dengan otoritas lokal maupun nasional penting untuk dikembangkan agar sektor pariwisata dapat menjadi *leading sector* di ASEAN, menyambut *ASEAN Community 2015* pastinya.

Menarik ketika bicara sosial dan budaya, kita memasukkan peran pemuda di sana. Upaya memasyarakatkan ASEAN di tingkat rakyat (*grass root*) harus berujung tombakkan pemuda. Pemuda ditantang untuk menghidupkan semangat ASEAN. Salah satu contoh praktis keterlibatan pemuda adalah dengan mengadakan konferensi antarapemuda di kawasan ASEAN yang bias digunakan sebagai ajang pengenalan budaya, sekaligus juga sebagai forum diskusi untuk membahas isu-isu social kemasyarakatan dan budaya yang muncul di kawasan ASEAN. Hasil dari konferensi ini adalah dibuatnya sebuah media khusus pemuda ASEAN, baik cetak maupun online, dengan tujuan menjangkau seluruh kalangan pemuda di ASEAN.

Selain itu, program-program sukarelawan (*volunteer*) seperti pada *ASEAN Young Professionals Volunteer Corps Programme* yang diadakan untuk meningkatkan peran dan kontribusi pemuda di ASEAN di bidang sosial budaya dan pengembangan ekonomi kawasan juga harus dikembangkan. Program ini

¹³ Laurence Henry. *The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism*, *European Law Journal*, Vol. 13, No. 6 (2007). Hlm. 874.

¹⁴ UNESCO. *World Heritage List*. Diakses dari <http://whc.unesco.org/en/list/> pada tanggal 27 Juli 2013.

mengandalkan para pemuda untuk terlibat dalam membangun sumber daya masyarakat lokal, pencegahan bencana dan penyakit, serta apapun kontribusi yang bisa diberikan oleh para pemuda bagi ASEAN.¹⁵

Partisipasi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk pilar ASCC memang perlu dikembangkan lagi agar ASCC benar-benar bisa bergantung pada partisipasi masyarakat. Selain *volunteer*, peran media, terutama media sosial, sangat berperan penting. Tidak hanya pada bidang sosial budaya sebenarnya, peran media sosial sangat berguna dalam mempromosikan tiga pilar ASEAN kepada masyarakatnya sendiri. Era teknologi informasi membantu diseminasi ide tentang *ASEAN Community*, serta diharapkan dapat membangun identitas ASEAN.

Ke depan, identitas regional ASEAN tidak bisa hanya sekedar identitas budaya semata. Belajar dari Uni Eropa, di mana *European identity* dimaknai tidak hanya substansi budaya, tetapi juga memiliki konsep politik.¹⁶ Mengapa? Jika di Uni Eropa identitas ke-Eropaannya hanya dimaknai secara kultural, maka hanya identitas barat dan Kristen/Katolik yang ada di sana. Dalam perkembangannya, Uni Eropa mengalami perluasan (seperti juga ASEAN) dengan mempertimbangkan masuknya negara-negara Muslim, seperti Bosnia dan Herzegovina, serta Turki sebagai kandidat potensial untuk bergabung di Uni Eropa.¹⁷

Perluasan ASEAN membawa banyak keberagaman. ASEAN tidak hanya milik satu budaya atau kepercayaan. Heterogenitas ASEAN menjadi tantangan identitas ASEAN. Sebagai negara multikultur, yang mempraktekkan

¹⁵ ASEAN Centre for Biodiversity. ASEAN Young Professionals Volunteer Corps Programme. Diakses dari http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=539:call-for-applications-asean-young-professionals-volunteer-corps-programme&catid=1:news&Itemid=109 pada 26 Juli 2013.

¹⁶ Tomas Meyer. *European Identity*, dalam Reimund Seidelmann dan Andreas Vasilache (ed). *European Union and Asia: A Dialogue on Regionalism and Interregional Cooperation*. Munich: Nomos. Hlm. 103.

¹⁷ European Commission. *Enlargement*. Diakses dari http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm pada 27 Juli 2013.

toleransi yang baik, masyarakat Indonesia bisa menjadi pelopor kehidupan toleran di ASEAN. Walaupun berbeda-beda, dengan semangat nasionalisme, semua elemen di Indonesia bersatu padu demi identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Semangat ini harus ditularkan di ASEAN agar identitas ASEAN pun terbentuk dari keberagaman yang ada di dalam ASEAN itu sendiri.

Identitas sebagai warga ASEAN harus berdasar pada kokohnya budaya toleransi masing-masing negara, yang akan menopang *single ASEAN identity*. Selain itu, budaya politik demokrasi harus menjadi fundamen bagi implementasi Piagam ASEAN dan ketiga pilarnya, agar keberagaman ASEAN tadi dimaknai sebagai sebuah *political entity* yang menuju pada identitas satu ASEAN. *One Vision, One Identity, dan One Community*.

Penutup

Tantangan ke depan ASEAN untuk mewujudkan sebuah komunitas bersama tahun 2015 harus dilihat dari sisi positif. Walaupun keraguan muncul, upaya membentuk sebuah ASEAN *single entity* harus diapresiasi. Tiga pilar ASEAN akan sangat berpengaruh di sini. Tidak hanya sekedar mewujudkan 2015 ASEAN Community, tapi juga menjadi panduan bagi sebuah kawasan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain dunia di masa yang akan datang.

Komunitas adalah sebuah kekuatan yang berdasar pada masyarakat. Politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya merupakan pilar yang menyokong kekuatan itu. Eropa sudah buktikannya, sekarang saatnya Asia Tenggara. *Changes will come*, dan tugas ASEAN adalah untuk bersiap menghadapi perubahan-perubahan tersebut dengan berorientasi pada kekuatan masyarakatnya. Memasuki usia ke-46, ASEAN sudah *on the track* untuk mewujudkan mimpinya, yaitu 2015 ASEAN Community. *Happy birthday ASEAN*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. *ASEAN's Enlargement: Political, Security, and Institutional Perspectives*, dalam Mya Than dan Carolyn L. Gates (ed). 2001. ASEAN Enlargement: Impacts and Implications. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- ASEAN Centre for Biodiversity. ASEAN Young Professionals Volunteer Corps Programme. Diakses dari http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=539:call-for-applications-asean-young-professionals-volunteer-corps-programme&catid=1:news&Itemid=109 pada 26 Juli 2013.
- Balassa, Bela. 1962. *The Theory of Economic Integration*. UK: George Allen & Unwin.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Djaafara, Rizal A, dkk (ed). 2012. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- European Commission. *Enlargement*. Diakses dari http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm pada 27 Juli 2013.
- Henry, Laurence. *The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism*. *European Law Journal*, Vol. 13, No. 6 (2007).
- Kotler, Philip, dkk. 2007. *Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015*. Singapore: McGraw Hill.
- Meyer, Tomas. *European Identity*, dalam Reimund Seidelmann dan Andreas Vasilache (ed). *European Union and Asia: A Dialogue on Regionalism and Interregional Cooperation*. Munich: Nomos.
- UNESCO. World Heritage List. Diakses dari <http://whc.unesco.org/en/list/> pada tanggal 27 Juli 2013.

Prinsip Outward Looking dan Keterbukaan ASEAN Sebagai Penghambat Terciptanya Komunitas Keamanan Ideal

Tulisan ini memiliki argumen utama bahwa Komunitas Keamanan ASEAN tahun 2015 telah memiliki pondasi legal yang dapat menunjang pembentukan sebuah kawasan yang damai dan aman, namun tidak cukup kuat untuk mendukung penguatan solidaritas dan terciptanya identitas bersama. Tulisan ini akan terdiri dari 4 bagian yang diawali dengan pemaparan ideal mengenai bentuk komunitas keamanan, pondasi pembentukan Komunitas ASEAN, dilanjutkan dengan analisis kelemahan-kelemahan pondasi legal Komunitas ASEAN yang dapat menghambat terbentuknya sebuah komunitas keamanan, dan diakhiri dengan kesimpulan yang berisi rekomendasi strategi mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Pertama adalah bentuk komunitas keamanan, dalam hal ini adalah komunitas keamanan pluralistik, yang menurut Acharya merupakan kawasan transnasional yang terdiri dari kumpulan negara-negara berdaulat yang menjaga perdamaian kawasannya bersama-sama. Dalam hal ini, terdapat beberapa ciri penting yang membedakan komunitas keamanan dengan bentuk pengaturan keamanan lainnya¹.

Ciri pertama sebuah komunitas keamanan adalah ketiadaan perang dan ketiadaan persiapan perang antar anggotanya. Persiapan perang ini meliputi *arms race* dan *strategideterrence*. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran anggotanya untuk menjaga perdamaian dan adanya ekspektasi bahwa anggota lainnya akan berperilaku serupa sehingga dilema keamanan dalam komu-

nititas keamanan tersebut tidak terjadi. Selain itu, ketiadaan perang dan persiapan perang ini juga didukung dengan adanya mekanisme manajemen konflik dalam komunitas keamanan tersebut sehingga konflik dan perselisihan yang timbul diantara anggotanya dapat diselesaikan secara damai. Ketidadaan dilema keamanan menyebabkan persiapan perang antar anggota tidak lagi dibutuhkan dan keberadaan mekanisme manajemen konflik menyebabkan perang tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik².

Ciri kedua adalah kesadaran tentang kepentingan jangka panjang bersama untuk menjaga perdamaian yang kemudian menjadi dasar pembentukan komunitas sehingga mendorong berkembangnya kerja sama, integrasi, dan interdependensi antar anggotanya. Hal ini berbeda dengan rezim keamanan yang hanya mementingkan kepentingan dan kalkulasi jangka pendek sehingga mudah terpengaruh oleh perubahan internal dan eksternal³.

Ciri ketiga adalah ketiadaan penetapan sumber ancaman dan ketiadaan fungsi pertahanan bersama yang terorganisir. Komunitas keamanan lebih menekankan pada penjagaan kestabilan dan perdamaian kawasannya daripada penetapan respon bersama terhadap ancaman atau perilaku aktor eksternal. Dengan kata lain, komunitas keamanan berorientasi pada penggunaan operasi perdamaian dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik antar anggotanya daripada pembentukan pakta pertahanan atau pembentukan satuan militer gabungan untuk melawan ancaman dari

aktor eksternal⁴.

Ciri keempat adalah adanya proses multilateralisme yang intensif antar anggotanya dengan keanggotaan yang bersifat eksklusif dan tertutup. Hal ini penting karena sebuah komunitas keamanan terdiri dari negara-negara dengan identitas tertentu yang mendefinisikan 'kita' dan 'mereka' sehingga memperkuat solidaritas antar anggotanya dan melakukan eksklusi terhadap aktor-aktor di luar komunitasnya. Dalam hal ini, identitas bersama yang merupakan elemen inti dalam sebuah komunitas keamanan akan mendukung terciptanya kepentingan bersama dan meningkatkan *trust* antar anggota yang bertujuan untuk meniadakan dilema keamanan maupun potensi ancaman dalam komunitas. Karena itu, penguatan identitas kolektif, pengembangan norma komunitas, dan adanya institusi yang mewadahi proses interaksi diharapkan dapat menyebabkan negara anggotanya bersedia memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi⁵.

Sebagai sebuah institusi yang bercita-cita membentuk sebuah komunitas keamanan, ASEAN telah membangun 2 pondasi legal yang dapat menjadi dasar terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN yaitu Piagam ASEAN dan Deklarasi ASEAN *Concord II (Bali Concord II)*. Menurut Piagam ASEAN, Institusi ini terdiri dari 15 tujuan dan 14 prinsip. Dari 15 tujuan tersebut diantaranya adalah (1) menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan, (2) peningkatan daya tahan (*resilience*) kawasan melalui kerja sama dalam berbagai bidang, (3) peningkatan kemakmuran dan kualiti-

¹ Amitav Acharya, *Constructing A Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order* (London: Routledge, 2001), Hlm. 16-30.

² Amitav Acharya, *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

tas hidup bersama baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, (4) dukungan terhadap terciptanya *people oriented* ASEAN, (5) penciptaan identitas bersama melalui peningkatan kesadaran terhadap berbagai budaya yang berbeda di kawasan, dan (6) menjaga sentralitas dan peran proaktif ASEAN dalam relasi dengan aktor lainnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, ASEAN memiliki prinsip yang di antaranya adalah (1) penghormatan terhadap kebebasan, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional anggotanya, (2) komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kawasan yang stabil, aman, dan damai, (3) peniadaan *use of force* dalam relasi antar anggota, (4) penyelesaian perselisihan dengan damai, (5) pelarangan intervensi terhadap masalah domestik, (6) penghormatan terhadap perbedaan antar anggota dan penekanan terhadap nilai-nilai bersama dalam semangat 'persatuan dalam perbedaan', dan (7) sifat institusi yang *outward-looking*, inklusif, dan non-diskriminatif⁶.

Selain Piagam ASEAN, pondasi legal Komunitas ASEAN juga dipaparkan dalam Deklarasi ASEAN *Concord II (Bali Concord II)*. Deklarasi yang ditandatangani tahun 2003 ini mencetuskan berdirinya Komunitas ASEAN yang bersifat terbuka, dinamis, dan *resilient*. Secara lebih spesifik, *Bali Concord II* juga mengatur 6 ciri utama Komunitas Keamanan ASEAN. Pertama adalah adanya proses penanganan konflik kawasan yang dilakukan secara damai dengan kesadaran bahwa keamanan 1 anggota berhubungan dengan keamanan anggota lainnya di kawasan sehingga menjaga keamanan bersama menjadi penting. Penanganan konflik ini terdiri dari pencegahan melalui *Confidence Building Measures (CBM)* dan peningkatan transparansi, pembentukan norma bersama, pembentukan mekanisme resolusi konflik, dan *peace building* setelah konflik selesai. Kedua, membebaskan anggotanya untuk menentukan kebijakan luar negerinya

⁶ ASEAN Secretariat, *The ASEAN Charter* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hlm. 3-7.

dan membesakan negara anggota untuk memiliki aliansi atau pakta pertahanan dengan negara lain di luar komunitas. Ketiga, patuh terhadap prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, hukum internasional, dan Piagam ASEAN. Keempat adalah pemanfaatan ASEAN *Regional Forum (ARF)* sebagai forum utama untuk menciptakan kestabilan dan keamanan di kawasan yang lebih besar yaitu Asia Pasifik, dengan tetap mempertahankan status ASEAN sebagai aktor penggerak utama dalam forum tersebut. Kelima adalah implementasi dari sifat *outward looking*, ASEAN berperan aktif dalam mengembangkan relasi dan kerja sama keamanan dengan seluruh partner dialognya. Selain itu, ASEAN juga berusaha untuk bekerja sama dalam bidang keamanan komprehensif dengan institusi internasional lainnya. Hal ini penting untuk membantu ASEAN menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. Keenam, terus meningkatkan kepedulian antar sesama anggotanya serta menciptakan identitas bersama⁷.

Dari kedua pondasi legal pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN tersebut, dapat dianalisis kesesuaian elemen-elemen pondasi tersebut dengan ciri komunitas keamanan ideal yang telah dipaparkan dalam bagian teori sebelumnya.

Pertama adalah ketiadaan perang antar anggota ASEAN sejak berdirinya tahun 1967 walaupun eskalasi ketegangan masih terjadi antar anggotanya seperti sengketa blok Ambalat oleh Indonesia-Malaysia⁸ dan sengketa wilayah Preah Vihear antara Kamboja-Thailand⁹. Konflik yang terjadi antar anggotanya juga umumnya diselesaikan dengan cara damai yang dilakukan secara bilateral atau melalui jalur formal oleh institusi di luar ASEAN seperti *International Court of Justice*

⁷ ASEAN Secretariat, "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)", 2003.

⁸ TEMPO.CO, "Sengketa Ambalat", diakses dalam <http://www.tempo.co/topik/masalah/759/Sengketa-Ambalat>, pada 25 Agustus 2013, pukul 19.28 WIB.

⁹ BBC, "Preah Vihear temple: UN court hears Thailand-Cambodia dispute", diakses dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22149576>, pada 25 Agustus 2013, pukul 19.28 WIB.

(ICJ) yang menangani sengketa Sipadan-Ligitan oleh Indonesia-Malaysia maupun sengketa Preah Vihear. Dalam hal ini, ASEAN sebagai institusi tidak memiliki badan atau mekanisme formal penyelesaian konflik antar anggotanya sehingga dorongan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan pencegahan eskalasi konflik umumnya dilakukan pada pertemuan informal oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tidak bergerak di bawah institusi ASEAN. Hal ini terjadi karena negara-negara anggotanya ingin menjaga netralitas ASEAN sebagai institusi dan menjaga keutuhan institusi ini. Karena itu, walaupun kondisi ASEAN relatif aman dengan ketiadaan perang maupun persiapan perang, manajemen konflik dalam ASEAN umumnya masih berorientasi pada penghindaran konflik (*conflict avoidance*) dan bukan resolusi konflik¹⁰. Ketiadaan mekanisme resolusi konflik di ASEAN ini rentan menjadi masalah dalam pembangunan *trust* terhadap institusi ASEAN karena dianggap tidak mampu membantu mencapai kepentingan anggotanya yaitu penyelesaian konflik.

Kedua adalah keberadaan kepentingan jangka panjang yang dimiliki antar anggota ASEAN yaitu penjagaan keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan serta meningkatkan pembangunan, kemakmuran, dan kualitas hidup masyarakat negara-negara anggota. Tujuan ini menjadi dasar kerja sama ASEAN yang ditunjukkan dengan agenda-agenda pertemuan dalam ASEAN *Ministerial Meeting* seperti pemberantasan terorisme dan ASEAN *Free Trade Area (AFTA)*. Selain itu, salah satu tujuan ASEAN dalam Piagam ASEAN adalah penciptaan identitas bersama sehingga menjadi dasar penting pengembangan ASEAN menuju sebuah komunitas keamanan. Dalam hal ini, ASEAN telah memiliki tujuan jangka panjang yang ideal untuk menjadi sebuah komunitas keamanan.

Ketiga adalah ketiadaan aliansi dan pakta pertahanan dalam ASEAN, bahkan dalam *Bali Concord II*, ditegaskan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN

¹⁰ Amitav Acharya, hlm 48-51.

memiliki prinsip *comprehensive security* sehingga tidak memiliki perjanjian aliansi dan pakta pertahanan antar anggotanya. ASEAN juga menekankan pada penggunaan diplomasi sebagai cara penyelesaian dan pencegahan konflik yaitu melalui ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) tahun 2006 yang tidak hanya bertujuan untuk merumuskan resolusi konflik, namun juga melakukan pencegahan dan *peace building* pasca konflik walaupun pada praktiknya pertemuan tersebut masih berorientasi pada CBM¹¹. Ketiadaan fungsi pertahanan terorganisir ini sudah sesuai sebagai pondasi pembentukan komunitas, namun keadaan ini menimbulkan masalah saat anggota ASEAN memiliki fungsi pertahanan terorganisir dengan negara-negara lain di luar ASEAN.

Keempat adalah proses multilateralisme yang intensif antar anggotanya dengan keanggotaan yang bersifat eksklusif dan tertutup. Dalam hal ini, ASEAN telah menjalani proses multilateralisme yang cukup intensif yaitu lebih dari 30 jadwal pertemuan resmi tiap bulannya pada tahun 2013. Agenda pertemuan ini mencakup berbagai bidang baik politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak hanya dihadiri secara eksklusif oleh anggota ASEAN, namun juga dialog partnernya baik dalam ARF ataupun ASEAN+3¹². Namun demikian, ciri eksklusif dan tertutup diingkari oleh pondasi legal Komunitas ASEAN yaitu dalam Piagam ASEAN yang memamparkan prinsip ASEAN yang *outward looking* dan inklusif serta dalam *Bali Concord II* yang menekankan pentingnya peningkatan hubungan dan kerja sama dengan dialog partner ASEAN baik dalam ARF dan ASEAN+3 sebagai cara untuk menjamin keamanan kawasan. Ketiadaan dukungan ciri eksklusif dan tertutup ini berimplikasi pada sulitnya usaha penguatan dan pembentukan identitas dan penguatan solidaritas komunitas

ASEAN yang semakin dipersulit dengan keberadaan aktor eksternal yang memiliki hubungan kuat dengan negara-negara di ASEAN dan belum mapannya manajemen konflik di ASEAN.

Kesulitan pertama dalam memperkuat solidaritas dan membentuk identitas bersama adalah akibat banyaknya pengaruh aktor eksternal yang merupakan negara-negara *great power*. Lebih jauh lagi, aktor-aktor eksternal ini cenderung menggunakan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat persaingan pengaruh sehingga menyebabkan ASEAN terpecah. Misalnya adalah dalam perselisihan Laut Cina Selatan yang menyebabkan terpecahnya suara negara-negara ASEAN yaitu Kamboja yang mendukung Cina dan Filipina yang mendapat dukungan dari AS¹³. Hal ini diperparah dengan pondasi legal Komunitas ASEAN dalam *Bali Concord II* yang membebaskan pengadaan pakta pertahanan dan aliansi anggotanya dengan negara-negara lain sementara tidak memperbolehkan adanya fungsi pertahanan terorganisir dalam ASEAN. Keadaan ini menyebabkan negara *great power* seperti AS dapat memperdalam pengaruhnya di Asia Tenggara dengan pembentukan aliansi dan kerja sama keamanan dengan Filipina, Singapura, dan Thailand. Keadaan ini menjadi tantangan besar dalam penguatan solidaritas dan pembentukan identitas ASEAN karena aliansi tersebut dapat menjadi identitas dan kepentingan prioritas yang lebih utama bagi Singapura, Filipina, dan Thailand daripada ASEAN. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan negara-negara ASEAN yang memiliki pakta pertahanan dengan AS lebih memilih untuk mendukung kepentingan AS daripada menjaga solidaritas ASEAN.

Kesulitan kedua berasal dari keterbukaan ASEAN menyebabkan sulitnya pembangunan *trust* anggota terhadap institusi ASEAN. Belum adanya mekanisme resolusi konflik dan sifat penghindaran konflik yang dimiliki ASEAN menyebabkan ASEAN tidak da-

pat menyelesaikan sengketa atau konflik antar anggotanya. Hal ini mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari institusi lain yang lebih mapan untuk menyelesaikan masalahnya misalnya ICJ atau negara aliansinya. Keberadaan prinsip keterbukaan ini menyebabkan negara-negara ASEAN bebas untuk membangun *trust* dengan institusi lain yang lebih mapan dan semakin memperkecil *trust* mereka terhadap ASEAN yang dianggap tidak dapat memberikan resolusi konflik bagi anggotanya.

Ketiga adalah adanya sifat inklusivitas dan *outward looking* yang ditunjukkan dengan pemanfaatan aktor-aktor eksternal untuk mendukung kestabilan dan keamanan kawasan seperti yang tertulis dalam *Bali Concord II*. Hal ini juga menunjukkan kurangnya *trust* anggotanya terhadap kemampuan institusi untuk menciptakan perdamaian di kawasan secara mandiri. Garis pembatas antara 'kita' dan 'mereka' menjadi sulit dibuat karena ASEAN membutuhkan kontribusi 'mereka' untuk mencapai kepentingan 'kita'. Kebutuhan ini menyebabkan pengaruh *power* eksternal di kawasan sebagai luas karena adanya kebutuhan dari ASEAN sendiri yang pada akhirnya menyebabkan ASEAN semakin tergantung dengan *power* eksternal dan semakin sulit memperkuat *trust* antar anggotanya sehingga pembentukan identitas kolektif semakin tidak mungkin dilakukan.

Sebagai kesimpulan, keberadaan prinsip keterbukaan ASEAN yang bertolak belakang dengan ciri komunitas keamanan yang eksklusif dan tertutup bisa didukung dengan argumen bahwa ASEAN hendak membangun sebuah komunitas berdasarkan "ASEAN Way" sehingga tidak merujuk pada teori pembentukan komunitas. Namun demikian, keberadaan prinsip tersebut ditambah dengan belum mapannya ciri komunitas lainnya pada akhirnya dapat menjadi penghambat penguatan solidaritas dan pembentukan identitas, norma, dan nilai bersama. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari aktor eksternal, adanya kecenderungan untuk membangun *trust* pada aktor atau insti-

¹¹ ASEAN Defence Ministers Meeting, "About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)", diakses dalam <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/2013-01-22-10-51-17.html>, pada 25 Agustus 2013, pukul 19.42 WIB.

¹² ASEAN Secretariat, "Official Meetings 2013", diakses dalam <http://www.asean.org/calendar/official-meeting>, pada 25 Agustus 2013, pukul 19.43 WIB.

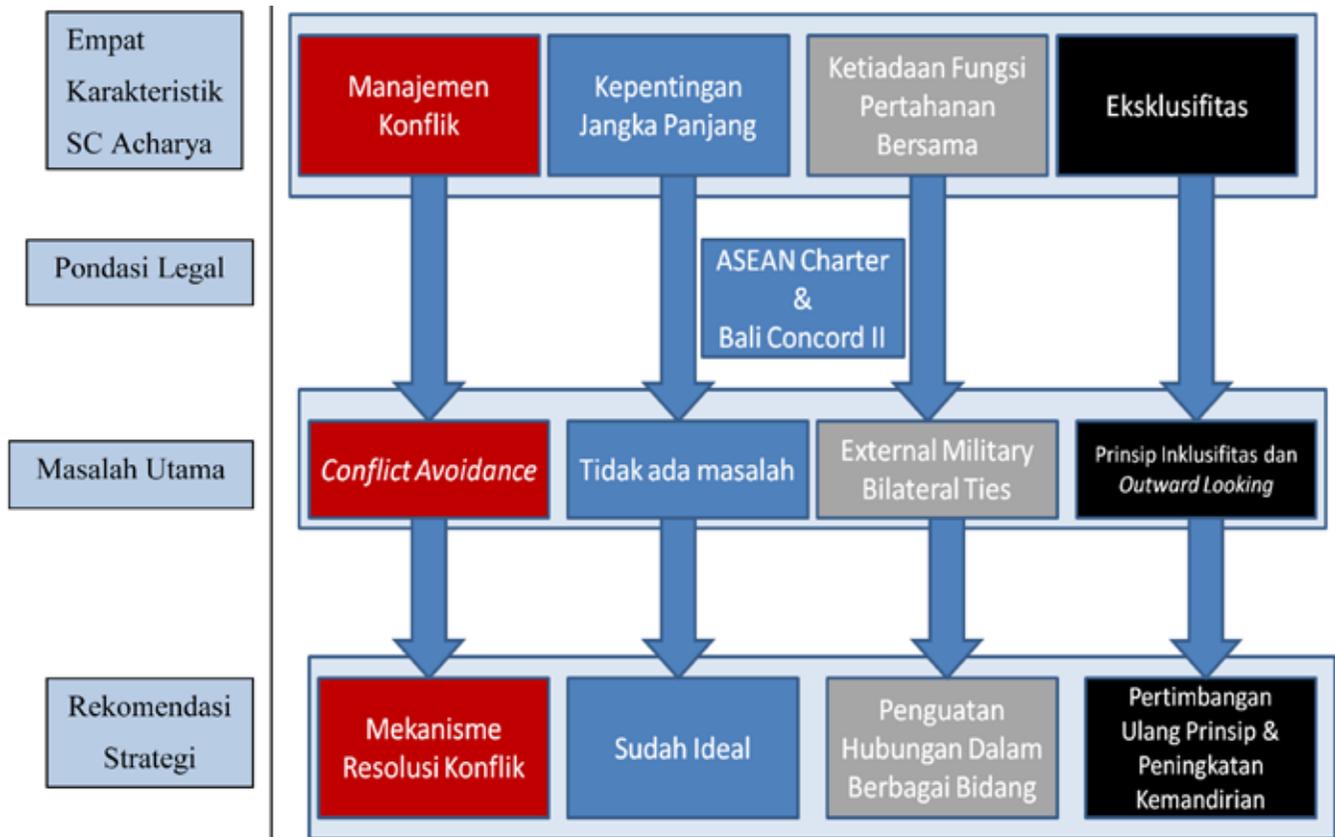
¹³ Luke Hunt, "Can ASEAN Unite on South China Sea?", diakses dalam <http://thediplomat.com/asean-beat/2012/11/17/can-asean-unite-on-south-china-sea/>, pada 25 Agustus 2013, pukul 19.45 WIB.

tusi yang lebih mapan daripada ASEAN, dan ketidakmampuan ASEAN untuk menjadi institusi yang mandiri dalam mencapai tujuannya. Karena itu, rekomendasi utama dalam mempersiapkan ASEAN menuju sebuah komunitas keamanan adalah untuk melakukan kalkulasi untung-rugi (*cost-benefit calcula-*

tion) kembali dalam penerapan prinsip inklusif dan *outward looking*. Di samping itu, ASEAN juga perlu mulai merumuskan mekanisme resolusi konflik untuk memperkuat *trust* anggotanya terhadap institusi ASEAN, mempererat hubungan militer, ekonomi, dan sosial antar negara sehingga ASEAN dapat tetap

menjadi identitas dan kepentingan prioritas bagi negara-negara anggotanya walaupun mereka memiliki pakta pertahanan dengan negara lain di luar ASEAN, dan meningkatkan kemandirian ASEAN dalam mencapai tujuan penjagaan keamanan, kestabilan, dan perdamaian kawasan.

Bagan Alur Pemikiran



Budaya Komunikasi dan Manajemen Bisnis Vietnam



utc.edu

Bangsa Vietnam dalam perjalanan sejarahnya adalah bangsa yang memiliki kerja keras untuk belajar konsep-konsep manajemen dan berani berkorban untuk nilai tambah yang nyata. Mereka ingin meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Sedangkan konflik bersenjata dan Ideologis antar sesama di masa lampau merupakan pemborosan dan memakan biaya sosial yang besar. Mereka benar-benar ingin keluar dari kemiskinan dan penderitaan. Dalam pikiran kaum Intelektual mereka terungkap bahwa sama seperti halnya negara-negara Asia lainnya, jalan menuju kebebasan politik adalah melalui kebebasan ekonomi (*the road to po-*

litical freedom is economic freedom).

Dengan adanya reformasi ekonomi Vietnam yang dikenal sebagai Doi Moi (reformasi ekonomi) menandakan suatu awal transformasi ekonomi Vietnam dari suatu ekonomi perencanaan terpusat ke suatu ekonomi pasar. Dalam hal ini, mereka ingin membangun suatu "*socialist market economy*". Reformasi itu meliputi langkah-langkah liberalisme perdagangan, lalu-lintas mata uang di Vietnam, dibukanya pembukaan bank asing dan Investasi asing langsung.

Disamping itu, kebanyakan bisnis Vietnam merupakan bagian integral dari keluarga dengan kepala keluarganya yang berfungsi sebagai pemilik me-

rangkap manajer puncaknya, sama halnya dengan mayoritas bisnis di negara-negara ASEAN. Operasi bisnis Vietnam tidaklah bebas dari pengaruh budaya, agama dan lintas budaya sekalipun tidak tampak secara eksplisit.

Budaya Komunikasi Masyarakat Vietnam

Kebudayaan bangsa Vietnam berdasarkan kehidupan ekonomi pertanian yang tergantung satu sama lain. Masyarakat Vietnam saling menghormati untuk menjaga hubungan yang bagus dalam masyarakat. Hal ini akhirnya membentuk sebuah budaya komunikasi. Untuk bangsa Vietnam, budaya adalah sebuah sistem material (jasmani) dan

spiritual (rohani) nilai-nilai yang dibuat dan disimpulkan lewat proses kerja di dalam kehidupan. Budaya mempunyai dua karakteristik fundamental (dasar), yaitu karakter sistematis dan karakter nilai.

Pertama; karakter sistematis membantu mereka menemukan hubungan yang sangat dekat di antara peristiwa dan aktivitas di dalam sebuah budaya. Oleh karena sistematis, budaya sebagai entitas mencakup semua aktivitas di dalam masyarakat untuk memenuhi fungsi organisasi masyarakat. Jadi, budaya dipertimbangkan sebagai dasar masyarakat.

Kedua; karakter nilai mempunyai dua nilai yaitu material (untuk memenuhi permintaan material) dan spiritual (untuk memenuhi permintaan spiritual). Nilai ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu nilai yang abadi (*long lasting value*) dan nilai yang cepat pudar (*non-lasting value*).

Budaya dapat digambarkan seperti sebuah “tali” yang menghubungkan orang satu sama lain. Hal ini dilakukan lewat bahasa. Bahasa adalah salah satu sarana komunikasi dan budaya adalah isi bahasa (menyampaikan nilai-nilai material dan spiritual kepada orang-orang). Seperti yang tersebut di atas, bangsa Vietnam sangat menghormati hubungan antar individu di dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat Vietnam sangat menghormati komunikasi, dan oleh karena itu mereka sangat suka berkomunikasi. Untuk menjaga silaturahmi, masyarakat Vietnam punya kebiasaan mengunjungi satu sama lain. Ini dapat dilihat pada masing-masing masyarakat di bangsa ini walaupun setiap hari mereka saling bertemu tetapi kalau mereka mempunyai waktu luang, mereka selalu ingin bertemu dan saling mengunjungi. Kunjungan mungkin tidak berarti untuk bekerja (kepentingan bisnis) tetapi ini hanya untuk menunjukkan perasaan kedekatan untuk mempererat hubungan silaturahmi.

Bagi objek komunikasi, orang Vietnam mempunyai keramah-tamahan dalam komunikasi. Ini juga bisa dilihat

pada bagaimana mereka menerima tamu, mereka akan menjamu tamu dengan sebaik mungkin. Sikap ini kuat sekali terutama di desa-desa. Meskipun suka berkomunikasi, masyarakat Vietnam sangat malu untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Ketika pertama kali bertemu dengan orang lain yang belum dikenal, orang Vietnam ragu-ragu untuk memulai komunikasi, bahkan takut, hal ini akan sedikit teratasi kalau komunikasi sudah dimulai, atau mereka sudah merasa dekat dengan orang itu.

Dengan obyek komunikasi, orang Vietnam mempunyai kebiasaan suka mencari informasi dari orang lain untuk menilai orang lain. Dalam berkomunikasi, maka terlihat bahwa orang Vietnam terlalu ingin tahu (*curious*), bahkan aneh untuk orang asing. Tetapi, karakteristik ini adalah hasil yang lahir dari semangat. Di dalam masyarakat, orang Vietnam bertanggung jawab merawat orang lain, untuk dapat bersikap kepada orang lain sebaik-baiknya, mereka ingin tahu dan mengerti keadaan orang lain. Semangat masyarakat menyebabkan orang Vietnam sangat menghagai kehormatan (*kehormatan lebih baik daripada pakaian yang bagus*) gejala ini bisa dilihat di mana-mana di Vietnam. Oleh karena itu, orang Vietnam selalu berusaha meningkatkan status sosial mereka sendiri: makin “tinggi” makin

“bergengsi”.

Pada umumnya, orang Vietnam tidak bertanya atau berbicara atau berbicara langsung tentang hal yang ingin mereka ketahui, tetapi berbicara tentang hal lain sebelumnya. Pembicaraan biasanya dimulai dengan basa-basi. Dengan cara komunikasi ini, orang Vietnam mempunyai kebiasaan berhati-hati ketika berbicara, sehingga tidak selalu bisa memutuskan dengan cepat. Biasanya, untuk menghindari pembuat keputusan mereka hanya tersenyum. Senyuman adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi (*ini mungkin gejala yang sama dan yang populer di masyarakat Asia*).

Interaksi dan komunikasi di masyarakat Vietnam sangat berdasarkan budaya dan kebiasaan, mungkin, kehidupan masyarakat dan ekonomi pertanian membuat orang-orang saling tergantung. Dengan demikian, orang harus saling membantu. Ini bisa dilihat di negara-negara yang menganut sistem agraris, khususnya di Asia. Akan tetapi, hal ini juga menjadi halangan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lain karena masing-masing masyarakat mereka sendiri supaya lebih baik daripada masyarakat lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi yang dibangun dari semangat masyarakat pertanian. (Sumber : KBRI Hanoi)



bp.blogspot.com

Do's dan Don'ts di Thailand

Masyarakat Thailand terkenal dengan toleransi dan keramahannya sehingga para pelancong tidak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan kebiasaan lokal Thailand. Namun demikian sebagai pendatang tentunya perlu berhati-hati untuk menghindari ketersinggungan dengan masyarakat lokal secara tidak sengaja. Berikut ini ada beberapa tip dalam menyikapi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Thailand.

Masyarakat Thailand sangat menjunjung tinggi keluarga kerajaan sehingga pengunjung harus berhati-hati dalam menunjukkan penghormatan kepada Yang Mulia Raja, Permaisuri dan putra putri kerajaan. Contohnya, dalam gedung bioskop, para pengunjung diwajibkan untuk berdiri ketika himne kerajaan dinyanyikan. Saat menghadiri kegiatan publik yang dihadiri oleh anggota kerajaan, kita harus melihat orang setempat dan mengikuti apa yang dilakukan mereka.

Hukum di Thailand memuat mengenai pelanggaran agama yang tidak hanya mencakup agama Budha sebagai agama mayoritas tetapi juga kepercayaan lainnya di Thailand. Komentar yang bersifat mengejek dan perilaku vandalisme terhadap rumah ibadah dan tempat suci lainnya dianggap melanggar hukum. Selain itu membuat keonaran dan gangguan pada kegiatan ibadah dan perayaan keagamaan juga dinilai melanggar hukum.

Beberapa hal ini merupakan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat ibadah:

- Semua ikon Budha baik besar, kecil, utuh maupun rusak dianggap suci. Dilarang untuk menaiki atau melakukan tindakan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap benda-benda tersebut.
- Berpakaian harus sopan dan pan-

tas. Tidak boleh pergi ke kuil dalam keadaan tidak mengenakan atasan atau menggunakan celana pendek. Celana dianggap tidak pantas digunakan wanita di dalam kuil. Petugas di kuil dapat dimintai keterangan mengenai cara berpakaian dan berperilaku di kuil.

- Dapat menggunakan sepatu di saat berjalan-jalan di sekitar kuil tetapi tidak diperbolehkan saat berada di dalam kuil yang merupakan tempat penyimpanan patung Budha.
- Pendeta Budha dilarang menyentuh atau disentuh perempuan atau menerima benda secara langsung dari wanita. Jika wanita ingin memberikan sesuatu, dia perlu memberikan kepada pria yang selanjutnya akan menyerahkan kepada pendeta.
- Kalau wanita ingin memberikannya sendiri, pendeta akan meletakkan jubah atau sapu tangan sehingga wanita itu meletakkan barang tersebut.
- Masyarakat Thailand biasanya tidak berjabat tangan saat mereka bertemu sebaliknya mereka membuat gerakan yang disebut Wai. Salam yang disampaikan bukan sapaan semata, namun juga sebagai simbol kalimat seperti, halo, terima kasih hingga minta maaf. Cara menyampaikan salamnya dimulai dari mengatupkan kedua telapak tangan, dengan kepala menunduk dan sentuhkan ujung-ujung jari pada hidung. Khusus untuk wanita, saat menunduk, lutut harus sedikit ditekuk ke bawah dan mengucapkan Sawatdi. Tradisi Wai sebenarnya terbagi lagi ke dalam tiga tingkatan. Wai saat menyembah patung Budha atau menyapa pendeta Budha, pada orang yang dituakan atau disegani dan pada orang seumur atau memiliki status sosial yang sama.
- Tidak memperkenankan menggunakan kaki untuk menunjuk orang dan

tidak memperkenankan memegang kepala orang bahkan dalam gerakan yang bersahabat.

- Memperlihatkan kemesraan di depan publik apalagi berciuman akan dipandang tidak baik.
- Kehilangan kesabaran di depan umum akan dianggap tidak memiliki tata krama. Sebaiknya tetap tenang, sopan dan tidak bersuara keras.
- Jangan heran kalau anda akan dipanggil dengan nama depan dan bukan nama belakang contohnya Tuan Bob, Nona Santi.

Saran bagi pengunjung saat tiba di bandara

- Gunakan layanan transportasi dari bandara ke kota yang terakreditasi.
- Apabila memerlukan bantuan akomodasi agar menghubungi *Thai Hotel Association counter* di pintu kedatangan.
- Hindari orang yang tidak mendapat otorisasi untuk menawarkan jasa sebagai *guide*. Sebaiknya pilihlah agen perjalanan yang dapat dipercaya atau *Tourism Authority of Thailand (TAT)*
- Sebaiknya menggunakan taksi yang tersedia di bandara dan hotel-hotel.
- Informasi perjalanan *TAT counter* di terminal 1 (Tel. 523-8972-3), terminal 2 (535-2669), atau kantor pusat di Ratchadamnoen Nok Ave. (282-9775-6), dan kantor lainnya di Bumrung Muang Rd. (266-0075-6).
- Untuk bantuan dengan keamanan dan praktek bisnis yang tidak etis dapat menghubungi *Tourist Assistance Center* di Bangkok di 281-5051 atau 282-8129 atau *Tourist Police* di 255-2964-8 atau 255-1699.
- Sama halnya dengan Indonesia, hukuman penyalahgunaan obat terlarang sangat berat di Thailand, sehingga perlu dihindari. (Sumber : Tourismthailand.org)

**APA
KATA
MEREKA**



Hadapi AEC 2015 Indonesia Perlu Meningkatkan SDM dan Daya Saing Produk

Memasuki gerbang Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada 2015, Indonesia wajib memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan daya saing produk (barang dan jasa) supaya lebih kompetitif. Keunggulan ini dapat tercapai bila bangsa Indonesia mampu menghasilkan karya bermutu.

Indonesia bisa tergilas berbagai produk impor dari negara anggota ASEAN dan hanya menjadi penonton atas banjirnya produk impor ke pasar dalam negeri apabila daya saing produk negara ini lemah.

Karya bermutu bisa dihasilkan jika dapat memenuhi atau melebihi persyaratan untuk menembus pasar global, melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan serta berdaya saing dalam globalisasi perdagangan termasuk standarisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi.

Standarisasi dapat menjadi pendorong dan pijakan inovasi. Persyaratan yang telah ditetapkan dalam sebuah

standar akan memudahkan bagi para inovator untuk mengidentifikasi nilai tambah yang dikehendaki pasar.

Karya inovatif harus dibuktikan secara obyektif dengan melibatkan kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi dan sistem akreditasi untuk memastikan kompetensi pelakunya yang tercakup dalam kegiatan penilaian kesesuaian.

Sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus dapat membuktikan pengaruhnya dalam keterlibatan di KEA dan membawa kekuatan di dalam mewujudkan cita-cita ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang kuat di dunia.

Bayu Krisnamurthi
Wakil Menteri Perdagangan

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 Perlu Penguatan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Peluang

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015 bukan merupakan kondisi yang akan terjadi secara tiba-tiba. Saat ini implementasinya sudah berjalan meskipun belum menyeluruh. Dalam beberapa kajian maupun riset internasional, perdagangan bebas ASEAN sudah mencapai 80%. Karena itu, penguatan daya saing untuk memaksimalkan peluang adalah hal yang lebih esensial, karena KEA 2015 mau tidak mau harus dihadapi. Terlebih dari sisi produk tertentu, Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain.



Ada beberapa hal yang bisa dijadikan peluang, misalnya 350 juta penduduk negara ASEAN di luar Indonesia bisa menjadi pasar yang besar. Jika untuk menembus pasar Singapura dan Malaysia masih sulit, masih ada Myanmar, Laos,

Kamboja, dan Vietnam.

Para pelaku usaha tidak perlu khawatir jika Indonesia menjadi sasaran ekspor negara lain. Industri tanah air sudah lebih dahulu maju dan mampu bersaing dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Contohnya PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang telah mengembangkan sektor otomotif sejak 1976 dan menjadi andalan ekspor nasional. Selain itu, masih banyak produk ekspor seperti alas kaki, alat elektronik, dan produk digital yang unggul.

Daerah utama seperti Jakarta, sudah siap dengan KEA 2015. Namun, ada be-

berapa daerah lain yang masih belum setara. Untuk itu kami akan mempersiapkan beberapa tindakan untuk menambah perlindungan.

Tantangan terbesar masih terletak pada sektor jasa yang terbagi atas pendukung produk dan pengiriman. Untuk hambatan yang pertama, pengusaha Indonesia terutama sektor kecil dan menengah harus membayar biaya lebih tinggi 10% dibandingkan dengan negara ASEAN lain.

Biaya tersebut dipengaruhi oleh pengurusan bermacam sertifikasi dan labelisasi. Salah satu pendukung yang belum dimaksimalkan adalah Surat Keterangan Asal (SKA). Dokumen pendukung ekspor tersebut bisa memberikan manfaat berupa preferensial tarif sehingga lebih mudah diterima pasar tujuan.

Terlebih sekarang sudah ada *self certification*, jadi bisa membuat SKA sendiri tanpa harus datang ke instansi manapun. Kami juga menyediakan *National Single Window*, jadi pengurusan izin ekspor bisa dilakukan dimanapun secara *online*.

Adapun hambatan jasa yang kedua yakni pengiriman produk nasional yang sebagian besar atau 95% masih menggunakan jasa pengapalan asing. Masalah struktural tersebut harus bisa diatasi sebelum 2015.

Kita perkirakan komponen daya saing dimasa mendatang untuk produk hanya 30%, sedangkan 70% merupakan komponen jasa. Perusahaan yang bisa memberikan layanan terbaiklah yang akan mampu memenangkan persaingan di ASEAN.

Gusti Muhammad Hatta
Menteri Riset dan Teknologi



Langkah Dan Kebijakan Lintas Sektorial Untuk Menghadapi AEC 2015

Pemerintah menetapkan sembilan sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang.

Pemberlakuan KEA 2015 akan memberikan tantangan bagi Indonesia, terutama mengingat pasar Indonesia yang besar akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya.

Sembilan sektor industri yang akan dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN, yaitu industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), olahan ikan, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan tujuh industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri antara lain industri otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta juga furnitur.

Pemerintah mengambil beberapa langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektorial untuk menghadapi KEA 2015, antara lain mengintensifkan sosialisasi KEA kepada pemangku kepentingan di sektor industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan *safeguard* dan *anti-dumping* bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri.

Pemerintah juga menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan UKM dan pengembangan wirausaha baru industri.

KEA 2015 juga akan memberikan peluang kepada Indonesia untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional. Peluang yang bisa dimanfaatkan tersebut antara lain populasi penduduk ASEAN yang berjumlah 590 juta jiwa.

KEA 2015 juga dapat lebih mendorong arus masuk investasi ke dalam negeri serta membentuk *joint venture* untuk memudahkan akses bahan baku sektor industri.

Ansari Bukhari
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN

IWAN SUYUDHIE AMRI



Profil Buletin Komunitas ASEAN kali ini akan menampilkan Iwan Suyudhie Amri yang merupakan salah satu pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Sebelum diangkat menjadi Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN pada tahun 2012 lalu, Iwan Amri (begitu sapaannya) bertugas di Kedutaan Besar RI di Beijing sebagai *Minister Counsellor* pada tahun 2007-2011. Karier diplomatik dan penugasan di luar negeri lainnya yaitu pernah ditempatkan sebagai Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York pada tahun 1994-1998 dan Sebagai Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap RI di Jenewa pada tahun 2001-2004. Sepanjang karir diplomatiknya, Iwan Suyudhie Amri aktif memperkuat delegasi Indonesia pada berbagai perundingan di tingkat multilateral, regional maupun bilateral dan

sangat menguasai isu-isu terkait kerja sama ekonomi dan sosial. Pada tahun 2003, Iwan Suyudhie Amri menjadi Ketua Kelompok Asia untuk *Working Group Level, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, Juni-Desember 2003.

Iwan Amri mengawali kariernya sebagai staf pada Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri pada tahun 1980-1989. Pada tahun 1989 Iwan Amri mengikuti pendidikan Sekolah Dinas Luar Negeri bagi para diplomat muda dan mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Kerja Sama Teknik Negara Berkembang dan Kerja Sama Utara-utara pada Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri. Pada tahun 1998-2001, Iwan Amri dipercayakan menjadi Kepala Seksi Kegiatan Operasional PBB bagi Pembangunan, Direktorat Jenderal Multilateral. Pada tahun 2004-2007, Iwan Amri diangkat men-

jadi Kepala Sub Direktorat Riset Organisasi Multilateral, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Pendidikan kedinasan lanjutan yang diikuti yaitu *Mid-Career Foreign Service Course, Ministry of Foreign Affairs*(1999) dan *Senior Foreign Service Course, Ministry of Foreign Affairs* (2005).

Iwan Amri lahir di Kuningan Jawa Barat tanggal 9 September 1959, menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Iwan Amri menyandang gelar S1 Jurusan Administrasi Publik Universitas Moestopo, Jakarta.

Sebagai Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, tentunya keseharian tugas Iwan Amri terkait erat dengan perkembangan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terutama rencana pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dicanangkan pada tanggal 31 Desember 2015. Berikut ini beberapa pandangan dari Iwan Amri mengenai persiapan Indonesia dalam menyambut Komunitas ASEAN 2015 dan manfaat dan peluang Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 bagi Indonesia.

Menurut pandangan Bapak, apa arti penting dari Komunitas Ekonomi ASEAN?

Sebelum bicara lebih jauh mengenai Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015, kita perlu menempatkan KEA dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai bagian dari upaya pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Pada tahun 2003, melalui *Bali Concord II*, para Pemimpin ASEAN telah menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN melalui tiga pilar, yaitu Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Bagi Indonesia, integrasi ASEAN sejalan dengan kepentingan nasional dan UUD '45. Sejak awal berdirinya NKRI, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan integrasi kawasan.

Tergabung dalam *MAPHILINDO*

(Malaysia-Philippines-Indonesia) yang dibentuk tahun 1963, Indonesia menekankan pentingnya perluasan kerja sama di Asia Tenggara, baik terkait jumlah negara maupun sektor yang dikerjasamakan. Usulan perluasan tersebut, yang juga disampaikan oleh Presiden ke-2 RI dalam Sidang Umum MPR tahun 1966, ditujukan untuk menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan demi pertumbuhan ekonomi. Setahun berselang, aspirasi Indonesia tersebut kemudian tertuang dalam kesepakatan pembentukan ASEAN pada tahun 1967.

Dalam perkembangannya, tiga dasawarsa pasca pembentukan ASEAN, perekonomian negara-negara ASEAN dihantam Krisis Finansial Asia. Di tahun 1997, Indonesia mencatat minus pertumbuhan ekonomi di angka -13%, padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1990—1997 berada di kisaran 6,9%. Sementara di sisi lain, RRT, dan India meraih kebangkitan ekonomi dan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Kebangkitan kedua negara tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN secara individu.

Sehubungan dengan hal itu, integrasi ekonomi sepuluh negara anggota ASEAN dipandang penting guna meningkatkan daya tawar, daya saing, dan daya tarik ASEAN *vis-à-vis* RRT dan India. Pada tahun 2007, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan KEA yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. Percepatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan penurunan biaya produksi di ASEAN yang diperkirakan dapat mencapai 20%, peningkatan kemampuan daya saing kawasan ASEAN, dan penyelarasan pencapaian *Millenium Development Goals 2015*.

Sesungguhnya KEA merupakan integrasi ekonomi yang prosesnya telah berlangsung hampir empat dasawarsa, dimulai dari pengesahan *Preferential Tariff Arrangement/PTA* (1977), kemudian *Common Effective Preferential Tariff ASEAN FTA/CEPT-AFTA* (1992), hingga *ASEAN Trade in Goods*

“Upaya mengintegrasikan ekonomi ASEAN telah memperlihatkan tren positif sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kajian *Economic Research Institute of ASEAN and East Asia* (ERIA) yang berjudul *Challenges Ahead but High Hopes Remain for ASEAN and AEC Beyond 2015*.”

Agreement/ATIGA (2009) dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA* (2009). Sementara itu, tahun 2003 dipandang sebagai titik kulminasi, pernyataan politik para Pemimpin ASEAN, guna menegaskan komitmen dalam mengintegrasikan ASEAN secara komprehensif dalam 3 pilar, termasuk KEA.

KEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Diharapkan ASEAN akan memiliki dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.

Upaya mengintegrasikan ekonomi ASEAN telah memperlihatkan tren positif sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kajian *Economic Research Institute of ASEAN and East Asia* (ERIA) yang berjudul *Challenges Ahead but High Hopes Remain for ASEAN and AEC Beyond 2015*. Kajian tersebut menjelaskan adanya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan jumlah kelas menengah ASEAN. Pada tahun 1990, angka kemiskinan ASEAN sebesar 45%. Dalam kurun waktu 20 tahun, tepatnya pada tahun 2010, angka kemiskinan turun menjadi 14%. Sementara di sisi lain, pertumbuhan kelas menengah di ASEAN dalam kurun waktu yang sama

menunjukkan peningkatan, yaitu dari 15% pada tahun 1990 menjadi 37% pada tahun 2010. Perlu diingat, dalam periode tersebut, Asia Tenggara terkena dampak dari dua krisis ekonomi di tahun 1997—1998 dan 2008—2009.

Dalam proses integrasi ekonomi tersebut, kinerja perdagangan Indonesia dengan seluruh negara anggota ASEAN menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1990, kontribusi Indonesia dalam total ekspor intra-ASEAN hanya mencapai 2,1%. Dalam 20 tahun, angka tersebut meningkat 8 kali lipat menjadi 17%. Tren serupa juga terjadi dalam kontribusi Indonesia dalam total impor intra-ASEAN. Secara total, kinerja perdagangan intra-ASEAN “baru” mencapai 25% dari total perdagangan ASEAN. Capaian ASEAN tersebut menunjukkan masih adanya peluang besar bagi seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Peningkatan kinerja perdagangan tersebut menunjukkan proses pembentukan pasar tunggal dan basis produksi yang semakin menguat.

Bagi Indonesia, apa tantangan yang dihadapi menuju KEA 2015?

Saya melihat bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi ke-4 terbesar di dunia, Indonesia tentu saja memiliki *magnitude* yang jauh berbeda dibandingkan negara anggota lain ASEAN. Ketersebaran pulau di seluruh nusantara dengan otonomi

daerah menghadirkan tantangan besar dalam upaya menyatukan derap langkah nasional. Perjalanan udara dari ujung barat ke timur Indonesia memerlukan waktu sekitar 8 jam, durasi yang sama untuk perjalanan Jakarta—Dubai. Bisa kita bayangkan bagaimana faktor geografis memberikan kompleksitas terkait koordinasi.

Dalam kaitan itu, peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, dan reformasi birokrasi menjadi krusial. Selain itu, pemahaman yang benar dari seluruh elemen masyarakat mengenai KEA 2015 juga masih perlu ditingkatkan. Terkait infrastruktur, Pemerintah Indonesia melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah memiliki perencanaan yang bagus. Namun perencanaan yang bagus memerlukan implementasi yang tepat. Di samping itu, dukungan dari sektor swasta juga sangat penting. Dalam draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, kebutuhan belanja infrastruktur Indonesia diperkirakan sebesar Rp.6.541 triliun dengan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 25% dari total kebutuhan.

Sementara itu, perekonomian Indonesia semakin terbuka dan menjadi bagian aktif dari proses globalisasi. Upaya tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari langkah untuk menarik lebih banyak investasi sekaligus mendorong ekspor Indonesia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sebagai konsekuensi Indonesia harus meningkatkan standarisasi produk, khususnya di 12 sektor prioritas yang telah disepakati untuk diintegrasikan (*Priority Integrations Sectors/PIS*), yakni produk berbasis agrikultur, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, produk otomotif, produk kesehatan, produk elektrikal dan elektronik, produk tekstil, produk perikanan, jasa perjalanan udara, pariwisata, *e-asean*, dan logistik. Standarisasi merupakan *competitive tool* yang tepat untuk memfasilitasi perdagangan yang *fair*, untuk itu

sinkronisasi antarkementerian teknis dalam penetapan standar nasional menjadi kunci dalam keberhasilan penguatan daya saing produk dalam negeri sekaligus sebagai protektor dari gempuran produk luar negeri.

Selain tantangan yang saya sebutkan sebelumnya, tantangan terbesar bagi Indonesia sesungguhnya adalah *mind-set* atau pola pikir masyarakat Indonesia yang cenderung *inward looking* dan pesimistis. Hal tersebut antara lain terlihat dengan rendahnya ekspansi pengusaha nasional ke negara-negara ASEAN, termasuk dalam memanfaatkan *ASEAN branding* pada strategi pemasaran produk sebagaimana dilakukan oleh salah satu bank asal negara jiran. Di tengah upaya memantapkan persiapan nasional menghadapi KEA, seharusnya seluruh elemen bangsa menumbuhkan optimisme dan pola pikir *outward looking* sehingga dapat mengubah tantangan menjadi peluang, karena di era globalisasi ekonomi *mind-set outward looking* dan terus meningkatkan daya saing sudah menjadi keniscayaan.

Namun fakta tersebut tidak semestinya disikapi secara negatif, sebaliknya justru dijadikan pelecuk semangat perbaikan. Perlu kita sadari pula bahwa tantangan tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga oleh negara anggota ASEAN lainnya dalam berbagai tingkatan. Thailand misalnya didera kekhawatiran mengenai *ageing population* di negaranya, ditambah lagi dinamika politik nasional terkini yang mengganggu persiapan mereka.

Peluang apa yang dapat Indonesia raih dari KEA 2015?

KEA merupakan peluang bagus bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing nasional, yakni memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN sebagai *training ground* guna menghadapi persaingan di kancah global. Peningkatan daya saing mutlak harus dilakukan oleh Indonesia, baik dengan maupun tanpa adanya KEA 2015. Selain ke-9 negara ASEAN, Indonesia menasar pasar di banyak negara di berbagai benua, termasuk negara maju yang persyaratannya lebih ketat, untuk produk ekspor Indonesia. Dalam kaitan itu, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara eksportir lain dimana tingkat daya saing menjadi kata kuncinya. Dengan sendirinya, daya saing yang meningkat akan menjadi pelindung bagi pasar domestik dari produk asing, sekaligus meningkatkan kapasitas nasional untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional.

Selain itu, KEA tentu saja menawarkan peluang pasar sebesar 360 juta jiwa, di luar pasar Indonesia. Walaupun 40% dari total populasi ASEAN adalah WNI, Indonesia tidak seharusnya merasa “jumawa” untuk tidak menggarap peluang pasar di luar Indonesia. Apa yang dilakukan oleh RRT dan India patut menjadi pelajaran bagi Indonesia. Tercatat sebagai dua negara terpadat di dunia, kedua negara tersebut tetap gencar menggarap pasar luar negeri. RRT bahkan telah menanamkan pengaruhnya di

“...Indonesia juga perlu memanfaatkan peluang dengan negara mitra dagang (*ASEAN FTA Partners/AFP*), termasuk dua kekuatan baru Asia, yaitu India dan RRT.”

benua Afrika dan di sebagian kawasan Amerika Selatan. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia ke pasar ASEAN tercatat sebesar 25% dari total ekspor nasional.

Secara keseluruhan, total perdagangan antarnegara ASEAN masih di kisaran ¼ dari total. Sebagai perbandingan, perdagangan antarnegara anggota *North American FTA* (NAFTA) sudah mencapai 45%, sementara antarnegara anggota Uni Eropa sudah mencapai 70%. Berkaca dari integrasi ekonomi NAFTA dan UE, peluang untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN masih terbuka lebar. Selain mengoptimalkan peluang perdagangan dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia juga perlu memanfaatkan peluang dengan negara mitra dagang (*ASEAN FTA Partners/AFP*), termasuk dua kekuatan baru Asia, yaitu India dan Tiongkok. Peningkatan postur ekonomi kedua negara tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia secara maksimal, baik untuk meningkatkan ekspor ke kedua negara berpenduduk besar tersebut maupun untuk mendatangkan investasi dari kedua negara tersebut.

Dengan bonus demografi yang dimiliki, Indonesia harus dapat mengonversi keunggulan tersebut menjadi hasil nyata. Walaupun “PR” kita tidaklah mudah, Indonesia sudah menunjukkan tren positif. *World Economic Forum* tahun 2013 menempatkan *Competitiveness Index* Indonesia di posisi 38, naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya. *McKinsey Global Institute* memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia di tahun 2030. Prediksi tersebut dapat menjadi pelecut semangat nasional untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Apa saja persiapan Indonesia untuk menghadapi KEA 2015 mendatang?

Sesungguhnya Indonesia sudah melakukan upaya persiapan untuk menghadapi KEA 2015 walaupun tidak semuanya harus dalam *brand* persiapan menuju KEA, seperti penyusunan MP3EI, program keuangan inklusif,



perbaikan regulasi terkait investasi asing, dan kampanye penggunaan produk nasional, serta hilirisasi industri nasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No.11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perancangan Inpres tentang peningkatan daya saing Indonesia. Upaya serupa juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui forum Pertemuan seluruh Gubernur seIndonesia. Dalam forum tersebut, pembahasan persiapan menghadapi KEA 2015 sudah dilakukan beberapa kali.

Sementara itu di tataran ASEAN, persiapan Indonesia sebagaimana terlihat pada capaian *AEC scorecard* telah mencapai 84,4% (*Chairman’s Statement KTT ke-23 ASEAN*), di atas rata-rata ASEAN yang sebesar 79,7%. Namun demikian, capaian Indonesia tersebut masih di bawah sebagian negara anggota ASEAN mengingat *magnitude* Indonesia yang begitu besar dan lebih kompleks. Bagi Indonesia, KEA merupakan alat atau *means* untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik nasional, khususnya untuk mengantisipasi

dinamika dan pertumbuhan yang cepat di Asia Timur dan India. Pembentukan KEA penting bagi Indonesia, mengingat besarnya postur Indonesia di ASEAN, baik dari segi populasi maupun PDB. Oleh karena itu, berbicara integrasi ekonomi ASEAN, pertumbuhan dan kesejahteraan serta daya saing dan daya tarik ASEAN sesungguhnya tidak terlepas dari Indonesia.

Persiapan tersebut tentu saja masih memerlukan peningkatan, baik dari segi pelaksanaan sesuai komitmen maupun dari segi inklusivitas partisipasi seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesiapan diri menghadapi KEA 2015. Perlu dipahami bahwa KEA 2015 merupakan sebuah proses, bukan *event*. Setelah 2015, yang merupakan target politik para Pemimpin ASEAN, proses integrasi ekonomi ASEAN tidak akan berhenti namun justru akan semakin intensif. Proses tersebut pada intinya akan membuat ASEAN menjadi semakin atraktif, berdaya saing tinggi dan efektif sehingga dapat senantiasa relevan dalam persaingan ekonomi global, *the ever changing global economy*.[]

DUTA BESAR RAHARDJO JAMTOMO
Direktur Eksekutif KADIN

Dibutuhkan Strategi Matang Dalam Menghadapi AEC 2015



Dalam upaya untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan dunia usaha Indonesia dalam menyongsong pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada 2015 nanti, tim redaksi Buletin Komunitas ASEAN berkesempatan melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif Kadin, Bapak Duta Besar Rahardjo Jamtomo di kantornya Menara Kadin

Jl. HR Rasuna Said pada tanggal 10 Februari 2014.

Kadin sebagai institusi yang mewakili dunia usaha di Indonesia dinilai sangat berkompeten didalam mewakili pandangan dunia usaha di Indonesia terkait dengan pelaksanaan KEA 2015. Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa pelaksanaan KEA 2015 akan berkaitan langsung dengan dunia usaha

di Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kadin.

Buletin Komunitas ASEAN berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan pandangan dunia usaha di Indonesia terkait dengan pelaksanaan KEA 2015 agar mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih dalam mengenai kesiapan para pemangku kepentingan di bidang teknis.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh team redaksi Buletin Komunitas ASEAN kepada Bapak Duta Besar Rahardjo Jamtomo.

Dalam dua tahun ke depan KEA 2015 akan segera direalisasikan, dimana salah satu poin penting dari KEA 2015 tersebut adalah mengenai pembentukan pasar bebas ASEAN yang akan secara langsung berimplikasi pada dunia usaha di Indonesia. Bagaimanakah kesiapan dunia usaha di Indonesia dalam menghadapi persaingan di era KEA tersebut?

Kalau kita kembali kepada pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) maka pada hakekatnya terdiri dari empat pilar, yaitu; pembentukan pasar tunggal dan basis produksi; menciptakan suatu kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi; menciptakan kesamarataan ekonomi diantara negara-negara anggota ASEAN; dan seberapa jauh ekonomi ASEAN dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi global. Dari keempat pilar tersebut, kalau kita melihat perkembangan yang berlangsung di ASEAN, sebenarnya tidak semudah dan semulus yang kita bayangkan dan harapkan. Kalaupun Pemerintah selalu menggambarkan bahwa sudah ada kemajuan yang cukup pesat misalnya saja dalam hal

kemajuan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi, disini masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Pasar Tunggal ASEAN ini perkembangannya belum sebagaimana yang kita harapkan, meskipun jumlah komoditi dan item yang masuk dalam portofolionya sudah sangat tinggi, tetapi tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah.

Ada tiga hal yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan pasar tunggal ASEAN ini. Pertama bahwa perbedaan perlakuan dalam Persetujuan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dan perlakuan dalam *Most Favored Nations* (MFN) tidak terlalu banyak, sehingga tidak ada nilai tambah bagi dunia usaha untuk memanfaatkan CEPT. Kedua adalah biaya untuk logistik yang sangat tinggi jika memanfaatkan CEPT, sehingga dengan demikian dunia usaha menjadi kurang tertarik untuk memanfaatkan CEPT yang dikembangkan oleh ASEAN, apalagi kalau diingat bahwa daya saing para pengusaha Indonesia masih relatif rendah dibandingkan para pengusaha dari negara anggota ASEAN lainnya.

Dengan rendahnya daya saing dari dunia usaha kita, hal ini memang menjadikan kita cukup sulit untuk bisa memanfaatkan AFTA. Sementara kalangan pemerintah selalu menggambarkan perkembangan yang positif, namun itu hanya sebatas pada tataran teori mengenai pentingnya KEA.

Mengingat sisa waktu yang relatif pendek, yaitu hanya sekitar dua tahun, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menangani kesulitan yang dihadapi oleh dunia usaha Indonesia tersebut?

Sekarang ini kita sudah sampai pada tahap dimana kita harus benar-benar bisa merumuskan suatu strategi dan program kerja secara detil untuk bisa memanfaatkan KEA ini. Tanpa hal ini, kita akan menghadapi kondisi yang cukup berat, khususnya dalam bidang tenaga kerja, jasa, komoditi dan modal. Oleh karena itu dalam jangka waktu dua

tahun kedepan ini, pemerintah harus bisa mengejar ketertinggalan, karena kalau tidak kita hanya akan menjadi *the loser* dan bukan *the winner* pada persaingan dalam pelaksanaan KEA 2015.

Indonesia memang sebenarnya cukup bisa untuk menjadi *the winner*, oleh karena itu kita harus melihat seberapa jauh kemungkinan itu. Kurangnya kesiapan kita sebenarnya disebabkan oleh keteledoran kita sendiri, apakah itu pemerintah ataupun pihak swasta, dalam mempersiapkan diri. Sebetulnya pada waktu diumumkan pembentukan pasar tunggal ASEAN pada 2003, kita seharusnya sudah memulai melakukan berbagai program yang jelas untuk meningkatkan daya saing pengusaha kita yang relatif masih rendah.

Sekarang ini, dunia usaha kita masih agak khawatir dengan pelaksanaan KEA 2015. Hal ini mengingatk tingkat daya saing para pengusaha kita yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Indonesia belum memiliki upaya-upaya yang memang fokus untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Upaya-upaya ini sangat penting dalam bidang perdagangan barang, jasa, tenaga kerja dan lain-lainnya.

Menurut pandangan bapak, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dan dunia usaha Indonesia secara efektif mengingat waktu yang relatif pendek?

Sekarang ini, dalam menghadapi KEA 2015, pemerintah sudah tidak bisa lagi berjalan sendiri, karena kita harus memiliki program kerja yang jelas dan didukung oleh semua pihak termasuk kalangan dunia usaha. Semuanya harus berjalan bersama dan menetapkan hal-hal yang sama. Kalau pemerintah masih berjalan sendiri dalam menghadapi KEA 2015, dan tidak melibatkan dunia usaha serta pihak-pihak terkait, maka kita akan berat dalam menghadapinya. Jadi kita harus betul-betul melakukan pendekatan yang *concertive*, yang diarahkan pada suatu tujuan yang sama dimana tujuan itu sendiri juga harus

ditetapkan secara bersama-sama.

Di bidang industri misalnya, kita harus tetapkan bersama industri apa yang akan kita pertaruhkan untuk bisa bersaing dengan industri di negara-negara ASEAN lainnya. Ini harus jelas, dan kalau misalnya yang kita pilih adalah industri barang, maka kita juga harus menentukan barang-barang apa saja yang akan kita pertandingkan di pasar tunggal ASEAN.

Selanjutnya pemerintah harus membuat program untuk mendukung, memberikan insentif dan juga memberikan fasilitasi untuk melakukan promosi kepada para pengusaha barang-barang tersebut, mendukung kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pembiayaan dan sebagainya.

Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa negara anggota ASEAN, diantaranya Malaysia, yang dalam kurun waktu 10 tahun berkonsentrasi hanya untuk mendorong industri mobil, dan akhirnya berhasil memproduksi mobil sendiri.

Dari dulu industri mobil kita dikuasai oleh negara-negara lain dan kita hanya mampu menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja, bahkan *assembling* saja kita tidak punya.

Kalau kita melihat kesiapan Negara-negara ASEAN lainnya dalam realisasi KEA 2015 ini, bagaimana posisi Indonesia dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya? Apakah akan menjadi pemain kunci atau hanya menjadi penonton?

Kalau kita mempelajari mengenai *production chain system*, disana dikenal ada tiga gelombang. Gelombang pertama ditempati oleh negara-negara seperti Korea, Jepang, dan India. Mereka sudah menangani produksi secara total, jadi bukan hanya menangani industri komponen dan *spareparts* saja. Gelombang kedua adalah negara-negara yang sudah mampu menangani industri komponen dan *spareparts* dari suatu produk akhir. Selain Korea, Jepang dan India, Negara yang sangat dominan dalam gelombang kedua ini adalah China. China adalah



tempat *assembling* bagi suatu produk akhir, dan pada saat ini Tiongkok sangat dominan dalam *Chain Supply System*.

Indonesia baru masuk di gelombang ketiga, yaitu sebagai pemasok bahan mentah. Untuk industri komponen kita masih terbatas hanya untuk sektor otomotif dan elektronik. Apakah dengan industri otomotif dan elektronik itu saja cukup bagi kita untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya di KEA.

Apakah kita akan menjadi *the loser* atau *the winner*, semuanya tergantung dengan upaya kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu dua tahun ke depan ini. Oleh karena itu, kita perlu membuat suatu kebijakan dan program yang jelas, kita harus *concern* dalam hal ini. Inilah yang dirasakan oleh dunia usaha kita, bahwa sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi dimana pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan dan program.

Pemerintah diharapkan dapat menggandeng dunia usaha dalam pelaksanaan KEA, memang seberapa jauh peran dunia usaha kita dalam perekonomian nasional?

Kalau kita lihat dalam struktur pendapatan nasional kita, kontribusi terbesar disumbangkan oleh dunia

usaha. Begitu juga dalam pelaksanaan MP3EI, pemerintah hanya mampu menangani pelaksanaannya sebesar 30%, sedangkan 70% lainnya diserahkan kepada swasta atau dunia usaha. Peran swasta atau dunia usaha semakin hari memang semakin meningkat di Indonesia, begitu juga yang terjadi di ne-gara-negara maju. Dalam pertemuan di Davos, forum G-20 dan lain sebagainya, peran dunia usaha atau swasta sudah di *recognize*, tapi kita masih mengabaikan peran dunia swasta ini. Pada kenyataannya masih banyak *public policy* yang dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak swasta. Setelah ada protes barulah pihak swasta diajak untuk ikut merumuskan.

Sekarang ini dunia usaha memang sudah mulai dilibatkan, namun biasanya untuk *final touch* nya dominasi pemerintah masih cukup kelihatan dan masih ada *treatment* yang tidak *fair* terhadap dunia usaha, padahal dunia usahalah yang harus menanggung semua akibatnya.

Banyak pihak menilai bahwa Indonesia akan mampu bersaing dan memainkan peran penting di KEA karena nilai perdagangan Indonesia selama ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukankakah

Apakah kita akan menjadi *the loser* atau *the winner*, semuanya tergantung dengan upaya kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu dua tahun ke depan ini.

ini menunjukkan bahwa industri di Indonesia terus berkembang semakin maju, bagaimana pandangan bapak terhadap hal ini?

Nilai perdagangan kita yang semakin meningkat secara nominal tidak bisa kita gunakan sebagai ukuran untuk memberikan gambaran kemajuan industri kita, karena yang menjadi ukuran disini adalah nilai tambah dari suatu produk. Menjual barang dalam kuantitas yang sama antara barang yang memiliki nilai tambah dengan yang tidak memiliki nilai tambah, hasilnya sangat berbeda sekali. Indonesia menjual nikel, batubara, tembaga dan sebagainya dalam bentuk produk yang tidak ada nilai tambahnya, oleh karena itu harganya rendah. Sementara Tiongkok menjualnya dengan sedikit pengolahan sehingga menjadi memiliki nilai tambah, dan harga jualnya meningkat menjadi lima kali lipat. Sehingga dalam *turn of trade*-nya Tiongkok lah yang memperoleh keuntungan lebih besar.

Oleh karena itu pemerintah harus konsekuen dalam menjalankan kebijakan di industri hilir, dan harus dipilih mana yang efektif dan efisien karena memang tidak bisa kita lakukan di semua bidang. Namun demikian, pemberian nilai tambah bisa juga dilakukan

pada barang jadi, yaitu dengan meningkatkan kualitas barang tersebut.

Menurut bapak hal mendesak apakah yang harus dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan ini agar Indonesia bisa berbicara banyak di KEA?

Yang paling penting adalah peningkatan kualitas tenaga kerja kita. Selama ini kualitas tenaga kerja kita masih rendah. Bandingkan dengan Si-ngapura yang 70% dari angka pengangguran disana adalah sarjana, sementara di Indonesia hanya lulusan SD. Dari latar belakang pendidikan ini saja sudah dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalisme tenaga kerja kita masih rendah. Letak daya saing adalah di latar belakang pendidikan, dan untuk ini kita memang harus kerja keras untuk membawa SDM kita mampu bersaing di KEA.

Tahun lalu Kadin menyelenggarakan sebuah seminar untuk mencoba mengidentifikasi tenaga kerja apa saja yang harus kita tingkatkan daya saingnya terkait dengan struktur industrialisasi yang ada di Indonesia. Kadin juga sudah mengusulkan kepada pemerintah supaya membuat program khusus untuk mengatasi hal ini.

Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perindustrian belum satu pendapat. Kementerian Pendidikan masih melihat *supply chain* dalam bentuk berapa banyak dokter, *engineer*, perawat dan lain sebagainya yang harus dihasilkan. Sedangkan dunia usaha melihatnya dari tingkat profesionalisme yang dikaitkan dengan kebutuhan industri, sehingga terjadi ketidaksinkron antara pemerintah dan dunia usaha. Akibatnya seringkali industri membuat pendidikannya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil yang profesional. Akibatnya muncul banyak tenaga kerja terdidik yang kemudian menjadi pengangguran karena tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Kadin juga sudah mengusulkan ke-

pada Kementerian Perindustrian untuk membatasi industri yang akan kita kembangkan, jadi jangan semuanya ingin kita garap, karena akan memecah konsentrasi kita.

Kebetulan sekali bahwa UU Perindustrian sudah lahir, dan kami merasa senang karena UU ini cukup nasionalis dimana artinya lebih mengutamakan sumber daya alam dan SDM yang ada di Indonesia sebagai sumber industrialisasi dan pemerintah juga berkewajiban untuk mendukung. Sekarang juga sudah dibuat klaster-klaster industri sehingga kita menjadi lebih fokus, dan Kadin juga sudah mengidentifikasi industri-industri apa saja yang perlu dikembangkan saat ini untuk menghadapi KEA 2015.

Di industri hulu, persiapan kita cukup berat, karena sudah cukup lama industri ini terabaikan dan mengakibatkan impor *contain* industri hilir kita menjadi sangat tinggi dan tidak mampu bersaing.

Dalam UU Perindustrian yang baru, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan industri hulu, artinya bahwa BUMN harus bergerak di industri hulu yang memang diketahui membutuhkan biaya besar dan teknologi tinggi tapi sangat minim dari sisi keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan dunia usaha kurang berminat untuk mengembangkan industri hulu. Namun demikian bukan berarti bahwa hal ini akan dibiarkan begitu saja, karena pemerintah di negara-negara maju seperti AS dan Jepang turut turun tangan mengatasi persoalan industri hulu ini. Bagi Indonesia, sekarang ini industri hulu merupakan tambang emas yang harus dibangun dan dikembangkan, karena

kalau tidak kita tidak akan mampu bersaing di KEA.

Bagaimana pandangan bapak mengenai UKM di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk bisa bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan KEA 2015?

UKM memang unggulan kita dalam skala nasional, namun tidak untuk skala internasional. UKM memiliki peran dalam menghadapi krisis ekonomi karena mereka memang tidak memiliki beban hutang sebagaimana industri atau perusahaan besar. Karena UKM adalah usaha yang kecil maka dengan demikian mereka juga memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk merubah *core* usaha mereka dalam menghadapi krisis sehingga tidak membebani pemerintah. Kalau untuk *international competition*, jangan untuk bersaing dengan UKM dari Negara-negara lain, untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar di dalam negeri saja mereka sudah sulit. Pada umumnya ada empat masalah utama yang mereka hadapi, yaitu masalah akses, pembiayaan, pasar dan teknologi, serta *skill* dan manajerial.

Jumlah UKM memang mencapai 70% dari masyarakat bisnis di Indonesia, namun kalau dilihat dari kontribusi mereka terhadap pendapatan nasional, itu sangat kecil. Tapi UKM memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai *vibrant enterprises*. Dapat kita bayangkan kalau UKM kita yang merupakan 70% dari dunia usaha ini berkembang menjadi *vibrant enterprise*, akan sungguh luar biasa hasilnya.

“...jangan untuk bersaing dengan UKM dari Negara-negara lain, untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar di dalam negeri saja mereka sudah sulit.”

ASEAN Women Entrepreneurs' Network : Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kaum Perempuan ASEAN



Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu mandat ASEAN, khususnya pada pilar sosial budaya. ASEAN menyadari bahwa para pengusaha perempuan, terutama yang bergerak di usaha kecil dan menengah, merupakan pelaku ekonomi yang memiliki peran krusial. Namun demikian, para pengusaha perempuan ini masih mengalami kendala karena kurangnya kapasitas, modal, maupun akses terhadap informasi dan jaringan.

Menjawab kondisi ini, ASEAN *Woman Entrepreneurs' Network* (AWEN) didirikan sebagai sebuah jaringan regional yang beranggotakan perusahaan, asosiasi, klub dan/atau badan ekonomi lain yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan pada semua sektor ekonomi di kawasan ASEAN.

Inisiatif untuk mendirikan AWEN pertama dibahas pada Pertemuan ke 6 ASEAN *Committee on Woman* (ACW) di Chiang Mai, Thailand, 7-8 November 2007. Inisiatif ini datang dari komitmen ASEAN untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam meningkatkan keterampilan kewirausahaan perempuan dan

menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengusaha perempuan di kawasan. AWEN kemudian resmi dibentuk pada Pertemuan ke 12 ACW yang di laksanakan pada 16-17 Oktober 2012 di Vientiane, Laos.

AWEN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan pengusaha ASEAN dan meningkatkan pengembangan bisnisnya melalui *networking*. Secara khusus, AWEN berperan sebagai forum regional bagi pengusaha wanita ASEAN untuk berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman mengenai kebijakan, lingkungan bisnis, investasi dan isu-isu politik serta dampaknya terhadap peluang bisnis.

Selain itu, AWEN juga membantu para pengusaha wanita ASEAN untuk meningkatkan manajemen bisnis dan ketrampilan, seperti komunikasi, kepemimpinan dan pemecahan masalah. Akses pada perolehan kredit mikro, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan, pasar dan peluang bisnis, serta layanan perlindungan sosial juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui Forum ini. Ke depan, AWEN diharapkan dapat menghubungkan pengusaha wanita ASEAN dengan jaringan/organisasi internasional serupa.

AWEN akan mengadakan pertemuan tahunan yang menjadi sarana berbagi pengalaman dan informasi serta membahas dan mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan wanita dan bisnis. Para anggota AWEN diharapkan dapat belajar membuat keputusan yang membantu para pengusaha wanita untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka.

Keanggotaan AWEN sendiri terbuka bagi seluruh perempuan pengusaha di negara-negara di ASEAN yang mengelola perusahaan, asosiasi, klub, dan/atau badan ekonomi lainnya pada semua sektor ekonomi. Dalam perkembangannya, AWEN juga akan menjalin kerja sama dengan organisasi yang berpartisipasi dalam mempromosikan keterampilan bisnis dan peluang pengusaha wanita yang berasal dari negara-negara mitra wicara ASEAN (map/dit.kfa)

PERKEMBANGAN KERJA SAMA EKSTERNAL ASEAN

Dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu, ASEAN juga bertujuan untuk memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan.

Sesuai semangat tersebut, ASEAN telah secara aktif menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar ASEAN yaitu dengan negara dan organisasi regional serta internasional. Dalam kerja sama eksternal ASEAN, utamanya adalah mengedepankan sentralitas ASEAN.

ASEAN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 11 mitra wicara (*dialogue partner*) dengan Australia, Kanada, RRT, Uni Eropa, India, Jepang, Rusia, Republik Korea, Selandia Baru, Amerika Serikat dan PBB. Selain itu, ASEAN juga memiliki hubungan mitra wicara sektoral dengan Pakistan.

Dalam kerja sama eksternal, ASEAN juga mengembangkan konteks arsitektur regional yang lebih luas. Dalam konteks ini, dan sejalan dengan prinsip sentralitas ASEAN, Indonesia juga terus mendorong pengembangan berbagai proses *ASEAN Plus*, yang mencakup mekanisme kerja sama ASEAN+1 dengan negara-negara mitra wicara, *ASEAN Plus Three* dengan Jepang, RRT dan Republik Korea, *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *East Asia Summit* (EAS).

Pada Piagam ASEAN yang berlaku sejak tahun 2008, Kerja Sama Eksternal ASEAN diatur dalam Bab XII (Pasal 41-46) tentang Pelaksanaan Hubungan Eksternal. Pada Bab tersebut, antara lain dijelaskan bahwa ASEAN akan mengembangkan hubungan persahabatan dan dialog, kerja sama, serta kemitraan yang saling menguntungkan

dengan negara, organisasi, kelembagaan sub-kawasan, kawasan, dan internasional. Dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, atas dasar persatuan dan solidaritas, negara-negara anggota akan berkoordinasi serta berupaya mengembangkan posisi-posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan bersama.

Posisi Indonesia dalam merumuskan kebijakan kerja sama eksternal ASEAN adalah mengedepankan sentralitas ASEAN dan juga menjadikan ASEAN sebagai *driving force* di kawasan. Selain itu, kerja sama eksternal juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Kerja sama eksternal ASEAN hendaknya dapat mendukung ASEAN dalam mencapai integrasi dan pertumbuhan kawasan, dan memberikan manfaat dari segi politik, ekonomi dan perdagangan, serta sosial-budaya. Untuk itu, kerja sama diwujudkan dalam berbagai program kerja sama ASEAN dengan mitra wicara maupun pihak eksternal lainnya di berbagai bidang. Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi kerja sama kemitraan ASEAN

dengan mitra wicara maupun dengan pihak eksternal lainnya di tingkat nasional.

Presiden Resmikan Pusat Pelatihan Wartawan ASEAN

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Bengkulu (9 Februari 2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara simbolis meresmikan pusat pelatihan wartawan Asia Tenggara yang terletak di Palembang.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengatakan bahwa sebanyak 75 wartawan ASEAN hadir dalam acara peresmian pusat pelatihan wartawan ASEAN tersebut.

Sementara itu Sekretaris Tetap Konfederasi Wartawan ASEAN Akhmad Kusani mengatakan bahwa seiring dengan peresmian pusat pelatihan dan pendidikan wartawan tersebut juga diselenggarakan *workshop* dengan tema *“Bringing ASEAN Closer to Hearts and Minds of The People,”* pada tanggal 10-12 Februari 2014 di Palembang.

Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan pada 1979 dengan tiga tujuan utama, yaitu mendorong kemajuan pers melalui mempromosikan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta mendekatkan wartawan dari negara anggota ASEAN. Tujuan lainnya adalah mempromosikan saling pemahaman antar-negara anggota ASEAN untuk menciptakan kerja sama yang menghasilkan kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian.

Selain itu, organisasi tersebut juga dapat digunakan untuk menyuarakan aspirasi ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota organisasi kawasan ditingkat global.

ASEAN CENTRE

Perkokoh Kerja Sama Kemitraan ASEAN



Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN dengan beberapa negara mitra wicara semakin diperkokoh dengan didirikannya ASEAN Centre sebagai bagian dari upaya pengembangan dan penguatan kerja sama kemitraan. Fokus utama ditujukan pada kerja sama bidang ekonomi, pendidikan dan budaya. Hingga kini, telah dibentuk 4 (empat) ASEAN Centre di Tokyo, Seoul, Beijing, dan New Delhi, yang berfungsi sebagai *hub* bagi kerja sama kemitraan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, RRT, dan India.

ASEAN-Japan Centre

Berlokasi di daerah perkantoran Shimbashi, Tokyo, pusat informasi mengenai hubungan kerja sama kemitraan

ASEAN-Jepang didirikan pada 25 Mei 1981 dengan nama *ASEAN Promotion Centre*. Institusi yang memfokuskan kegiatannya pada bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi, kini berkembang menjadi *ASEAN-Japan Centre* (AJC).

Sesuai dengan maksud pendiriannya, AJC melakukan promosi perdagangan dari ASEAN ke Jepang, memperlancar arus investasi antara ASEAN dan Jepang, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan memperluas hubungan antar masyarakat atau *people-to-people contacts* melalui kegiatan pendidikan, seni dan budaya.

Sejak didirikan 33 tahun yang lalu, AJC telah menyelenggarakan berbagai pertemuan dan pameran, di antaranya

adalah *ASEAN Food and Beverage Exhibition*, promosi pariwisata negara anggota ASEAN kepada pebisnis dan wisatawan Jepang, seminar promosi investasi, serta pengiriman misi investasi ke Jepang dan negara anggota ASEAN. AJC juga mendorong peningkatan akses pasar, *business matching* dan penguatan jejaring praktisi bisnis dan perdagangan, manajemen dan diseminasi informasi perdagangan.

Salah satu program yang menarik dan kini tengah dikembangkan oleh AJC adalah pembenahan industri pariwisata Jepang untuk meningkatkan jumlah wisatawan Muslim. Kebijakan PM Shinzo Abe yang menargetkan 25 juta wisatawan ke Jepang dan terpilihnya ibukota negara bunga sakura

tersebut sebagai tuan rumah Olimpiade pada tahun 2020, turut mendorong pihak terkait untuk sigap menyiapkan segala kebutuhan wisatawan, termasuk wisatawan Muslim, yang dilihat sebagai pangsa pasar yang potensial dan menjanjikan. Sebagai contoh, industri makanan halal dan penyiapan area khusus untuk beribadah bagi umat Muslim telah menjadi perhatian industri pariwisata Jepang. Pemberian kebebasan visa bagi wisatawan yang saat ini tengah diupayakan serta pembuatan laman khusus mengenai Islam dan Muslim juga diharapkan sebagai salah satu faktor penunjang bagi peningkatan industri pariwisata Jepang.

Dalam kaitannya dengan kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang, untuk memperingati 40 tahun terjalannya hubungan kemitraan pada tahun 2013, telah diselenggarakan berbagai kegiatan seperti *ASEAN Festival*, *ASEAN Creative Network for the Development of Creative Industry*, *ASEAN Seminar Series*, *ASEAN Sports Caravan*, kuliah mengenai ASEAN untuk mahasiswa, dukungan pengembangan karir bagi pelajar ASEAN di Jepang, dan panel diskusi mengenai Komunitas Ekonomi ASEAN. Puncaknya adalah penyelenggaraan *ASEAN-Japan Commemorative Summit* di Tokyo, Jepang, tanggal 13-14 Desember 2013.

ASEAN-Korea Centre

Kerja sama kemitraan ASEAN-Korea Selatan (ROK) diperkuat dengan didirikannya *ASEAN-Korea Centre* (AKC) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-ROK di Singapura, 21 November 2007. Fokus kegiatan AKC, yang mayoritas aktifitasnya dibiayai oleh Korea Selatan dan berkedudukan di Seoul, terpusat pada bidang investasi, perdagangan, pariwisata, budaya, informasi dan kehumasan. Terhitung sejak tahun 2009, pertemuan *Council AKC* diselenggarakan secara rutin pada setiap awal tahun guna melakukan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan membahas rencana kerja serta anggaran untuk tahun tersebut.

Sekjen ASEAN, pada saat pertemuan dengan Sekjen AKC pada Januari 2014, mengemukakan peran penting AKC sebagai *key channel* untuk meningkatkan hubungan kemitraan ASEAN-ROK dengan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.

Tahun 2014 bertepatan dengan peringatan 25 tahun hubungan kemitraan ASEAN-ROK. Untuk merayakan hubungan kemitraan tersebut, direncanakan berbagai kegiatan peringatan sepanjang tahun 2014 di Korea Selatan dan di Indonesia (sebagai *Country Coordinator Kerja Sama Kemitraan ASEAN-ROK Periode 2012-2015*) serta negara anggota ASEAN, antara lain resepsi sebagai *kick-off event*, seminar bertema kerja sama sosial budaya, festival film, dan pameran foto dengan melibatkan fotografer ternama dari ROK dan ASEAN. Sebagai puncaknya, rangkaian kegiatan peringatan akan ditutup dengan *ASEAN-ROK Special Summit* pada 10-11 Desember 2014 di Korea Selatan.

ASEAN-China Centre

ASEAN-China Centre (ACC), yang secara resmi dibentuk pada tahun 2011 pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan saat pelaksanaan KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-RRT di Bali, telah secara aktif dan konkret melakukan kegiatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial budaya di antara kedua pihak.

Kegiatan utama ACC yang berada di Beijing, antara lain adalah meningkatkan akses produk ekspor ASEAN ke RRT, meningkatkan peluang investasi dan pariwisata RRT ke ASEAN, serta melaksanakan kegiatan yang bersifat *people to people interactions*. Dalam dua tahun setelah pembentukannya, ACC telah berkolaborasi dengan perwakilan negara anggota ASEAN di Beijing dalam berbagai bentuk kegiatan promosi dagang, investasi, dan pariwisata. Lebih dari 100 kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2013, termasuk pembukaan *ASEAN-China Language and Culture Center* di *Beijing Language and Culture*

University di Beijing, dan *ASEAN-China Product Trade Export Centre* di Pusat Grosir Yi Wu, Propinsi Zhejiang.

Khusus di bidang pariwisata, beberapa kiat untuk lebih mendorong minat wisatawan Tionghoa berkunjung ke negara anggota ASEAN, antara lain mempermudah pelayanan visa; penyediaan informasi lengkap tentang daerah tujuan wisata, utamanya yang berbahasa Mandarin; penyediaan restoran Tiongkok yang otentik di tempat wisata; serta pemanfaatan media sebagai sarana menggerakkan promosi wisata.

Kerja sama kemitraan diperkuat dengan ditetapkannya tahun 2014 sebagai tahun pertukaran budaya ASEAN-RRT. Dalam hal ini, ACC juga turut mendukung kesuksesan program ini dengan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kerja sama budaya antara ASEAN dengan RRT. Sebagai bentuk dukungan konkrit Indonesia terhadap ACC ini, sejak April 2013 Indonesia telah menunjuk seorang diplomat senior untuk menjabat sebagai Direktur Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata di ACC.

ASEAN-India Centre

ASEAN-India Centre (AIC) diresmikan di New Delhi pada 21 Juni 2013 sebagai salah satu implementasi nyata dari komitmen untuk lebih memperkuat kerja sama kemitraan ASEAN-India, sebagaimana termuat dalam *ASEAN-India Vision Statement*. Seperti halnya *ASEAN Centre* lainnya, AIC diharapkan dapat menjadi pusat informasi mengenai kerja sama kemitraan ASEAN dan India. Total populasi negara anggota ASEAN dan India yang mencapai 1,8 juta jiwa ditambah dengan kombinasi GDP sebesar US\$ 3 triliun, menjadi daya tarik tersendiri untuk pengembangan peluang kerja sama selanjutnya.

AIC, yang dibentuk sesuai KTT Peringatan ke-20 ASEAN-India pada Desember 2012, juga akan menjadi penghubung jejaring para ahli, *think tank*, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat hubungan kemitraan ASEAN dan India, khususnya terkait ketiga pilar Komunitas ASEAN.

PEMBENTUKAN PSA DI UNMUL DAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN KEA 2015 DI BALIKPAPAN DAN SAMARINDA



Bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN (Ditjen KSA) dan Universitas Mulawarman (UNMUL) pada tanggal 13 November 2013 bekerja sama melalui nota kesepahaman pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di UNMUL. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) KSA dan Rektor UNMUL, disaksikan oleh Wakil Guber-

nur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) dan sekitar 150 orang peserta kegiatan pemasyarakatan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015 di Balikpapan. Selain itu, Dirjen KSA juga memberikan kuliah umum mengenai Komunitas ASEAN 2015 kepada lebih dari 200 mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dan Ekonomi di UNMUL, Samarinda dan dialog interaktif di *Balikpapan TV* di Balikpapan.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PEMBENTUKAN PSA

Dalam pidatonya, Dirjen KSA menekankan nilai strategis dari pembentukan PSA sebagai wujud nyata dukungan civitas akademika dalam memantapkan persiapan Indonesia menghadapi KEA 2015, terutama melalui kajian-kajian yang berguna dalam penentuan posisi Indonesia. Selain itu, PSA juga diharapkan mampu menggelorakan KEA

2015 guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat luas dalam menghadapi KEA 2015. Senada dengan Dirjen KSA, Rektor UNMUL menyatakan dukungan dan komitmen pihaknya untuk melakukan kajian strategis dalam konteks persiapan nasional menghadapi KEA 2015.

PSA di Universitas Mulawarman merupakan yang pertama di Pulau Kalimantan atau yang ke-9 dari total 11 secara nasional. PSA lainnya, yaitu di Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Patimura, dan Universitas Udayana.

PEMASYARAKATAN KEA 2015

Dalam *Keynote Speech*, Dirjen KSA menekankan pentingnya masyarakat memiliki pola pikir optimis dan *outward looking* yang melihat tantangan KEA 2015 bukan sebagai ancaman, namun peluang yang harus dimanfaatkan. ASEAN menawarkan pasar sekitar 340 juta jiwa, sebagai tambahan atas pasar domestik Indonesia. KEA 2015 sudah menjadi keniscayaan dan oleh karena itu masyarakat Indonesia harus bersiap



diri menghadapinya sehingga dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada. Untuk itu diperlukan pembenahan pada 4 (empat) elemen utama, yaitu daya saing, infrastruktur, lingkungan usaha, dan kualitas SDM.

Wagub Kaltim menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas usaha Kementerian Luar Negeri dalam membangun kesiapan masyarakat menghadapi KEA 2015. Disampaikan bahwa integra-



si ASEAN sesungguhnya sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kaltim karena jalur perbatasan darat yang melintasi Kaltim dan negara bagian Sabah, Malaysia memungkinkan aliran perdagangan barang dan jasa. Akan tetapi, infrastruktur disadari masih menjadi tantangan besar bagi Kaltim untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi.

Mewakili regulator perbankan,



Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim menyoroti semakin intensifnya kerja sama ekonomi di ASEAN. Bagi dunia perbankan, integrasi ekonomi ASEAN memberikan peluang bagi bank nasional untuk melakukan ekspansi ke negara ASEAN. Ekspansi bank nasional tersebut diperlukan mengingat volume dan frekuensi perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, tan-

tangan yang perlu diatasi oleh bank nasional adalah terkait ketersediaan modal inti yang relatif kecil dibandingkan bank asal Singapura dan Malaysia.

Berbicara mengenai potensi ekonomi Kalimantan, Dosen FE Universitas Palangkaraya secara prinsip mendukung pembentukan KEA 2015. Ditekankan pentingnya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan/atau daerah, pengusaha, dan civitas akademika untuk menyusun dan menjalankan perencanaan nasional. Kalimantan yang memiliki kekayaan SDA mineral sepatutnya memiliki industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil alam dimaksud. Selain itu, disampaikan pula pentingnya peningkatan SDM dalam meningkatkan daya saing nasional.

Mewakili akademisi di Kalbar, Guru Besar FE Universitas Tanjungpura mengangkat potret ekonomi bagi Kalbar dalam menghadapi KEA 2015. Infrastruktur dan daya saing SDM menjadi tantangan utama bagi Kalbar dengan kualitas SDM berada peringkat di sepertiga akhir secara nasional. Dalam kaitan itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, penguatan kemitraan antara pemerintah-swasta, pemberdayaan UKM, dan peningkatan kualitas SDM.

Staf Ahli Rektor UNMUL bidang Hubungan Eksternal menyampaikan potensi Kalimantan dalam menghadapi KEA 2015 yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, sebagai salah satu potensi tujuan ekspor. Selain itu, potensi pariwisata juga perlu digarap secara lebih serius mengingat potensi alam Kalimantan menawarkan keindahan yang menarik.

Sebagai wakil dari kalangan pengusaha, Wakil Ketua Umum KADIN Kaltim bidang Hubungan Kerja Sama Ekonomi Internasional menyatakan

dukungan dan kesiapan dunia usaha menghadapi KEA 2015. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada dunia usaha sehingga persiapan para pengusaha nasional tidak berjalan secara sporadis, namun merupakan perwujudan langkah strategis yang matang. Infrastruktur kembali menjadi sorotan sebagai tantangan nasional dalam meningkatkan daya saing produk dengan negara ASEAN. *Global Competitiveness Index 2013* menempatkan Indonesia pada posisi 38,

naik dari posisi 50 di tahun sebelumnya. Namun peringkat Indonesia tersebut masih di bawah raihan Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen KSA juga mendistribusikan kuesioner mengenai KEA 2015 kepada seluruh peserta. Dari hasil tabulasi kuesioner yang berhasil dikumpulkan, diketahui sebesar 82% mendukung pembentukan KEA 2015. Sementara terkait sikap menghadapi KEA 2015, sebanyak 79% menyatakan optimis.



Di hadapan lebih dari 200 mahasiswa FE dan FISIP UNMUL, Dirjen KSA menyampaikan perkembangan

menuju pembentukan KEA 2015 yang sejalan dengan politik luar negeri Indonesia dan komitmen para Pemimpin

KULIAH UMUM

Indonesia. Dirjen menekankan pentingnya menumbuhkan rasa optimisme dan *outward looking* kepada para mahasiswa sehingga melihat KEA 2015 sebagai peluang, tak semata sebagai tantangan atau bahkan ancaman. Dirjen juga menjelaskan pentingnya peran para mahasiswa, sebagai *agent of change*, untuk turut berkontribusi dalam mengoptimalkan persiapan nasional, antara lain melalui kajian akademis ataupun tulisan-tulisan yang mencerahkan. Kendati demikian, Dirjen menekankan pentingnya memperdalam pengetahuan guna meningkatkan kualitas diri mengingat persaingan ke depan akan semakin ketat.

DIALOG INTERAKTIF

Untuk menjangkau masyarakat luas, pemasyarakatan Komunitas ASEAN di Balikpapan juga dilakukan melalui dialog interaktif melalui Balikpapan TV (BTV). Acara yang berdurasi sekitar 1 (satu) jam tersebut dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Dirjen KSA, Staf



Ahli Rektor Universitas Mulawarman, dan wakil KADIN Kaltim. Selama acara



tercatat 4 (empat) orang menjadi peserta dialog melalui telepon.

Pemasyarakatan Komunitas ASEAN 2015 di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung



Ditjen Kerja Sama ASEAN telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemasyarakatan ASEAN di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada tanggal 12 – 13 Desember 2013. Rangkaian Pemasyarakatan Komunitas ASEAN dilaksanakan kepada jajaran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pelajar, Mahasiswa dan pemirsa radio.

Pemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan pemasyarakatan diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur, pada tanggal 12 Desember 2013, yang dihadiri oleh 87 peserta meliputi, antara lain, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Babel), perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Babel, pelaku usaha, dan mahasiswa. Bertindak sebagai pembicara adalah Duta Besar Bagas Hapsoro, Pejabat Senior Diplomat, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri dan Kepala Bappeda Prov. Babel, Dr. Yan Megawandi.

Kegiatan pemasyarakatan dibuka oleh Asisten III Sekretaris Daerah, Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Ir. H. Andri Wahyono, yang dalam kesempatan itu menyampaikan sambutan

Gubernur Prov. Babel. Dapat disampaikan bahwa Prov. Babel belum banyak mempersiapkan diri untuk Komunitas ASEAN 2015. Menurutnya Komunitas ASEAN merupakan peluang sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Beberapa bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui harmonisasi peraturan daerah dengan pusat yang mengakomodasi Komunitas ASEAN.

Dubes Bagas Hapsoro sebagai narasumber mempresentasikan arti penting ASEAN bagi Indonesia. Hal itu dapat dipahami lewat posisi ASEAN yang terletak dalam lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia (polugri). Perkembangan yang terjadi di ASEAN akan memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia, sehingga perlu memberikan perhatian yang besar pada ASEAN. Komunitas ASEAN menyediakan banyak peluang sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Dalam rangka pembentukan Komunitas ASEAN, Dubes Bagas Hapsoro mengharapkan agar masyarakat kelak akan berkontribusi bagi pembangunan Komunitas ASEAN serta pentingnya untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat potensi daerah dalam memasuki Komunitas Ekonomi ASEAN.

Adapun dalam paparannya, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa Babel akan menggeser ketergantungan perekonomiannya dari sektor pertambangan untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Babel serta strategi penguatan ekonomi menuju Komunitas ASEAN. Strategi lain yang disiapkan Babel dalam rangka persiapan Komunitas ASEAN adalah melakukan reformasi birokrasi dan sertifikasi sek-

tor pariwisata (standarisasi tenaga kerja pariwisata di Babel). Ditekankan bahwa Prov. Babel dalam memasuki Komunitas ASEAN perlu berupaya untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan infrastruktur (fisik dan energi), mengembangkan sektor ekonomi non tambang, seperti, agro wisata, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Dalam diskusi dengan para narasumber, beberapa hal mengemuka misalnya mengenai pentingnya pengembangan konektivitas dan penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai potensi Babel untuk mendukung pembangunan ekonominya dalam rangka Komunitas ASEAN 2015. Saat ini Babel tengah mengembangkan dan memperkuat konektivitas antara Babel dengan Sumatera dan Kalimantan yang dilakukan dengan pembangunan pelabuhan dan jalan darat di Pulau Bangka dan Belitung. Selain itu. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) juga dinilai sebagai faktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan Komunitas ASEAN. Namun sangat disayangkan, saat ini masih terlihat ketimpangan antara SDM di kota dan kabupaten. SDM yang baik akan mendukung pengembangan di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan perikanan/kelautan. Sebagai catatan, sektor pariwisata di Babel memberikan kontribusi PDRB sebesar 4,84% (tahun 2012), meningkat dari 1,3% (tahun 2007).

Pemasyarakatan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang

Kegiatan pemasyarakatan bagi pemuda/pelajar sekolah menengah berlangsung di SMA N I Pangkalpinang. Acara ini dihadiri oleh 100 pelajar dari 15 (lima belas) perwakilan sekolah menengah di kota Pangkalpinang. Pada kegiatan itu bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Bagian Kertas Kerja, Setditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu.

Dalam kata sambutan Kepala Sekolah SMA N I Pangkalpinang, Kamiludin S.Pd MM menekankan pentingnya *update* pengetahuan siswa tentang ASEAN. SMAN I Pangkalpinang sangat menghargai insiatif Kemlu RI untuk hadir

langsung bertemu dengan para pemuda/pelajar di Pangkalpinang, sebagai sumber informasi utama tentang ASEAN. SMAN I sudah mulai bergerak untuk berwawasan internasional, sehingga program pemasyarakatan Komunitas ASEAN ini dinilai sangat mendukung gerakan dimaksud. Diharapkan para pelajar/pemuda di Pangkalpinang akan berpartisipasi aktif dalam Komunitas ASEAN 2015 mengingat letak geografis Pangkalpinang sangat memungkinkan interaksi dalam konektivitas ASEAN.

Paparan tentang Komunitas ASEAN 2015 yang disajikan, diawali dengan gambaran singkat tentang sejarah ASEAN dan diperdalam dengan perkembangan ASEAN hingga saat ini, khususnya yang menyangkut gagasan pembentukan Komunitas ASEAN serta makna dari komunitas itu sendiri. Hal yang paling ditekankan dalam paparan adalah peran ASEAN dalam pemberdayaan pemuda/pelajar. Di samping itu dijelaskan pula bagaimana pemuda/pelajar Indonesia, khususnya yang ada di daerah dapat mengambil bagian dalam Komunitas ASEAN 2015 serta hal-hal apa yang perlu dilakukan para pemuda/pelajar

dalam menyambut dan mengisi Komunitas ASEAN.

Dalam memberikan paparan, narasumber melakukan dialog interaktif secara langsung dengan para siswa. Para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat pada saat narasumber memaparkan materi. Di samping itu untuk membuat atmosfer paparan tidak membosankan, bagi para peserta diputar film kartun tentang Komunitas ASEAN, diperdengarkan dan diajarkan Hymne ASEAN "ASEAN WAY" dan quiz di akhir acara.

Hal-hal yang menonjol dalam diskusi dengan para pemuda/pelajar terkait dengan upaya ASEAN dalam menjamin situasi keamanan di wilayah Asia Tenggara termasuk mekanisme yang diterapkan dalam menghadapi situasi konflik diantara negara-negara anggota ASEAN. Hal lain yang mendapat perhatian peserta ialah kemungkinan Timor Leste menjadi anggota ASEAN, mengingat terletak di wilayah Asia Tenggara. Disoroti pula upaya ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Asia Tenggara dan program-



program nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta upaya menangani bencana alam, darurat pangan dan musibah penyakit, mengingat negara-negara anggota ASEAN terletak di wilayah yang rawan terjadi bencana alam. Peserta yang merupakan generasi muda tersebut menyoroti pula upaya ASEAN mengatasi konflik-konflik budaya yang terjadi antar negara anggota ASEAN dan partisipasi pemuda/pelajar di daerah dalam mempromosikan budaya Indonesia di ASEAN. Mengingat pentingnya kesiapan generasi muda dalam menyambut Komunitas ASEAN, para pelajar mengusulkan agar pemuda dan pelajar di seluruh wilayah Propinsi Bangka Belitung dapat diberikan paparan tentang Komunitas ASEAN.

Dialog Interaktif

Kegiatan pemasyarakatan lewat dialog interaktif di lakukan di Radio Republik Indonesia (RRI) Sungailiat, tanggal 12 Desember 2013. Narasumber dalam dialog adalah Duta Besar Bagas Hapsoro. Beberapa hal yang terungkap dalam sesi diskusi interaktif:

Perlunya penjelasan yang baik mengenai posisi hubungan Indonesia dengan Malaysia secara bilateral dan secara regional (dalam kerja sama ASEAN). Terdapat pandangan yang negatif dalam hubungan bilateral kedua negara, menyusul berbagai ketegangan, yang antara lain, disebabkan oleh klaim budaya dan perlakuan terhadap WNI (utamanya TKI) di Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia hendaknya dipandang positif dan dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan kedua belah pihak.

Wacana membentuk mata uang tunggal di ASEAN yang hingga saat ini tidak akan terwujud mengingat hal tersebut perlu pembahasan lebih mendalam dan terdapatnya perbedaan kondisi ekonomi antara negara anggota ASEAN.

Langkah untuk mempersiapkan Komunitas ASEAN, antara lain, meningkatkan daya saing produk dan jasa, meningkatkan daya saing perekonomian (menciptakan iklim usaha yang

kondusif), meningkatkan mutu SDM, menyusun kebijakan yang memfasilitasi perdagangan, dan pengembangan infrastruktur.

Pemasyarakatan kepada mahasiswa

Kegiatan pemasyarakatan dilaksanakan di Ruang Rapat Rektorat, Universitas Bangka Belitung (UBB), tanggal 13 Desember 2013. Pemasyarakatan dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, dan pegawai UBB. Bertindak selaku narasumber adalah Duta Bagas Hapsoro. Kegiatan pemasyarakatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis, Bapak R. Priyoko Prayitnodi, S.ST, M.Eng.

Pada paparannya Dubes Bagas, antara lain, menyampaikan hal sebagai berikut.

Transformasi ASEAN sejak pembentukannya dari organisasi yang bersi-

fat longgar menjadi organisasi yang bersifat mengikat melalui pemberlakuan Piagam ASEAN, tahun 2008.

Penguatan kerja sama ASEAN lewat pengesahan Visi ASEAN yang diwujudkan dengan pembentukan Komunitas ASEAN. Pembangunan Komunitas ASEAN dilakukan lewat penguatan ketiga Pilar Komunitas ASEAN, antara lain, pengesahan Piagam HAM ASEAN, pembentukan AIPR, *AHA Centre*, AP-TERR, *ASEAN University Network*, dan *ASEAN Curriculum Sourcebook*.

Di akhir kegiatan disimpulkan bahwa Indonesia memainkan peran penting bagi perkembangan ASEAN. Hal tersebut dapat dipahami lewat perannya sebagai salah satu pendiri ASEAN, inspirator dalam berbagai agenda kerja sama, dan *natural leader* ASEAN.[]



KEGIATAN PEMASYARAKATAN KEA 2015 DI SEMARANG

Bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP), Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN (Ditjen KSA) melaksanakan pemasyarakatan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015 di Kampus UNDIP pada tanggal 7 November 2013. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Dialog Interaktif di TVKU dan TVRI. Selain itu, Ditjen KSA berkolaborasi dengan *Budi Santoso Foundation* melaksanakan Diskusi Kelompok Terbatas bertajuk “Menuju KEA 2015: Kesiapan Jawa Tengah dalam Peningkatan Daya Saing” pada tanggal 8 November 2013.

PEMASYARAKATAN KEA 2015

Dalam pidatonya, Dirjen KSA menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus terus meningkatkan optimismenya dalam menghadapi KEA 2015 karena masyarakat Indonesia sendiri merupakan konstituen yang akan merasakan manfaat integrasi ekonomi. Disampaikan bahwa optimisme tersebut bukan tanpa alasan karena sejarah mencatat Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dan tahun 2008. Selain itu, beberapa lembaga riset global juga memprediksikan bahwa Indonesia di masa datang akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Empat narasumber yang hadir dalam acara tersebut, yaitu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan; Deputi Direktur Eksekutif Departemen Internasional, Bank Indonesia, dan Guru Besar FEB UNDIP, juga optimis Indonesia mampu bersaing dalam menghadapi KEA 2015. Namun untuk jadi “pemenang” perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan daya saing Indonesia secara keseluruhan. Guru Besar FEB UNDIP menekankan bahwa usaha peningkatan daya saing harus dimulai dari perubahan dalam

budaya orang Indonesia sendiri. Perubahan budaya dari takut bersaing menjadi suka bersaing hanya dapat dilakukan melalui pendidikan.

DIALOG INTERAKTIF TVKU

Dalam sosialisasi KEA 2015 di TVKU, Ditjen KSA menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dirjen KSA, Guru Besar FEB UNDIP, dan Wakil Ketua Umum Kerja Sama Internasional Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah (Waketum KADIN Jateng).

Dalam Dialog Interaktif di TVKU, para narasumber menekankan perlunya Indonesia mempersiapkan diri menghadapi KEA 2015 sehingga tidak menjadi target pasar barang dan target pasar jasa terutama aliran bebas tenaga kerja terampil. Persiapan yang diperlukan, antara lain; 1) Melakukan pembinaan dan memberikan bantuan (berupa akses modal, akses pasar dan akses teknologi) terhadap UMKM sehingga UMKM tersebut dapat mengisi pasar-pasar ASEAN; 2) Meningkatkan kualitas SDM agar menjadi tenaga kerja yang terampil, dan; 3) Dukungan Pemerintah kepada sektor-sektor yang masuk dalam

kategori sensitif terkait integrasi KEA 2015.

DIALOG DI TVRI

Berbicara mengenai KEA 2015 dalam siaran tunda di TVRI, hadir tiga narasumber, yaitu Dirjen KSA, Direktur Eksekutif *Budi Santoso Foundation*, dan Waketum KADIN Jateng. Dalam dialog tersebut, para narasumber menekankan bahwa daya saing adalah kunci bagi Indonesia untuk menjadi “pemenang” dalam KEA 2015. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saingnya, Indonesia perlu memperkuat budayanya, seperti mencintai produk dalam negeri ketimbang produk asing. Dalam upaya peningkatan daya saing Jawa Tengah sendiri, Jawa Tengah perlu membenahi tiga faktor yang dinilai masih menjadi penghambat, yakni Kinerja Pemerintah Provinsi, Infrastruktur dan Kinerja Investasi.

DISKUSI KELOMPOK TERBATAS

Diskusi Kelompok Terbatas dibuka oleh Dirjen KSA dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Eksekutif *Budi Santoso Foundation*, Waketum KADIN Jateng, dan Guru Besar FEB



UNDIP. KEA 2015 yang akan terwujud dalam \pm 2 tahun lagi dinilai oleh para narasumber akan menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Tantangan utama yang akan dihadapi bukan sekadar persaingan dalam perdagangan barang lagi, namun akan meluas kepada tantangan perdagangan jasa, terutama aliran tenaga kerja terampil. Dalam perdagangan barang, Indonesia dan daerah dinilai perlu meningkatkan daya saing karena perdagangan Indonesia baik ekstra maupun intra-ASEAN masih belum masuk tiga negara terbesar dalam perdagangan ASEAN yang ditempati oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sementara dalam perdagangan jasa, Indonesia masih dinilai perlu meningkatkan daya saing dibandingkan Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Para narasumber sepakat bahwa selain pemasyarakatan dan edukasi mengenai perdagangan jasa yang tercakup dalam KEA 2015 kepada “stakeholder” pendidikan dan ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan peraturan-peraturan teknis terkait dengan persiapan dalam menghadapi perdagangan jasa di ASEAN.

Bagi Jawa Tengah sendiri, tingkat pemahaman pengusaha terhadap KEA 2015 masih beragam. Berdasarkan survei terkait KEA 2015 oleh *Budi Santoso Foundation* tahun 2013 kepada pengusaha Jawa Tengah diketahui bahwa hanya 31,80% pengusaha melihat KEA 2015 akan memberikan peluang bagi usaha mereka. Sementara 34,98% pengusaha melihat KEA 2015 tidak akan berdampak terhadap usaha mereka dan 14,84% pengusaha melihat KEA 2015 sebagai ancaman.

Tantangan yang teridentifikasi masih menjadi penghambat dalam upaya peningkatan daya saing Jawa Tengah di antaranya adalah infrastruktur, kinerja Pemerintah Provinsi dan kinerja investasi. Permasalahan dalam infrastruktur, yakni permasalahan dalam penyediaan listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Permasalahan dalam kinerja pemerintah, yakni Pe-



merintah Provinsi yang masih menjadi pelaku dan pengelola mandiri dan dukungan Pemerintah yang masih belum maksimal. Permasalahan dalam kinerja investasi adalah terdapatnya peraturan-peraturan Pemerintah Provinsi yang masih menghambat (seperti tenaga kerja, tata ruang, registrasi usaha, pajak dan retribusi daerah serta peraturan lingkungan hidup), dan masih terdapat pungutan liar.

Untuk menjadi “pemenang” dalam menghadapi KEA 2015, dalam upaya peningkatan daya saing Jawa Tengah perlu memperbaiki peran Pemerintah Provinsi dari “pelaku” menjadi “fasilitator” dan dari “swakelola” menjadi “tut wuri handayani”, memperbaiki peran

pengusaha besar yang “egosentris” menjadi “pembimbing” UMKM, dan memperbaiki koordinasi antara pemerintah, pengusaha besar dan UMKM.

Dialog Kelompok Terbatas menghasilkan simpulan yang disepakati dan akan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang baru menduduki jabatan kurang dari 3 bulan. Hal tersebut dipandang sebagai momentum tepat untuk memasukkan KEA 2015 ke dalam program kerja Pemerintah Daerah sehingga seluruh perangkat daerah akan memperkuat diri dalam menghadapi integrasi ASEAN 2015.

GELIAT SEKTOR PARIWISATA ASEAN



Perkembangan sektor pariwisata ASEAN sepanjang tahun 2013 cukup menggembirakan. di tengah ketidakpastian dan pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Sumbangan sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung untuk negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia berkisar sekitar 8-9% dari PDB dan menciptakan 1 dari 11 pekerjaan. Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), ASEAN merupakan kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi di dunia pada tahun 2013. Pertumbuhan wisman ke Asia Tenggara adalah 12% jauh di atas rata-rata pertumbuhan global yang hanya mencapai 5%. Jumlah wisman yang datang ke ASEAN pada tahun 2013 mencapai 90,2 juta. Saat ini, Asia Tenggara menyumbang 7,3% dari total wisman global. Dengan prospek pertumbuhan angka wisman yang diproyeksi masih baik ke depan, diperkirakan total jumlah wisman ASEAN akan mencapai

10,3% dari total wisman global pada tahun 2030.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata di kawasan ASEAN, *ASEAN Tourism Forum* (ATF) menekankan pentingnya konektivitas intra-ASEAN serta fasilitasi visa bagi warga negara non-ASEAN yang memudahkannya mengunjungi ASEAN sebagai destinasi tunggal. Sejalan dengan hal tersebut, data dari *World Travel and Tourism Council* (WTTC) memperkirakan bahwa kebijakan *Visa Facilitation* dapat menambah kunjungan wisatawan sebesar 6 s.d 10 juta orang ke ASEAN pada tahun 2016 dan akan meningkatkan pendapatan sebesar USD 7 s.d 10 juta.

ASEAN Tourism Forum (ATF) mengidentifikasi bahwa kinerja sektor pariwisata yang baik dan penting bagi perekonomian ASEAN disebabkan oleh faktor antara lain:

- Perbaikan infrastruktur dan peningkatan konektivitas dengan peningkatan penerbangan langsung

dan perluasan dari *low cost carriers*;

- Peningkatan daya beli di kawasan Asia; penyempurnaan dan fasilitasi visa; dan
- Kerja sama baik antar-ASEAN maupun antar-ASEAN dengan beberapa mitra utamanya di Asia dimana sekitar 46% dari wisman yang ke ASEAN berasal dari ASEAN (intra-ASEAN) dan 32% dari Asia lainnya.

Khusus Asia, selain turis asal Jepang, Korea dan India, turis China juga tercatat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan angka wisman di ASEAN. Berdasarkan laporan *China National Tourism Administration* (CNTA) menunjukkan bahwa jumlah turis dari China yang berkunjung ke ASEAN selama Januari-November 2013 mencapai 11.435.962 jiwa. Namun demikian, jumlah turis yang sebenarnya diperkirakan lebih besar, karena CNTA hanya mencatat turis asal daratan China dan *first stop* berdasarkan catatan pihak imigrasi China. Perlu diketahui bahwa agen perjalanan China sebagian besar menjual paket perjalanan ke lebih dari satu negara seperti paket Singapura-Malaysia-Thailand, namun yang tercatat di imigrasi China hanya destinasi pertama (*first stop*).

Beberapa catatan *ASEAN China Centre* terkait saran strategi bagi negara-negara ASEAN untuk lebih mendorong minat turis China, antara lain:

Mempermudah/meningkatkan pelayanan visa bagi turis China (bukan bebas visa). Mengingat warga China yang hendak bepergian ke luar negeri wajib memiliki visa sebelum berangkat maka, kebijakan bebas visa (apabila diterapkan) tidak akan berdampak secara signifikan.

Targeted promotion yang gencar dengan memanfaatkan berbagai media (televisi, radio, majalah dan internet). Sebagai contoh, pemutaran film drama



berseri “*Lost in Thailand*” di China pada 2012 telah meningkatkan secara signifikan jumlah wisatawan China ke Thailand. Turis China ke Thailand pada 2013 (Jan-Nov) mencapai lebih dari 3,7 juta wisatawan (tertinggi di antara negara ASEAN) atau meningkat sebesar 97,8% dibanding tahun sebelumnya (2012).

Konektivitas (darat dan udara) dari China ke negara tujuan menjadi penentu arus wisatawan. Selain itu, infrastruktur terpadu selama berada di negara tujuan. Salah satu kendala wisatawan asal China ke Indonesia adalah jarak tempuh yang jauh dan ongkos pesawat yang tinggi dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Pada umumnya, warga China merencanakan beberapa bulan sebelum keberangkatan, oleh karena itu, informasi lengkap mengenai daerah tujuan (*travel guides*) harus tersedia di agen-agen perjalanan.

Turis China pada umumnya mencari makanan *Chinese food* dan akan merasa nyaman apabila tersedia restoran China yang otentik di negara tujuan wisata.

Sebagian besar turis asal China memiliki keterbatasan berbahasa

Inggris. Oleh karena itu, diperlukan informasi/materi dalam bahasa mandarin yang cukup di daerah wisata, antara lain, brosur, peta, menu di restoran, *travel guide*, dan papan petunjuk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah kedatangan wisman ke Indonesia selama tahun 2013 tercatat sebesar 8.637.275 wisman, naik 7,37% dibandingkan tahun 2012 yang jumlahnya 8.044.462 wisman. Dalam rangka meningkatkan kunjung-

an turis ke Indonesia, perlu menaruh perhatian lebih besar pada 3 isu utama pembangunan sektor pariwisata, yaitu (i) peningkatan pembangunan fasilitas infrastruktur bandara dan dari bandara ke tempat wisata atau kota utama (transportasi intermodal), (ii) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memprioritaskan pembangunan pariwisata, regulasi ekonomi terkait *low cost carriers*, *open skies* yang bertahap dan pajak, dan (iii) pembangunan pariwisata berkelanjutan terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim global.



dailytravelphotos.com

HA LONG BAY VIETNAM



Junk Boat Phoenix Cruiser di Ha Long Bay

Ha Long Bay atau bagi masyarakat Vietnam dikenal dengan nama Vinh Ha Long, merupakan destinasi wisata unggulan Vietnam. Ha Long Bay telah menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya untuk datang bertandang. Keindahan teluk ini sangat memukau siapapun yang datang berkunjung untuk menikmati keelokannya secara langsung.

Teluk Ha Long adalah sebuah teluk seluas ±1.500 km² di sebelah utara Vietnam dengan garis pantai sepanjang 120 km. Teluk ini berada di dalam teluk Tonkin dekat perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, berjarak sejauh 170 km dari Hanoi. “Vinh Hạ Long” atau Teluk Ha Long - berarti “Teluk Naga yang sedang turun” dalam bahasa Vietnam.

Sejak tahun 1994, Teluk Halong ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian pada tahun 2012, teluk tersebut menjadi salah satu dari 7

Keajaiban dunia versi *New 7 Wonders Foundation*. Teluk ini terdiri dari 1.969 pulau batu Kapur yang menjulang secara spektakuler dari laut. Beberapa pulau memiliki sejumlah besar gua. Hang Đầu Gỗ (Gua Pasak Kayu) adalah gua terbesar di wilayah Ha Long. Turis Perancis yang mengunjunginya pada akhir abad ke-19 menamainya *Grotte des Merveilles*. Tiga buah ruangan guanya mengandung sejumlah besar stalaktit dan stalagmit. Beberapa gua menjadi objek wisata. Menyala dengan lampu berwarna-warni, mereka terlihat seperti istana bawah tanah dongeng. Bentuk aneh ini dari pegunungan disebabkan oleh air hujan yang mengalir lewat bebatuan kapur. Tahun demi tahun hujan tropis lebat mengikis batu kapur. Namun, tidak seperti tempat lainnya, formasi tanah Halong Bay yang berdiri di dalam air, dan gelombang laut terus ukiran garis pantai, memperdalam gua, dan mengubah wajah tebing dan gua.

Masyarakat setempat memiliki cerita

yang beragam tentang pembentukan Teluk. Penduduk Vietnam memiliki kepercayaan bahwa bangsa mereka berasal dari naga. Pada zaman dahulu ketika negara tersebut baru berdiri, bangsa Vietnam harus menghadapi penjajah dari utara yang menyerang melewati lautan. Untuk melindungi Vietnam, Kaisar Giok mengurung Ibu Naga dan anaknya ke bumi untuk membantu para bangsa tersebut melindungi negaranya. Ibu Naga dan anaknya membakar para musuh dengan api dan mengeluarkan batu zamrud besar sebagai tembok pertahanan. Para penjajah tersebut akhirnya tenggelam dan dikisahkan beribu-ribu tahun setelah peristiwa itu, batu-batu zamrud tersebut berubah menjadi pulau-pulau dengan berbagai ukuran dan bentuk.

Dikisahkan dalam legenda tersebut bahwa Ibu Naga dan anaknya tidak kembali ke surga, tetapi tinggal di dunia sebagai manusia dan membantu penduduk bercocok tanam, beternak, dan



memperluas negara. Untuk mengenang jasa Ibu Naga dan anaknya, penduduk yang hidup di teluk tempat pertempuran terjadi menamakan teluk tersebut *Ha Long*, sedangkan teluk di mana anak naga turun disebut sebagai *Bai Tu Long* (artinya terima kasih kepada anak naga).

Jika dilihat dari atas, Halong Bay menyerupai sebuah karya seni geografis. Sambil menjelajahi teluk, anda akan merasa hilang di dunia legendaris yang dipenuhi oleh pulau-pulau batu. Ada *Man's Head Island*, yang menyerupai lelaki yang sedang berdiri dan melihat kearah daratan. Pulau naga tampak seperti melayang di atas air biru. Pulau La Vong menyerupai seorang nelayan tua. Ada juga *Island of the Sail*, *Pair of Roosters*, dan *Incense Burner*, yang semua terlihat menakjubkan menyerupai

nama mereka. Bentuk-bentuk pulau berubah-ubah tergantung pada sudut cahaya dan dari mana pulau terlihat. Pada bagian inti dari pulau-pulau, ada gua-gua yang indah, seperti Thien Cung (Heavenly Residence Grotto), Dau Go (Driftwood Grotto), Sung Sot (Surprise Grotto), dan Tam Cung (Tiga Palace Grotto).

Halong Bay memiliki banyak kaitan dengan sejarah Vietnam. Misalnya, ada situs geografis terkenal seperti Van Don (situs pelabuhan komersial kuno), *Poem Mountain* (dengan ukiran banyak puisi tentang kaisar dan tokoh-tokoh sejarah terkenal lainnya), dan Sungai Bach Dang (lokasi dua pertempuran laut sengit berperang melawan agresor asing).

Ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa Halong adalah salah satu asal keberadaan manusia di daerah tersebut seperti pada situs arkeologi sebagai Dong Mang, Xich Tho, Soi Nhu, Thoi dan Gieng. Ini juga merupakan daerah keanekaragaman hayati dengan banyak ekosistem hutan air garam, terumbu karang, dan hutan tropis yang menampilkan ribuan spesies hewan dan tumbuhan.

Sebanyak 1600 penduduk Halong tinggal menetap di beberapa desa nelayan terapung, yaitu Cua Van, Ba Hang, Cong Tau & Vong Vieng. Berdasarkan hasil penemuan beberapa ahli sejarah, penduduk Halong kuno pandai membuat peralatan dan senjata yang unik seperti berbagai macam kapak untuk keperluan bercocok tanam dan berburu. Kemampuan lain yang dimiliki penduduk Halong adalah membuat produk keramik yang sangat beragam dan unik.

Sejak lama, sebagian besar penduduk Halong bekerja sebagai nelayan dan sebagian lainnya bekerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata atau pendayung perahu turis. Pada tahun 2012, diberitakan bahwa banyaknya turis yang mengunjungi teluk ini membuat sampah domestik yang dibuang ke laut menjadi semakin banyak dan mengakibatkan budidaya ikan dan kerang yang dipelihara warga banyak mati. Untuk melindungi ekosistem Halong, pemerintah merencanakan untuk memindahkan penduduk lokal ke daratan Vietnam walaupun rencana tersebut masih memunculkan dukungan dan tentangan dari penduduk lokal.



ASEAN NOTIONAL CALENDAR 2014

MARCH		
3-4	1/2014 ACCC Meeting	ASEAN Secretariat , Jakarta
3-6	ASEAN-Australia Threat and Risk Desktop Exercise	Vientiane, Lao PDR
3	Preparatory Meeting of ASEAN Senior Officials Committee for ASCC Council (Prep-SOCA)	Nay Pyi Taw
3-4	The 14 th Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin (SCAROO)	Indonesia
4-5	ASEAN Regional Forum Workshop on Environmental Security: Preparedness, Response and Cooperation to Pollution Incidents Involving Hazardous and Noxious Substances in Marine Environment	TBC
4-5	Meeting of Legal Experts on ATIGA	Indonesia
4-6	ATRC JWG, WGs	Brunei Darussalam
4	Meeting Responsible for Information (SOMRI)	Nay Pyi Taw, Myanmar
5	Senior Officials' Meeting of ASEAN Plus Three Responsible for Information (SOMRI+3)	Nay Pyi Taw, Myanmar
5-7	The 14 th Coordinating Committee on the implementation of the ATIGA (CCA)	Indonesia
6	12 th Conference of (AMRI)	Nay Pyi Taw, Myanmar
6	SEOM& Related Meetings	Yangon, Myanmar
6	3 rd ASEAN Plus Three Ministers Meeting Responsible for Information (AMRI+3)	Nay Pyi Taw, Myanmar
6-7 (TBC)	Delhi Dialogue VI (track 1.5)	New Delhi, India
10-11	Special Head of Delegation (HoD) Pharmaceutical Product Working Group (PPWG)	Myanmar (TBC)
10-14	2nd Expert Group Meeting on Disaster Prevention	Tokyo & Sendai
11-13	12 th Meeting of the ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC)	Indonesia
15-17	9 th Meeting of the ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD)	Yangon, Myanmar
17-21	ASEAN-Japan CEP Joint Committee Meeting and related Meetings	Yangon, Myanmar
17-21	Seminar on Green Productivity Improvement	Central Service Institute, Upper Myanmar
TBC	20 th ASEAN-EU Ministerial Meeting	Brussels, Belgium
18-20	15 th Meeting of the Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG)	Malaysia
18-20	18 th Rubber Based Product Working Group (RBPWG)	Halong Bay, Viet Nam
18-21	1 st Meeting of the Task Force on the Implementation of ASEAN Single Shipping Market (ASSM) and 27 th ASEAN Maritime Transport Working Group	Cambodia
TBC	16 th ASEAN-India Senior Officials Meeting	Brunei Darussalam
TBC	1/2014 ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) Meeting	ASEC
TBC	ACCC Visit to India	India
TBC	- ASEAN Finance and Central Bank Deputies Working Group Meeting (AFDM-WG) - Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) - Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) - Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) - Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) - ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office's Meeting (AMRO) - Asian Bond Market Initiative Task Force (ABMI) - Research Group (RG) - Future Programme (FP)	TBC (Nay Pyi Taw/ Yangon/ Mandalay/ Bagan)
TBC	- SLC Meeting - ABIF Meeting - SCCB Meeting - WC-FSL - WC-CAL	TBC (Nay Pyi Taw, Yangon, Mandalay, Bagan/ Ngapli)

	- WC-PSS Meeting	
20-21	ASEAN Regional Forum Roundtable on Training Resources on Preventive Diplomacy	Wellington, New Zealand
21-23	ASEAN People Forum	Yangon , Myanmar
24-26	7 th Meeting of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers-7 th ACMW	Nay Pyi Taw, Myanmar
24-26	ASEAN Regional Forum Workshop on Cyber Confidence Building Measures	Kuala Lumpur
25-27	1 st AHTN Task Force Meeting	ASEAN Secretariat
27-28	ASEAN Regional Forum Workshop on Marine Oil Spill	Qingdao, China
TBC	13 th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief (ISM on DR)	Chengdu, China
TBC	11 th ASEAN-Russia Joint Planning and Management Committee	ASEAN Secretariat, Jakarta
TBC	12 th ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee	ASEAN Secretariat, Jakarta
TBC	63 rd Coordinating Committee on Investment(CCI)	TBC
TBC	In Country Workshop and Consultations in CLMV and developing the implementation plans for Investment facilitation and Streamlining of business licensing (AANZFTA-EC)	Nay Pyi Taw, Myanmar
TBC	Review meeting on the Draft ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI 2015-2020)	Brunei Darussalam (TBC)
TBC	44 th IAI Task Force	ASEAN Secretariat
TBC	3 rd IAI Task Force & Dialogue Partners Consultation Meeting	ASEAN Secretariat
TBC	5 th ACFTA JC and related meetings	Guangzhou, China (TBC)
TBC	26 th Working Group 2 (WG 2) on Conformity Assessment	Indonesia
TBC	AFSIS DG and Focal Points Meeting	Bangkok
TBC	The 3rd ASEAN-China TWGs Meeting on Food Safety, Animal Inspection and Quarantine, Plant Inspection and Quarantine	Bangkok
TBC	20 th ACMF Meeting	TBC
TBC	ASEAN Forum on Taxation (AFT) Meeting	TBC
TBC	Working Group on Dispute Resolution and Enforcement Mechanism (WG-DREM) Meeting	TBC
TBC	ASEAN+3 Task Forces Meeting	Japan
TBC	ASEAN-China Committee Meeting and Related Meetings	China
TBC	22 nd Meeting of ASEAN Traditional Medicine and Health Supplement Scientific Committee and 15 th Meeting of ASEAN Task Force on GMP	Kualalumpur, Malaysia
TBC	ASEAN-EU Preparatory SOM for the 20 th AEMM	Brussels, Belgium
TBC	20 th ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM)	Brussels, Belgium
TBC	15 th Meeting of ASEAN-India Joint Coordinating Committee (JCC)	ASEAN Secretariat, Jakarta
TBC	13 th ASEAN Expert Group Meeting on Competition (AEGC)	Bangkok, Thailand
TBC	2 nd AANZFTA Committee on Competition Meeting	Bangkok, Thailand
TBC	4 th Project Steering Committee Meeting for the ASEAN – German Cooperation Project 'Competition Policy and Law in ASEAN'	Bangkok, Thailand
TBC	26 th Meeting of Heads of Anti-trafficking Specialist Unit (HSU)	Hanoi, Viet Nam
APRIL		
TBC	Joint Preparatory Meeting of ASEAN SOM for 24 th ASEAN Summit (JPM)	Nay Pyi Taw, Myanmar
1	ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFDM) 22 nd ASEAN Conference of Deputy Governors of Central Bank Meeting (ACDM)	Nay Pyi Taw, Myanmar
2-3	Formal and Informal ASEAN Plus Three Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFDCM+3)	Nay Pyi Taw, Myanmar
4	10 th ASEAN Central Bank Governors' Meeting (ACGM)	Nay Pyi Taw, Myanmar
5	18 th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)	Nay Pyi Taw, Myanmar
1	16 th ASEAN Senior Officials Committee for ASCC Council Meeting	Nay Pyi Taw, Myanmar

K O M M U N I T A S

B U L E T I N

asean

MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

